

GERAKAN WEST PAPUA MELAWAN

2019

Memprotes Rasisme dan Menuntut
Hak Menentukan Nasib Sendiri



tapol



Ditulis oleh

Veronica Koman

Diedit dan publikasikan oleh

TAPOL

September 2020

info@tapol.org
www.tapol.org

DAFTAR ISI

Ucapan Terima Kasih	4
Pendahuluan	5
Ringkasan Eksekutif	7
Bab 1. Enam Titik Balik Gerakan West Papua Melawan	9
Pendahuluan	10
Pemicu Gerakan Melawan	10
Hari pertama Gerakan Melawan	11
Penampakan pertama bendera	
Bintang Kejora – Insiden Fakfak	12
Pembunuhan di luar hukum di Deiyai	12
Dimulainya penumpasan	13
Hari paling mematikan dalam Gerakan Melawan	15
Ringkasan	17
Bab 2. Penumpasan	18
Militerisasi dalam Gerakan Melawan	19
Serangan terhadap kebebasan pers	21
Serangan terhadap pembela HAM	23
Reaksi masyarakat internasional	25
Bab 3. Analisis	26
Bom waktu yang meledak	27
Indonesia yang rasis terhadap rakyat West Papua	28
Pelanggaran HAM sepanjang Gerakan Melawan	31
Gerakan yang semakin menguat	32
Lampiran 1. Pemicu	34
Lampiran 2. Gerakan Melawan	44
Lampiran 3. Daftar Orang Indonesia yang Diadili	113
Lampiran 4. Daftar Tahanan Politik West Papua	116



UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada seluruh pembela hak asasi manusia di West Papua yang saya segani, terutama:

Perkumpulan Pengacara HAM untuk Papua (PAHAM Papua)

Gereja KINGMI Papua

Aliansi Demokrasi untuk Papua (ALDP)

Lembaga Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) di Manokwari

Tim Advokat untuk OAP

Tim Pembela Keadilan untuk Papua di Manokwari

Lembaga Masyarakat Adat Amungme (LEMASA)

Lembaga Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia (ELSHAM)

Sekretariat Keadilan Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan (SKPKC) Fransiskan di Jayapura

Lembaga Bantuan Hukum Papua (LBH Papua)

Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Papua Optimis (LBH Gerimis)

Lembaga Bantuan Hukum Kaki Abu (LBH Kaki Abu).

Keberanian dan ketangguhan mereka dalam kerja advokasi dan pendokumentasian di garda terdepan, meskipun di tengah banyaknya ancaman yang dihadapi, membuat laporan ini bisa terwujud.

Saya berterimakasih kepada TAPOL yang tak hanya menyediakan wadah namun juga dukungan moral dan teknis yang diberikan selama pembuatan laporan ini, yang mana bersamaan dengan persekusi finansial yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia terhadap saya.

Saya juga mengucapkan terima kasih kepada aktivis dan orang West Papua yang telah mempercayakan kepada saya untuk menyalurkan informasi, foto, dan rekaman sepanjang Gerakan West Papua Melawan 2019. Bersama, kita telah dengan sebaik-baiknya melawan pembatasan informasi yang dilakukan Indonesia sejak dulu. Laporan ini dipersembahkan untuk kalian semua.

Veronica Koman



PENDAHULUAN

Laporan yang ditulis pengacara hak asasi manusia (HAM) Veronica Koman ini diterbitkan untuk memperingati satu tahun Gerakan West Papua Melawan (Gerakan Melawan) 2019 dan untuk memperingatinya sebagai satu babak penting di West Papua dalam beberapa dekade belakangan. Laporan ini dilengkapi dengan “laporan video” tentang peristiwa yang sama, yang dipublikasikan secara daring.

TAPOL mengedit dan mewadahi laporan ini karena Gerakan Melawan merupakan bagian dari perjuangan rakyat West Papua merebut keadilan dan hak-hak demokratis atas kebebasan berekspresi dan berorganisasi, juga atas penyelesaian kejahatan di masa lalu, serta masalah-masalah yang selama ini disembunyikan dari perhatian masyarakat Indonesia dan internasional yang lebih luas. Berbagai peristiwa dalam Gerakan Melawan dengan jelas menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia berusaha keras meredam perjuangan tersebut melalui militerisasi, pengejaran, kriminalisasi terhadap para demonstran, pembatasan akses internet, ancaman terhadap kebebasan pers, dan kriminalisasi terhadap para aktivis dan pengacara Indonesia, termasuk kepada penulis.

Tidak seperti gerakan perlawanan lain di berbagai belahan dunia, Gerakan Melawan tidak mendapat pemberitaan media global karena West Papua adalah salah satu wilayah paling dibatasi di dunia dengan sedikit sekali akses yang diberikan kepada jurnalis. Situasi ini diperburuk pembatasan internet dan layanan seluler sepanjang Gerakan Melawan berlangsung. Sebagai kompensasinya, sebagian dari laporan ini akan disajikan dengan gaya bercerita dengan menyertakan foto-foto, khususnya kronologi kejadian pada Lampiran 1 dan Lampiran 2. Laporan ini memuat pemicu Gerakan Melawan, Gerakan Melawan itu sendiri, dan akibatnya hingga setahun kemudian ketika banyak tahanan politik Gerakan Melawan bebas murni setelah menjalani hukuman.

Dalam bab pertama, laporan ini menganalisa enam insiden yang penting untuk memahami faktor-faktor yang memicu timbulnya Gerakan Melawan dan berbagai upaya menumpas aksi-aksi protes dan insiden kekerasan.

Bab kedua menguraikan jenis-jenis upaya penumpasan yang digunakan Pemerintah Indonesia terhadap Gerakan Melawan. Dalam hal ini termasuk pengerahan ribuan pasukan keamanan tambahan ke West Papua, serangan terhadap kebebasan pers, dan serangan terencana terhadap para pembela HAM.

Bab ketiga menganalisis Gerakan Melawan dari perspektif rasisme dan pelanggaran HAM yang dialami rakyat West Papua, dan kelompok gerakan yang melibatkan rakyat West Papua serta mahasiswa dan aktivis politik.

Di bagian akhir, laporan ini menyajikan empat lampiran dengan informasi ekstensif yang dikumpulkan selama beberapa bulan.

- **Lampiran 1** berisi insiden-insiden di Pulau Jawa, Indonesia, pada 15-18 Agustus 2019 yang memicu lahirnya Gerakan Melawan.
- **Lampiran 2** berisi kronologi yang memuat informasi yang lebih lengkap, menceritakan kisah Gerakan Melawan dari hari ke hari.
- **Lampiran 3** memuat daftar orang-orang Indonesia yang diadili atas tindakan rasialisme dan kekerasan terhadap orang West Papua selama Gerakan Melawan berlangsung.
- **Lampiran 4** memuat daftar orang-orang yang dipenjara akibat aktivitas politiknya selama Gerakan Melawan. Termasuk mereka yang didakwa dengan pasal makar dan non-makar karena terlibat dalam Gerakan Melawan.

Sehubungan dengan hak menentukan nasib sendiri rakyat West Papua, dalam laporan ini istilah “West Papua” mengacu pada bagian barat Pulau New Guinea. Wilayah tersebut dibagi menjadi dua provinsi bernama Papua dan Papua Barat oleh pemerintah Indonesia.

Informasi tentang aksi-aksi protes dan insiden-insiden yang dijelaskan dalam laporan ini dikumpulkan melalui komunikasi langsung dengan orang-orang yang terlibat di lapangan, para pengacara dan pembela HAM, juga dari pemberitaan media. Foto-foto diperoleh dari tangan pertama, serta dari banyak orang dan media massa.

Adalah sebuah keistimewaan dan kehormatan untuk menyaksikan, menjadi bagian dari, dan mendokumentasikan Gerakan Melawan. Kekuatan Gerakan Melawan begitu menggetarkan, sehingga penulis bisa merasakannya sehari sebelum Gerakan Melawan pecah, dan masih dapat merasakan energinya selama laporan ini ditulis hampir setahun kemudian.

Laporan ini bertindak sebagai saksi atas kekuatan rakyat West Papua. Ini adalah seruan bagi masyarakat Indonesia untuk menghentikan rasisme dan mendukung hak menentukan nasib sendiri rakyat West Papua. Ini juga adalah seruan kepada Pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan akar penyebab konflik. Dan ini adalah pengingat bagi komunitas internasional untuk berhenti menutup mata terhadap penantian rakyat West Papua selama puluhan tahun akan hak mereka yang sah untuk menentukan nasibnya sendiri.



RINGKASAN EKSEKUTIF

Gerakan West Papua Melawan terjadi di 23 kota di West Papua, 17 kota di Indonesia, dan 3 kota di luar negeri sejak 19 Agustus hingga 30 September 2019. Tiga tuntutan utama Gerakan Melawan adalah mengutuk rasisme, mengadili pelaku insiden rasisme di Jawa yang memicu Gerakan Melawan, dan menuntut hak menentukan nasib sendiri melalui referendum kemerdekaan.

Pemicu Gerakan Melawan adalah persekusi rasis terhadap mahasiswa West Papua di beberapa kota di Indonesia. Secara berurutan persekusi itu terjadi di Malang pada 15 Agustus 2019, di Surabaya pada 16 dan 17 Agustus 2019, serta di Semarang pada 18 Agustus 2019. Namun pemicu utamanya adalah insiden di Surabaya yang mana beberapa anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) berulang kali meneriakkan kata “monyet” kepada para mahasiswa. Kata “monyet” belakangan direbut kembali oleh gerakan dan menjadi simbol resistensi Gerakan Melawan, serta masih banyak digunakan hingga hari ini. Pada tahun 2020, banyak orang West Papua memperingati 17 Agustus, Hari Kemerdekaan Indonesia, sebagai Hari Anti-Rasisme Nasional.

Setidaknya 6.500 personel polisi (terutama Brimob) dan TNI tambahan dikerahkan ke West Papua untuk menumpas Gerakan Melawan. Korban sipil yang tewas selama periode ini mencapai 61 orang, termasuk 35 orang asli West Papua. Dari 35 orang yang meninggal itu, 30 diantaranya menderita luka tembak – mengindikasikan bahwa mereka dibunuh oleh aparat keamanan Indonesia. Tiga korban lainnya tewas akibat luka tusuk yang dilakukan milisi, sedangkan penyebab dua kematian lainnya tidak jelas. Milisi digunakan aparat keamanan pada dua dari tiga peristiwa dimana bendera Bintang Kejora—simbol kemerdekaan West Papua—dikibarkan di gedung-gedung publik.

Sedikitnya 284 warga sipil diketahui terluka. Jumlah sebenarnya lebih tinggi sebab banyak orang West Papua dilaporkan enggan pergi ke rumah sakit. Penggunaan aparat keamanan untuk mengepung rumah sakit setiap kali terjadi insiden membuat banyak orang West Papua takut mencari penanganan medis, mereka trauma dan takut jadi sasaran serangan balasan. Tiga kematian akibat penembakan di Deiyai pada 28 Agustus 2019 bisa dicegah jika para korban mendapatkan pertolongan medis. Ketakutan orang West Papua itu terkonfirmasi dengan adanya fakta bahwa empat belas pasien di Deiyai dan empat pasien di Wamena digelandang polisi saat masih dirawat di rumah sakit. Kasus serupa juga terjadi di Jayapura.

Secara keseluruhan, setidaknya 22.800 warga sipil mengungsi selama periode Gerakan Melawan. Setelah terjadi penembakan yang menewaskan delapan warga sipil di Deiyai pada 28 Agustus 2019, sedikitnya 300 orang mengungsi. Di Wamena, 11.000 orang mengungsi akibat kekerasan antar komunitas lokal dan di Jayapura ada 4.000 orang yang mengungsi. Sekitar 6.000 mahasiswa West Papua di Jawa dan tempat lainnya, pulang ke tanah air mereka. Operasi aparat keamanan di Kabupaten Puncak selama Gerakan Melawan juga telah membuat 1.500 warga sipil mengungsi.

Sepanjang Gerakan Melawan berlangsung, terdapat 13 kasus penyerangan terhadap kebebasan pers termasuk pembatasan internet, dan 23 kasus penyerangan terhadap pembela HAM termasuk satu kasus penyerangan fisik dan sembilan kasus serangan yudisial (judicial harassment). Pada Juni 2020, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan pembatasan internet yang dilakukan pemerintah sebagai perbuatan yang melanggar hukum.

Menanggapi penumpasan brutal dan kekerasan yang meningkat, Dewan HAM PBB mengeluarkan dua pernyataan keprihatinan dan mengirimkan dua komunikasi resmi kepada Pemerintah Indonesia. Indonesia membantah semua tuduhan yang dipertanyakan PBB.

Sebanyak 157 tahanan politik adalah hasil dari 1.017 penangkapan yang terjadi selama periode Gerakan Melawan. Dari kasus-kasus tersebut, 22 orang didakwa dengan pasal makar. Hukuman mereka merentang dari 3 bulan 14 hari sampai 10 tahun penjara.

Sebagai perbandingan, lima tentara yang melakukan tindakan rasis terhadap mahasiswa West Papua di Surabaya hanya diskors. Hanya satu dari lima tentara itu yang pernah diadili di pengadilan militer. Sersan Dua Unang Rohana dinyatakan bersalah karena tidak mematuhi perintah (indisipliner), bukan karena ujaran kebencian, dan hanya dijatuhi hukuman masa percobaan selama dua bulan, artinya ia tidak masuk penjara. Tidak satu pun anggota polisi yang dihukum atas tindakan mereka yang tidak proporsional terhadap para mahasiswa.

Tujuh orang Indonesia diadili karena menyerang orang West Papua. Tiga pelaku tindakan rasialis di Surabaya divonis lima, tujuh, dan sepuluh bulan penjara. Dua dari mereka dinyatakan bersalah karena menyebarkan hoaks; hanya satu yang dinyatakan bersalah karena ujaran yang menghasut kebencian. Empat orang Indonesia di Jayapura diadili karena menikam seorang penduduk West Papua sampai mati. Dua orang dari mereka divonis hukuman tiga tahun penjara, dua remaja lainnya divonis hukuman sebelas bulan penjara.

Kini, setahun kemudian, enam tahanan politik terkait Gerakan Melawan tetap berada di balik jeruji besi. Semua tahanan politik yang dinyatakan bersalah melakukan tindakan makar, telah bebas murni pasca menjalani hukuman penuh dan mereka telah kembali melanjutkan aktivitas politiknya. Alexander Gobai, salah satu aktivis kunci di Jayapura yang ditangkap antara 6-17 September 2019 dan dibawa ke penjara di Balikpapan, Kalimantan Timur—kemudian termasuk ke dalam tahanan politik ‘Balikpapan Seven’—melanjutkan posisinya sebagai presiden badan eksekutif mahasiswa di kampusnya di Jayapura dan baru diwisuda pada September 2020. Setidaknya 2.000 mahasiswa West Papua yang “eksodus”, kini tetap berada di West Papua, menunggu difasilitasi untuk belajar di West Papua atau di wilayah Pasifik. Seorang remaja di Fakfak yang ususnya mengalami luka parah, masih kesulitan buang air besar meski telah menjalani operasi. Tidak ada pelanggaran HAM selama Gerakan Melawan yang telah diselidiki secara layak.



BAB 1. ENAM TITIK BALIK GERAKAN WEST PAPUA MELAWAN





Pendahuluan

Bab ini menyajikan enam insiden atau 'titik balik' yang terjadi selama Gerakan West Papua Melawan tahun 2019. Titik balik ini menunjukkan perubahan-perubahan yang terjadi selama Gerakan Melawan, mulai dari peristiwa tindakan rasis terhadap mahasiswa West Papua yang belajar di Jawa, sebagai 'pemicu', hingga berakhirnya Gerakan Melawan yang ditandai dengan peningkatan jumlah aparat keamanan secara besar-besaran di West Papua, yang disertai penangkapan, pembubaran paksa demonstrasi, pelecehan, intimidasi, dan serangkaian insiden kekerasan.

Insiden-insiden tersebut juga menunjukkan perubahan strategi yang digunakan pemerintah, dimulai dari politisi senior meminta maaf secara publik atas pernyataan yang rasis, mengkooptasi mahasiswa West Papua di Jawa dengan memaksakan acara-acara 'rekonsiliasi', hingga menindak keras segala pertemuan dan kegiatan publik. Laporan ini juga menganalisa akhir dari demonstrasi yang berbeda-beda, seperti pembubaran paksa oleh aparat keamanan, atau seperti pembantaian di Deiyai, 28 Agustus 2019, yang berakhir dengan pembunuhan di luar hukum.

Pemicu Gerakan Melawan

Pemicu Gerakan Melawan tahun 2019 adalah serangkaian insiden rasis terhadap mahasiswa West Papua di beberapa kota di Pulau Jawa. Pertama-tama, insiden yang terjadi di Malang, 15 Agustus 2019. Insiden yang dampaknya paling signifikan terjadi di Surabaya pada 16-17 Agustus 2019, kemudian ditambah insiden di Semarang pada 18 Agustus 2019. Salah satu kesamaan dari insiden-insiden tersebut adalah persekusi disertai ancaman pengusiran mahasiswa West Papua. Luka yang dialami orang West Papua semakin terasa akibat penggunaan kata rasis, 'monyet'. Namun, kata 'monyet' itu kemudian direbut kembali oleh gerakan. "Monyet di West Papua sudah tidak bisa lagi hidup bersama manusia di Indonesia" dan "Pemenuhan hak untuk menentukan nasib sendiri adalah solusi untuk mengakhiri rasisme" menjadi slogan dalam Gerakan Melawan. Demonstran yang menentang rasisme banyak yang menyebut diri mereka sebagai 'monyet melawan', sambil mengenakan topeng wajah monyet dan membawa poster monyet di setiap aksi protes.

Menanggapi kemarahan yang diakibatkan berbagai peristiwa pemicu tersebut, pihak berwenang pertama-tama berusaha meredam protes sebelum kemudian menindak para demonstran baik di West Papua maupun di Indonesia. Dalam periode pertama, antara 19-24 Agustus, pihak berwenang berusaha meredam protes. Beberapa politisi senior lokal (seperti Gubernur Jawa Timur dan Walikota Malang) menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat West Papua, meski beberapa saat sebelumnya mereka yang turut membubarkan aksi protes mahasiswa West Papua. Namun, yang jauh

dari perhatian publik, polisi terus melakukan pengawasan dan pelecehan terhadap mahasiswa West Papua di Jawa, Bali, dan Sulawesi. Hal ini menyebabkan banyak mahasiswa dan pelajar meninggalkan Jawa dan lainnya, pulang ke West Papua. Permintaan maaf secara publik sempat dilakukan demi menenangkan para demonstran dan meredam kemungkinan meluasnya pemberontakan. Tetapi, hingga 24 Agustus 2019, mahasiswa West Papua konsisten menolak gestur publik para politisi, sekalipun itu berasal seorang Komisioner Komnas HAM, karena para mahasiswa tetap curiga dan tidak mau kompromi.

Setelah 24 Agustus, semakin jelas bahwa berbagai upaya memenangkan hati para mahasiswa dan menyampaikan permintaan maaf secara publik, gagal meredam kemarahan yang memuncak di West Papua. Ada juga penghentian sementara pengiriman aparat keamanan. Namun, jauh dari upaya-upaya rekonsiliasi yang digembar-gemborkan media, polisi terus melecehkan dan mengintimidasi mahasiswa West Papua di Jawa, misalnya, salah satunya dengan memberi minuman beralkohol kepada para mahasiswa, suatu metode yang mencerminkan rasisme.

Pemerintah kemudian mulai menggunakan tangan besi dalam menindak para demonstran sejak 29 Agustus 2019. Melalui lima insiden yang akan dijelaskan di bawah ini, laporan ini akan merinci peristiwa-peristiwa sepanjang Gerakan Melawan serta perubahan sikap dan strategi pemerintah.

Hari Pertama Gerakan Melawan

Pemicu Gerakan Melawan - rasisme di Jawa - mengundang aksi-aksi protes di seluruh West Papua dan Indonesia. Pagi-pagi sekali tanggal 19 Agustus, orang-orang telah menyaksikan video yang viral di media sosial, yang tidak diperhitungkan sebelumnya: gedung DPRD di Manokwari, ibu kota Provinsi Papua Barat, terbakar hebat. Pada hari yang sama, mahasiswa di West Papua dan kelompok pro-kemerdekaan melakukan demonstrasi damai di kota-kota dan ibu kota provinsi Jayapura dan Manokwari. Pada minggu-minggu berikutnya, mereka bergabung dengan mahasiswa “eksodus”, yang baru pulang ke West Papua dari Jawa dan tempat lainnya di Indonesia. Menjelaskan partisipasi rakyat biasa menjadi penting, sebab darinya skala dan intensitas protes bisa dijelaskan, jauh melampaui aksi protes yang biasanya dilakukan mahasiswa atau aktivis politik semata.

Rakyat West Papua ikut dalam protes-protes spontan di Jayapura dan Manokwari, serta di beberapa kota dataran rendah lainnya pada 19 Agustus. Tidak ada kelompok atau individu tertentu yang menonjol sebagai pengorganisir aksi massa. Gerakan Melawan ini juga mengejutkan banyak kelompok pro-kemerdekaan. Rakyat biasa berpartisipasi dalam demonstrasi dan menuntut para pelaku tindakan rasis diadili. Rasisme yang mereka saksikan di Jawa mencerminkan rasisme struktural yang mereka alami sendiri di West Papua (rasisme akibat diskriminasi yang terlekat pada sistem politik, ekonomi, dan sosial dalam hubungan sehari-hari antara orang West Papua dan pemerintah serta penduduk asal Indonesia). Partisipasi spontan dalam demonstrasi kemudian menjadi wadah bagi rakyat West Papua untuk mengekspresikan suara kolektif dalam menentang rasisme dan ketidakpuasan secara lebih meluas. Hal ini membuat hak untuk menentukan nasib sendiri menjadi bagian dari tuntutan Gerakan Melawan.

Skala protes di sembilan kota pada hari pertama Gerakan Melawan menunjukkan bahwa masalah-masalah tersebut di atas tidak hanya disuarakan (apalagi diorganisir sendirian) oleh organisasi-organisasi pro-kemerdekaan, tapi merupakan keprihatinan bersama yang dirasakan banyak orang West Papua. Aksi-aksi protes berlangsung di daerah dataran rendah, yang terbesar terjadi di Jayapura dan Manokwari. Kemarahan terlihat jelas di Manokwari sehingga banyak orang West Papua memuji kota tersebut, karena mengingatkan pada sejarah perlawanan di



masa lalu. Hal tersebut juga menimbulkan semacam rasa persaingan, masing-masing ingin ambil bagian dalam membela martabatnya sebagai sebuah bangsa. Pada akhirnya, aksi demonstrasi terjadi di 23 lokasi di seluruh West Papua selama Gerakan Melawan dengan rasa persatuan kolektif. Meski dilarang aparat karena merupakan lambang gerakan pro-kemerdekaan, bendera Bintang Kejora muncul berulang kali. Reaksi aparat beragam, sebagaimana tampak pada dua peristiwa di bawah ini.

Penampakan Pertama Bendera Bintang Kejora – Insiden Fakfak

Peristiwa di Fakfak pada 21 Agustus 2019, hari ketiga Gerakan Melawan, menjadi penting karena bendera Bintang Kejora dikibarkan untuk pertama kalinya. Keesokan harinya, pengunjuk rasa di Jakarta dan Yahukimo juga mengibarkan Bintang Kejora, dan diikuti oleh kota-kota lainnya.

Pada hari pertama pengibaran tersebut, Bintang Kejora dikibarkan di tiang bendera kantor Dewan Adat Papua (DAP) di Fakfak. Bendera itu dikibarkan oleh para demonstran, bukan oleh pimpinan DAP, dan disaksikan oleh ratusan orang. Aktivis HAM memantau acara tersebut dengan cermat, karena mereka yakin bahwa aparat keamanan akan segera menindak dengan keras. Militer dan polisi tidak segera bereaksi terhadap pengibaran tersebut, tetapi beberapa jam kemudian sekelompok milisi bernama Barisan Merah Putih (BMP) datang dan membakar kantor tersebut. Aparat hanya diam menyaksikan. Rekaman video menunjukkan bahwa polisi dan militer Indonesia mengarahkan milisi untuk menyerang para demonstran West Papua.

Di hari tersebut pula, untuk pertama kalinya dalam Gerakan Melawan ada korban terluka parah. Seorang remaja mengalami luka parah di perut setelah diserang, kondisinya serius. Meski selamat, ia masih kesulitan buang air besar hingga saat ini, bahkan setelah beberapa kali mendapatkan penanganan operasi di rumah sakit.

Selama Gerakan Melawan, meskipun bendera Bintang Kejora dikibarkan demonstran di banyak tempat, pengibaran di tiang bendera hanya terjadi di tiga tempat: di kantor Dewan Adat Papua di Fakfak, 21 Agustus; di kantor Bupati Deiyai, 26 Agustus; dan di kantor gubernur di Jayapura, 29-30 Agustus. Insiden di Deiyai, lalu pengibaran Bintang Kejora di Jayapura, dipaparkan lebih lanjut di bawah ini.

Pembunuhan Di Luar Hukum Di Deiyai

Penembakan di Deiyai, 28 Agustus, penting karena menjadi hari paling mematikan kedua dalam Gerakan Melawan. Ketegangan memuncak setelah Bintang Kejora yang dilarang itu berkibar selama delapan jam di kantor bupati pada 26 Agustus. Kekhawatiran akan adanya serangan balasan muncul karena ini adalah kali kedua—setelah sebelumnya terjadi di Fakfak—Bintang Kejora dikibarkan sejak Gerakan Melawan dimulai. Insiden ini juga secara tidak langsung diakibatkan ketegangan yang muncul selama aksi protes yang meletus di enam kabupaten di Pegunungan Tengah tanggal 26 Agustus, seminggu setelah dimulai di dataran rendah.

Insiden Deiyai berawal dari aksi protes anti-rasisme yang dipimpin kelompok muda namun berakhir dengan kekerasan yang mematikan. Menurut seorang saksi mata, anggota DPRD Alfred Package, demonstrasi berlangsung di lapangan depan kantor bupati. Kemudian sebuah mobil yang dikendarai tentara melaju kencang menabrak seorang pemuda, Yustinus Takimai, hingga tewas di tempat.

Sebagai balasan, prajurit itu kemudian diserang dengan panah yang meluncur dari arah kerumunan massa demonstran hingga tewas. Para pemuda tersebut kemudian dilaporkan melempar proyektil ke arah aparat keamanan, yang dibalas dengan tembakan gas air mata. Saat mengetahui bahwa salah satu rekan mereka terbunuh, polisi dan tentara melepaskan tembakan tanpa pandang bulu ke arah kerumunan, hingga menewaskan enam warga sipil.¹

Aksi protes di Deiyai berakhir berbeda dari berbagai aksi protes sebelumnya. Sebagian alasannya, karena Deiyai berada di Pegunungan Tengah, yang meski sangat termiliterisasi tapi jumlah warga pendatang dan aparat keamanan lebih sedikit dibanding penduduk asli West Papua. Hasil pengibaran bendera di Deiyai menunjukkan perbedaan situasi politik di Pegunungan Tengah dibandingkan di dataran rendah. Dua hari sebelum penembakan, para demonstran mengibarkan bendera di kantor bupati dan dibiarkan berkibar selama delapan jam sebelum diturunkan. Sebagai perbandingan, di kota dataran rendah seperti Fakfak, pada 21 Agustus, pengibaran bendera di kantor DAP membuat milisi BMP dengan cepat menyerang dan membakar kantor tersebut hingga rata dengan tanah. Di Deiyai, sebaliknya, aparat keamanan antara enggan atau tidak bisa segera turun tangan menurunkan bendera. Namun, beberapa hari kemudian, demonstrasi lanjutan di wilayah yang sangat termiliterisasi ini berakhir tragis.

Kondisi-kondisi tersebut membuat eskalasi rentan terjadi. Tetapi, hingga insiden ini, aparat keamanan belum serta-merta menggunakan kekuatan mematikan dalam Gerakan Melawan. Sekarang mereka melakukannya. Setelah salah satu dari mereka terbunuh, mereka melepaskan tembakan ke demonstran tanpa pandang bulu. Peristiwa ini mengkonfirmasi ketakutan yang sudah diduga sebelumnya bahwa polisi dan tentara akan memakai kekerasan yang berlebihan terhadap para demonstran. Kejadian ini mengakibatkan delapan warga sipil tewas dan 50 orang luka-luka. Keesokan harinya, 300 personel Brimob tambahan dikerahkan ke Deiyai serta ke Kabupaten Paniai, tempat para demonstran yang terluka dirawat.

Tewasnya korban akibat luka tembak. Sangat mungkin bahwa insiden tersebut merupakan pelanggaran HAM berat, mengingat pembunuhan kilat dilakukan tanpa pandang bulu, dan investigasi yang dilakukan gereja KINGMI melaporkan bahwa penyiksaan juga terjadi dalam peristiwa tersebut.

Dimulainya Penumpasan

Penumpasan dimulai terutama pada 29 Agustus 2019. Babak tersebut ditandai dengan gangguan terhadap para pembela HAM di kota-kota di Indonesia secara serempak, pengiriman personel aparat keamanan tambahan ke West Papua, dan serangkaian penangkapan aktivis-aktivis kunci dengan pasal makar. Penumpasan ini merupakan akhir dari strategi upaya peredaman yang sebelumnya digunakan pemerintah, dengan penggunaan milisi sipil di Jayapura tetap berlanjut.

Meskipun ketegangan akibat Gerakan Melawan menyebar secara spontan, namun penumpasan di Fakfak dan Deiyai bisa dikatakan terisolasi. Sebab, pemerintah pusat waktu itu masih berusaha mengkooptasi orang West Papua dengan upaya rekonsiliasi. Pejabat West Papua, termasuk beberapa yang khusus datang dari Tanah Papua, mengunjungi mahasiswa West Papua di Jawa hanya untuk ditolak, karena mahasiswa menganggap para elit itu sebagai 'kaki tangan kolonial'. Pendekatan pemerintah gagal total dan bahkan menjadi kontraproduktif karena, alih-alih merasa diyakinkan,

1. A. You, "Kisah tragis dari halaman kantor Bupati Deiyai", 12 September 2019. <https://jubi.co.id/kisah-tragis-dari-halaman-kantor-bupati-deiyai/>



mahasiswa West Papua justru merasa dilecehkan. Polisi dan tentara secara sistematis mendekati mahasiswa dan pelajar West Papua yang ada di luar West Papua, baik dengan mengundang mereka ke acara-acara rekonsiliasi atau meminta mereka mengatakan bahwa mereka merasa aman di Jawa, lalu direkam. Salah satu alasan utama ribuan mahasiswa West Papua pulang atau 'eksodus' ke tanah air mereka adalah karena pelecehan ini.

Meski sudah ada permintaan maaf dari para pejabat di Jawa atas komentar rasis yang memicu Gerakan Melawan, serta penangkapan dan investigasi terhadap beberapa pelaku rasis sudah dimulai, namun Gerakan Melawan tidak mereda. Menyusul penolakan dari orang West Papua untuk rekonsiliasi, ditambah ketegangan akibat penembakan di Deiyai, sikap pemerintah mulai mengeras.

Penumpasan itu ditandai dengan adanya gangguan, intimidasi, serta penangkapan terhadap aktivis dan pemimpin demonstran, dan meningkatnya militerisasi. Setelah jeda selama 24-29 Agustus, penambahan pasukan keamanan ke West Papua dilanjutkan lagi pada akhir bulan. Dari 29 Agustus hingga 1 September, pengiriman aparat dilakukan secara besar-besaran, yaitu hampir 4.500 personel polisi dan tentara (3.781 anggota Brimob dan 700 TNI). Kedatangan pasukan ini menandai perubahan cara penanganan oleh pemerintah: dari menawarkan rekonsiliasi via para politisi, berubah jadi tindakan-tindakan keras aparat bersenjata.

Pada 29 Agustus dan 30 Agustus, terjadi gangguan yang terencana terhadap para pembela HAM di lima kota di Indonesia secara serempak. Pada 30 Agustus, aktivis-aktivis kunci di Jakarta mulai ditangkap.

Hari-hari berikutnya, pemerintah lanjut melakukan kriminalisasi terhadap para demonstran. Pada 5 September, Kapolri Tito Karnavian menuduh United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Komite Nasional Papua Barat (KNPB), dan Aliansi Mahasiswa Papua (AMP), sebagai dalang kerusuhan. Namun, Tito juga mengatakan bahwa polisi bersedia membuka ruang dialog "sepanjang mereka (OPM) tidak ada permintaan yang berlebihan." Hal ini sejalan dengan posisi Presiden Jokowi dan kepala stafnya, Moeldoko.² OPM menolak kemungkinan dialog tersebut, menurut mereka, "TPNPB-OPM berjuang bukan untuk dialog, tapi demi Papua merdeka."³ Sementara itu, ada juga sebagian pimpinan kelompok pro-kemerdekaan yang setuju melakukan negosiasi, tapi negosiasi itu tidak pernah terjadi.⁴

Beberapa hari setelah pengumuman itu, yaitu pada 6-17 September, operasi penyisiran (*sweeping*) mulai dilakukan. Hal ini termasuk penangkapan aktivis kunci, anggota organisasi-organisasi yang disebutkan di atas, serta pemimpin mahasiswa di Jayapura. Mereka kemudian dikenal sebagai 'The Balikpapan Seven'.

Aktivis mahasiswa di Sorong dan Manokwari juga ditangkap pada hari-hari berikutnya. Mereka didakwa melakukan makar.

2. CNN Indonesia, "Jokowi Siap Bertemu Tokoh Pro Referendum Papua", 30 September 2019. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190930140128-12-435335/jokowi-siap-bertemu-tokoh-pro-referendum-papua>

3. BBC Indonesia, "Papua: Kapolri buka pintu dialog dengan OPM asal 'tak ada permintaan yang berlebihan'", 5 September 2019. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-49585082>

4. The Jakarta Post, "Papuan Pro-referendum Leader Benny Wenda Waits talks with Jokowi", 14 Oktober 2019. <https://www.thejakartapost.com/news/2019/10/14/papuan-pro-referendum-leader-benny-wenda-awaits-talks-with-jokowi.html>

Pada masa militerisasi ini, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto dan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko, secara terbuka menyatakan bahwa ada "pengaruh asing" di balik aksi massa (atau, menurut narasi pemerintah, 'kerusuhan') Gerakan Melawan. Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, kemudian menggunakan narasi ini dan upaya pengumpulan informasi intelijen sebagai dalih untuk 'ngantor di lapangan' di Jayapura, dimana 700 personel militer baru saja tiba.⁵

Bagian lain dari upaya penumpasan ini adalah keterlibatan kelompok-kelompok milisi. Taktik aparat dalam membubarkan demonstrasi di Fakfak, diterapkan juga di Jayapura. Sebagaimana kemudian terungkap dalam putusan pengadilan yang memvonis para pembunuh Evertin Mofu (lihat Lampiran 3), seorang West Papua yang tewas karena ditusuk, milisi Paguyuban Nusantara memobilisasi warga pendatang untuk menyerang demonstran yang sedang berada di kantor gubernur di Jayapura, 30 Agustus 2019. Video-video yang menunjukkan warga pendatang membawa parang dan senjata tajam lainnya, tersebar di grup-grup percakapan, dan begitu mendengar bahwa milisi mendekat, demonstran West Papua yang mengibarkan bendera Bintang Kejora sejak malam sebelumnya, sepakat meninggalkan kantor gubernur demi menghindari pertumpahan darah. Lebih dari seribu demonstran kemudian dievakuasi menggunakan truk-truk polisi dan tentara.

Pelibatan milisi di Jayapura dimulai sejak 29 Agustus 2019. Mereka "berpatroli" (dalam praktik: *sweeping*) dengan gaya mengancam dan intimidatif hingga empat hari berikutnya. Tanggal 30 Agustus 2019, Kapolri dan Panglima TNI melakukan rapat tertutup dengan milisi BMP setempat, yaitu kelompok milisi yang bertanggung jawab atas kerusuhan di Fakfak, 21 Agustus 2019. Dewan Adat Papua mempertanyakan dan memprotes kegiatan ini.

Singkatnya, dua dari tiga kasus pengibaran Bintang Kejora di kantor publik, milisi sipil terlibat dalam pembubaran. Mereka menyerang demonstran di kantor DAP Fakfak dan menghasut warga pendatang untuk menyerang demonstran di Jayapura. Di Deiyai, tempat yang amat dimiliterisasi tapi jumlah warga pendatang kalah banyak dibanding warga asli, aparat keamanan tidak bisa memanfaatkan kekuatan milisi lokal sehingga aparat sendiri yang melakukan kekerasan terhadap demonstran.

Hari Paling Mematikan Dalam Gerakan Melawan

Hari paling mematikan dalam Gerakan Melawan, 23 September 2019, ditandai serentetan pembunuhan, luka-luka, dan penangkapan. Sedikitnya 46 orang tewas dan 148 luka-luka di Wamena dan Jayapura hari itu, yang juga berujung pada pengungsian massal.

Saat itu, sebanyak 21 aktivis telah ditangkap dan disangkakan makar. Aksi-aksi protes, terutama yang terjadi di luar West Papua, mulai menuntut pembebasan tahanan politik. Penumpasan oleh polisi di Jayapura hari itu sangat brutal hingga dalam salah satu dari banyak video yang beredar, bisa dilihat bahwa terdapat lebih dari seratus tembakan dalam waktu kurang dari dua menit, mengindikasikan

5. A.Arif, "Panglima TNI Ngantor di Papua", 2 September 2019. <https://www.ayosemarang.com/read/2019/09/02/43271/panglima-tni-ngantor-di-papua>

tingkat militerisasi yang terjadi waktu itu. Empat mahasiswa 'eksodus' tewas karena luka tembak. Sampai saat ini, belum ada investigasi atas kejadian tersebut.

Meskipun demikian, insiden yang paling berdarah terjadi di Wamena. Peristiwa itu berawal dari demonstrasi anti-rasisme yang dilakukan para pelajar SMA. Ketegangan dilaporkan mulai meningkat sejak pekan sebelumnya ketika seorang guru ekonomi di sebuah sekolah tingkat menengah setempat menggunakan istilah 'monyet' di kelas, yang oleh siswa West Papua dianggap sebagai ujaran rasis, sedangkan sekolah tidak mengambil tindakan korektif yang memadai.

Angka resmi yang dikeluarkan tentara dan polisi menyebutkan jumlah korban tewas pada hari itu adalah 33 jiwa.⁶ Namun, Komnas HAM menduga bahwa aparat keamanan menekan angka kematian dan ada setidaknya 10 korban tewas yang tidak dilaporkan aparat.⁷ Staf RSUD Wamena juga melaporkan bahwa beberapa siswa sekolah menengah West Papua dibawa ke rumah sakit setelah ditembak polisi, tetapi mereka tidak dimasukkan dalam laporan polisi.⁸ Investigasi jurnalistik yang memenangkan penghargaan menemukan bahwa setidaknya 42 warga sipil tewas hari itu.⁹

Di antara mereka yang tewas di Wamena, 25 adalah warga pendatang. Hal ini menyebabkan banyak orang West Papua merasa sedih, bersalah, malu, dan demoralisasi. Namun, harus diingat bahwa investigasi yang tersedia dan paling komprehensif saat ini pun, tentang apa yang terjadi hari itu, masih belum cukup untuk menyimpulkan siapa para perusuh itu. Banyak dari warga setempat, baik warga West Papua maupun pendatang, menolak penyebutan peristiwa hari itu sebagai konflik horizontal di antara mereka, karena mereka tidak mengenali wajah para perusuh. Sehingga mereka yakin bahwa kekerasan tersebut melibatkan orang-orang dari luar daerah yang sengaja dibawa ke sana.

Bahkan kematian empat mahasiswa West Papua di Jayapura pada hari yang sama tidak menyebabkan demoralisasi seburuk itu di kalangan masyarakat West Papua. Namun, setelah peristiwa 23 September, suasana hati orang-orang yang terlibat dalam Gerakan Melawan menjadi suram dan penuh kesedihan. Sebuah puisi dari seorang aktivis kemerdekaan West Papua terkemuka, yang berharap para pendatang yang pulang ke tempat asal mereka akan kembali lagi setelah situasi lebih baik dan aman, menjadi viral di media sosial. Hal ini konsisten dengan apa yang digaungkan oleh para aktivis pro-kemerdekaan selama Gerakan Melawan, bahwa mereka berperang melawan sistem kolonial, bukan melawan rakyat Indonesia. Menurut data Kementerian Agama,¹⁰ Provinsi Papua dan Papua Barat termasuk provinsi paling toleran di Indonesia.

Faktor lain yang menyebabkan Gerakan Melawan berakhir adalah penumpasan keras dari Pemerintah Indonesia. Setelah penempatan ribuan pasukan keamanan tambahan, personel Brimob berpatroli di mana-mana. Di Jayapura, penggerebekan asrama mahasiswa terjadi setiap beberapa hari, Brimob juga bahkan berpatroli di dalam lingkungan universitas dan kawasan pemukiman warga. Para aktivis melaporkan bahwa hampir tidak mungkin untuk mengadakan pertemuan apa pun. Saat itu, banyak aktivis kunci pro-kemerdekaan sudah dipenjara atau terpaksa bersembunyi.

6. Salam, F. "Mengapa Pemerintah dan Keamanan Indonesia Gagal Cegah Rusuh Wamena?", 23 Oktober 2019. <https://tirto.id/mengapa-pemerintah-dan-keamanan-indonesia-gagal-cegah-rusuh-wamena-ek3>

7. F. Prayoga, "Komnas HAM Temukan 10 Korban Kerusuhan Papua yang Tak Tercatat Polisi", 18 Oktober 2019. <https://nasional.okezone.com/read/2019/10/18/337/2118826/komnas-ham-temukan-10-korban-kerusuhan-papua-yang-tak-tercatat-polisi>

8. K. Lamb, "I feel like I'm dying": West Papua witnesses recount horror of police shootings", 28 September 2019. <https://www.theguardian.com/world/2019/sep/28/i-feel-like-im-dying-west-papua-witnesses-unrest-indonesia-police>

9. V. Mambor and S. Bachyul, "Wamena investigation: What the government is not telling us", 26 November 2019. <https://www.thejakartapost.com/longform/2019/11/26/wamena-investigation-what-the-government-is-not-telling-us.html>

10. N. Savitri, "Papua Barat memiliki tingkat kerukunan beragama tertinggi di Indonesia", 13 Desember 2019 <https://www.abc.net.au/indonesian/2019-12-13/papua-barat-miliki-tingkat-kerukunan-beragama-tertinggi-di-indo/11791342>

Ringkasan

Bagian ini telah menguraikan enam peristiwa penting yang terjadi, yaitu dimulainya Gerakan Melawan, dari berbagai upaya meredam amarah rakyat setelah insiden rasial terhadap mahasiswa West Papua di Jawa mengemuka, hingga kekerasan yang terjadi baik di wilayah dataran rendah maupun pegunungan West Papua, yang diikuti penumpasan berkekuatan penuh oleh aparat keamanan selama September.

Laporan ini menunjukkan bahwa rakyat biasa West Papua terlibat dalam demonstrasi protes sejak hari pertama di tujuh kota di West Papua, dan fenomena ini bahkan bisa dibilang mengejutkan organisasi-organisasi pro-kemerdekaan juga. Rakyat biasa West Papua secara spontan bergabung dengan massa aksi, karena mereka melihatnya sebagai kesempatan untuk menyuarakan kemarahan dan perlawanan terhadap rasisme struktural Pemerintah Indonesia, yang selama ini telah membuat rakyat West Papua menjadi warga kelas dua di tanah mereka sendiri.

Simbol Bintang Kejora hampir selalu muncul sepanjang Gerakan Melawan. Tetapi hanya ketika bendera Bintang Kejora dikibarkan di tiang bendera gedung publik, muncul reaksi keras dari aparat keamanan dan milisi binaannya, yang berbeda-beda tergantung tempat dan waktu. Pasca kedatangan hampir 4.500 personel aparat keamanan tambahan pada akhir Agustus dan awal September, yang kemudian mencapai 6.500 personel secara total selama Gerakan Melawan, terjadi penumpasan terhadap kegiatan para aktivis politik, termasuk pencegahan dan pembubaran pertemuan publik, penangkapan sewenang-wenang, serta tuduhan makar. Beberapa minggu kemudian, pada 23 September, puluhan orang terbunuh secara tragis di Jayapura dan Wamena dalam peristiwa yang masih perlu diselidiki dengan baik.



BAB 2. **PENUMPASAN**



Indonesia menumpas Gerakan Melawan dengan tangan besi hingga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan dua pernyataan publik dan mengirim dua komunikasi formal ke Pemerintah Indonesia selama periode tersebut.

Ribuan personel polisi dan tentara tambahan dikirim ke West Papua. Dari 61 warga sipil yang tewas sepanjang Gerakan Melawan, 35 adalah orang asli West Papua, yang mana 30 diantaranya tewas setelah ditembak aparat keamanan. Sepanjang periode tersebut, terdapat 13 kasus penyerangan terhadap kebebasan pers dan 23 kasus penyerangan terhadap pembela HAM. Total ada 1.017 penangkapan yang berujung pada 157 orang menjadi tahanan politik.

Militerisasi Dalam Gerakan Melawan

Menkopolhukam Wiranto menyatakan bahwa 6.500 prajurit TNI dan Polri telah dikirim ke West Papua pada pekan pertama September 2019.¹¹ Di paruh kedua Gerakan Melawan, beredar banyak foto yang diambil secara sembunyi-sembunyi di seluruh West Papua, terutama di ibu kota Jayapura, yang menunjukkan personel Brimob bersenjata lengkap berpatroli di ruang publik, seperti di jalan-jalan, areal pemukiman, dan kampus-kampus.

Polisi dan tentara mengepung rumah sakit dalam jumlah yang berlebihan usai penembakan di Deiyai, 28 Agustus 2019, juga pada insiden berdarah di Wamena dan Jayapura, 23 September 2019. Banyak orang West Papua terluka yang mengaku takut dan enggan dirawat di rumah sakit, sehingga mengakibatkan jatuhnya korban jiwa lebih banyak.

Setelah penembakan di Deiyai tersebut, tiga orang tewas bukan di lokasi kejadian tapi di kampung halamannya. Kematian ini bisa dicegah seandainya mereka bisa dan bersedia mendapat perawatan medis. Empat belas pasien luka-luka ditangkap polisi saat masih dirawat di rumah sakit, mengkonfirmasi ketakutan mereka.

Dalam insiden 23 September di Wamena, menurut laporan investigasi independen yang dilakukan secara kolaboratif dan diberitakan di *The Jakarta Post*,¹² terdapat setidaknya satu orang yang menderita luka tembak enggan pergi ke rumah sakit. Untuk laporan ini, penulis bicara dengan salah seorang anggota tim investigasi, Fahri Salam. Ia mengkonfirmasi, selama ia melakukan investigasi di Wamena, banyak warga setempat mengisahkan bahwa banyak orang West Papua yang terluka hari itu sengaja tidak pergi ke rumah sakit karena takut ditangkap atau jadi sasaran

11. A. Briantika, "Wiranto Klaim 6.500 Aparat di Papua Barat sebagai Jumlah yang Kecil", 9 September 2019. <https://tirto.id/wiranto-klaim-6500-aparat-di-papua-sebagai-jumlah-yang-kecil-ehL3>

12. V. Mambor dan S. Bachyul, "Wamena investigation: What the government is not telling us", 26 November 2019. <https://www.thejakartapost.com/longform/2019/11/26/wamena-investigation-what-the-government-is-not-telling-us.html>



balas dendam. Ketakutan tersebut terbukti, saat empat pasien yang tengah dirawat di rumah sakit ditangkap oleh polisi.

Deiyai dijaga ketat aparat keamanan Indonesia dalam jumlah besar pasca insiden penembakan 28 Agustus 2019, sehingga mengakibatkan setidaknya 300 warga sipil mengungsi. Sementara itu, konflik horizontal di Jayapura menyebabkan 4.000 orang, terutama warga pendatang, mengungsi ke markas polisi dan tentara. Di Kabupaten Puncak, operasi yang dilakukan aparat gabungan membuat setidaknya 1.500 warga sipil mengungsi.

Wamena juga dijaga ketat pasca kerusuhan 23 September. Sebagaimana banyak diberitakan media massa nasional, 11.000 pengungsi, umumnya warga pendatang, dibantu aparat keamanan dan pemerintah untuk mengakses pesawat dan bantuan. Banyak orang West Papua juga mengungsi tapi luput dari pemberitaan dan tidak terdokumentasi karena tempat yang mereka tuju adalah hutan atau kampung-kampung terdekat. Orang-orang West Papua dilaporkan merasa terancam oleh banyaknya jumlah aparat keamanan, sehingga melarikan diri, sedangkan warga pendatang yang memilih bertahan di sana merasa lebih aman karena kehadiran aparat.

Di luar West Papua, umumnya di Jawa, polisi dan tentara melakukan pengawasan yang mengusik mahasiswa West Papua. Aparat keamanan sering mendatangi asrama atau sekolah mereka, termasuk berusaha menemui mereka saat jam sekolah. Dalam beberapa kasus, aparat merekam para siswa yang diminta untuk mengatakan bahwa mereka merasa aman, untuk tujuan propaganda. Beberapa sekolah juga diminta menggelar acara-acara bertema “persatuan”. Bertolak belakang dari hasil yang diharapkan bahwa mereka akan merasa aman, pendekatan ini justru menyebabkan sekitar 6.000 mahasiswa dan pelajar West Papua eksodus pulang ke tanah air. Banyak juga dari mereka yang pulang karena ingin memperjuangkan kemerdekaan saat Gerakan Melawan sedang berlangsung. Sedangkan yang lainnya mengungkapkan bahwa mereka merasa tidak nyaman dipelototi oleh orang sekitar ketika Gerakan Melawan sedang berlangsung di tanah air mereka. Setahun kemudian, meski sebagian besar dari mereka telah kembali melanjutkan studi, setidaknya 2.000 mahasiswa masih berada di West Papua, mereka minta disekolahkan di West Papua atau wilayah Pasifik.

Pasca Gerakan Melawan, lima Komando Distrik Militer (Kodim) tambahan direncanakan akan dibangun di beberapa wilayah West Papua, seperti di Kabupaten Arfak, Manokwari Selatan, Maybrat, Sorong Selatan, dan Tambrauw. Lima markas polisi baru juga rencananya akan dibangun di Kabupaten Puncak, Intan Jaya, Nduga, Deiyai, dan Yalimo.

Serangan milisi sipil terhadap orang West Papua dilaporkan terjadi di Fakfak, Jayapura, dan Wamena. Sebuah video dari Fakfak, tertanggal 21 Agustus, menampilkan personel polisi dan TNI mengarahkan milisi sipil bersenjata tajam dan tumpul untuk menyerang orang-orang West Papua yang tengah melakukan demonstrasi (Lihat Bab 1). Rekaman lainnya menunjukkan bahwa tanggal 1 September pagi, milisi sipil di Jayapura melemparkan bebatuan ke arah orang-orang West Papua sementara polisi hanya berdiam diri. Kedua video itu telah dikirim ke PBB untuk dikaji.

Dari 61 warga sipil yang tewas sepanjang Gerakan Melawan, 35 diantaranya adalah orang asli West Papua. Tiga puluh dari 35 orang tersebut tewas akibat luka tembak, yang berarti mereka dibunuh oleh aparat keamanan Indonesia.

Serangan Terhadap Kebebasan Pers

Ada 13 kasus serangan terhadap kebebasan pers selama Gerakan Melawan, termasuk empat kasus internasional. Pemerintah Indonesia juga melakukan tindakan keras di media sosial, seperti memblokir lebih dari 1.750 akun per 29 Agustus 2019.¹³ Banyak aktivis West Papua yang mengeluhkan bahwa akun media sosial mereka ditanggihkan pada periode tersebut.

Indonesia memberlakukan **pembatasan dan pemadaman internet** di West Papua sejak hari pertama Gerakan Melawan, atas alasan “keamanan nasional”, dan menerbitkan lima pengumuman masing-masing tanggal 19 Agustus, 21 Agustus, 23 Agustus, 4 September, dan 7 September 2019. Menurut SAFEnet,¹⁴ pembatasan *bandwidth* diberlakukan di sejumlah wilayah di West Papua pada 19 Agustus, jam 13.00-20.30 waktu setempat. Pemadaman internet secara total terjadi di 29 distrik di Provinsi Papua dan di 13 distrik di Provinsi Papua Barat sejak 21 Agustus hingga 4 September, jam 11.00 waktu setempat. Sejak 4 hingga 9 September, pemadaman internet terus dilakukan di empat kabupaten di Provinsi Papua (Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Mimika, dan Jayawijaya) serta di dua kota di Provinsi Papua Barat (Manokwari dan Sorong). Kelompok masyarakat sipil di Jakarta mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tata Usaha (PTUN) Jakarta pada 21 November 2019. Tanggal 3 Juni 2020, pengadilan menyatakan bahwa pemadaman internet di West Papua adalah tindakan ‘melanggar hukum’.

Wartawan terkemuka asli West Papua, **Victor Mambor**, menjadi korban *doxing* pada 22 Agustus. Berbagai informasi pribadinya disebar di media sosial Twitter, termasuk lokasi persis rumahnya di peta. Serangan daring itu juga berisi fitnah, yang mengaitkan Victor dengan organisasi pro-kemerdekaan, OPM.¹⁵

Pada 28 Agustus, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) di Jember mengeluarkan pernyataan pengecaman terhadap **larangan meliput aksi-aksi Gerakan Melawan**. Pihak yang berwenang, setidaknya di Jember dan Semarang, meminta wartawan untuk membatasi atau tidak memberitakan Gerakan Melawan demi ‘menenangkan’ situasi.

Reportase **Reuters** tentang penembakan di Deiyai, 28 Agustus, yang menewaskan warga sipil, diberikan stempel hoaks oleh akun resmi TNI di Twitter. Twit itu disertai keterangan, “*Jangan mau dibelah provokasi asing!!! Bangsa lain ga seneng Indonesia bersatu. Tetap jaga persatuan kawan!!!*”¹⁶



13. Jakarta K.M. Tehusijarana, “Government gets YouTube to block satirical West Papua advertisement”, 29 Agustus 2019. <https://www.thejakartapost.com/news/2019/08/29/govt-gets-youtube-to-block-satirical-west-papua-advertisement.html>

14. D. Juniarto, “The rise of internet shutdown in Southeast Asia”, 31 Juli 2020. <https://medium.com/@DamarJuniarto/the-rise-of-internet-shutdown-in-southeast-asia-region-4808e20455e2>

15. I Duillah, “Alert AJI Soal Intimidasi terhadap Victor Mambor”, 23 Agustus 2019. <https://aji.or.id/read/press-release/973/alert-aji-soal-intimidasi-terhadap-victor-mambor.html>

16. https://twitter.com/Puspen_TNI/status/1166681399547461632?s=20, 28 Agustus 2019.

Juga pada 28 Agustus, video satire berjudul “*Visit West Papua!*” yang diproduksi media asal Australia, **The Juice Media**, diblokir YouTube di Indonesia atas dasar ‘komplain hukum’ yang diajukan oleh suatu pemerintah.

Awal September, usai memberitakan pembunuhan di Deiyai, jurnalis lepas yang menulis untuk *Al-Jazeera*, Febriana Firdaus, turut jadi sasaran *doxing* dan diserang secara daring. Ia mendapat ancaman di akun Facebook dan Twitter sehingga ia berhenti bekerja sementara waktu dan pindah ke tempat aman.¹⁷

Reporter **ABC Indonesia**, termasuk koresponden asing Anne Barker dan kamerawan Phil Hemingway, tiba di West Papua pada 3 September 2019 untuk meliput Gerakan Melawan. Mereka hanya diizinkan berada di Kota Sorong dan dikuntit anggota intelijen sepanjang waktu selama berada di sana. Pada 6 September, kepolisian di Jakarta mengirim pesan supaya mereka kembali ke Jakarta keesokan harinya. Alhasil, tim *ABC Indonesia* harus kembali ke Jakarta pada 8 September, dua hari lebih awal dari yang direncanakan. Ketika mereka tiba di Jakarta, polisi kembali mengirim pesan untuk memastikan apakah mereka benar-benar telah kembali, serta meminta mereka datang ke Mabes Polri. Mereka menolak datang.

Pada **9 September**, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI mengundang para jurnalis asing untuk menghadiri rapat tertutup di kantor kementerian. Sekitar lima belas hingga dua puluh jurnalis datang. Juru Bicara Kemenlu saat itu, Teuku Faizasyah, mengatakan akses ke West Papua ditutup tanpa batas waktu dengan dalih keamanan. Kebijakan tersebut juga berlaku bagi para diplomat.

Tanggal 9 September, media yang berbasis di Jakarta, **Tirto.id**, diminta pihak kepolisian untuk tidak memberitakan insiden pelemparan ular ke asrama mahasiswa West Papua di Surabaya yang terjadi pada subuh itu. Sementara di Jayapura, sekitar 20 personel Brimob bersenjata lengkap menggeledah rumah wartawan **Benny Mawel** tanpa surat perintah. Tindakan tersebut dilakukan dalam rangka menangkap orang lain bernama Lucky Siep.¹⁸

Sebelum kerusuhan pecah di Jayapura pada 23 September, polisi mengintimidasi dan mencegah tiga jurnalis West Papua melakukan reportase. Koresponden *The Jakarta Post* **Benny Mawel**, jurnalis Suara Papua **Ardi Bayage**, dan jurnalis Jubi **Hengky Yeimo**, tengah meliput pemogokan ribuan mahasiswa di lingkungan Universitas Cenderawasih.¹⁹ Mereka didorong dan dilecehkan secara verbal setelah memotret polisi yang sedang merobek spanduk. Polisi memukul kepala Ardi Bayage. Para jurnalis itu diminta pergi atas dasar perintah kapolres.

17. R. Gunadha, “Jurnalis Aljazeera Febriana Firdaus Diintimidasi karena Artikel soal Papua”, 5 September 2019. <https://www.suara.com/news/2019/09/05/200109/jurnalis-aljazeera-febriana-firdaus-diintimidasi-karena-artikel-soal-papua>

18. D. Pangestika, “Brimob Searches Papuan Journalist's House Without a Warrant”, 12 September 2019. <https://www.thejakartapost.com/news/2019/09/12/brimob-searches-papuan-journalists-house-without-warrant.html>

19. Suara Papua, “Kronologis Intimidasi dan Pembatasan Tiga Wartawan untuk Meliput di Jayapura”, 23 September 2019. <https://suarapapua.com/2019/09/23/kronologis-intimidasi-dan-pembatasan-tiga-wartawan-untuk-meliput-di-jayapura/>

Serangan Terhadap Pembela HAM

Selama Gerakan Melawan, terdapat 23 kasus gangguan dan intimidasi terhadap para pembela HAM di West Papua dan Indonesia, termasuk satu serangan fisik dan sembilan kasus serangan yudisial.

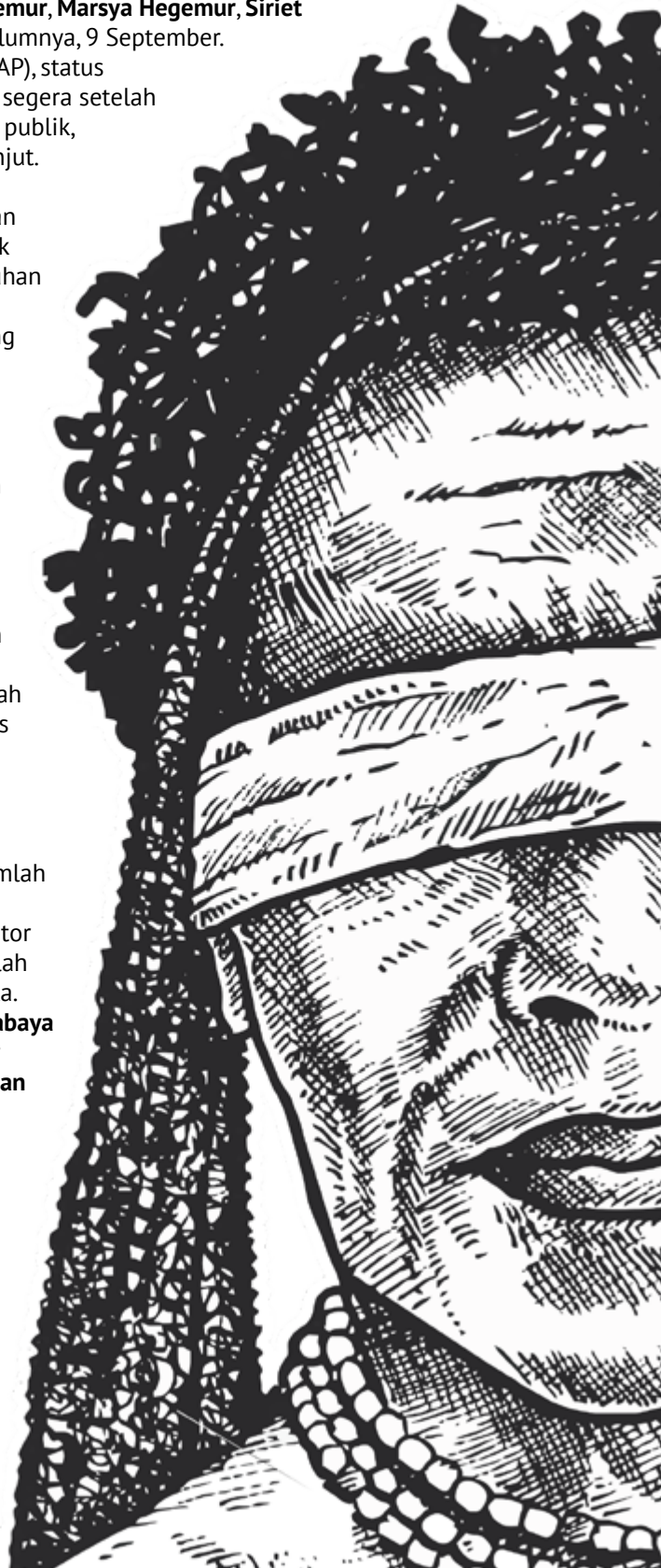
Di Fakfak, pasca pengibaran bendera Bintang Kejora di depan kantor DAP pada 21 Agustus, enam pembela HAM dan aktivis masyarakat adat dipanggil polisi sebagai saksi kasus makar. Dalam surat kepolisian tertanggal 7 September 2019, **Fredi Warpopor** dipanggil untuk diinterogasi pada 10 September, sedangkan **Samuel Rohrohmana, Abner Hegemur, Marsya Hegemur, Siriet Hegemur**, dan **Sirset Gwasgwas** telah dipanggil sehari sebelumnya, 9 September. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), status seseorang dapat ditingkatkan dari saksi menjadi tersangka segera setelah interogasi pertama. Namun, berkat advokasi dan kampanye publik, keenam orang tersebut tidak menerima panggilan lebih lanjut.

Di Deiyai, dimana hari paling berdarah kedua dalam Gerakan Melawan terjadi, tiga pembela HAM yang juga imam Katolik diganggu dan diintimidasi aparat keamanan setelah kerusuhan terjadi. **Pastor Santon Takege** ditodong senapan di kepala ketika ia mencoba mengunjungi korban terluka yang sedang dirawat di Rumah Sakit Madi pada 29 Agustus. Militer dan polisi mencari **Pastor Demianus Adii** ketika mereka menyisir Kampung Tigi Barat pada 4 September, namun beliau berhasil disembunyikan penduduk desa. Aparat keamanan mengintimidasi **Pastor Ibrani Dwijangge** dengan menanyakan hubungannya dengan pejuang kemerdekaan OPM ketika mereka menyisir Distrik Damabagata pada 6 September.

Yones Douw, Kepala Departemen Keadilan dan Perdamaian di gereja KINGMI, berulang kali menjadi sasaran pengawasan yang melecehkan. Hampir setiap malam, sebuah drone terbang di atas rumahnya di Nabire. Ia adalah penulis laporan komprehensif tentang penembakan di Deiyai yang disebutkan di atas.

Selama dua hari, 29 dan 30 Agustus, terjadi serangan terkoordinasi terhadap lima kantor bantuan hukum di sejumlah kota di Indonesia. Sambil membawa bendera Merah Putih, milisi reaksioner sayap kanan berdemonstrasi di depan kantor lembaga-lembaga bantuan hukum yang mereka anggap telah turut memprovokasi kerusuhan lewat kerja advokasi mereka. Tanggal 29 Agustus, puluhan orang menggeruduk **LBH Surabaya** di Provinsi Jawa Timur. Keesokan harinya, massa reaksioner menggeruduk **LBH Jakarta, Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI)** di Bandung, Provinsi Jawa Barat, **LBH Makassar** di Provinsi Sulawesi Selatan, dan kantor **KontraS** di Surabaya.

Setelah pengiriman ribuan personel polisi dan tentara tambahan pada akhir Agustus, para **pembela hak asasi manusia di Jayapura** dilaporkan merasa terintimidasi oleh patroli Brimob bersenjata lengkap di setiap sudut kota. Pada suatu waktu, personel Brimob bersenjata lengkap memasuki kantor Sekretariat Keadilan, Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan (SKPKC) Fransiskan Papua.



Veronica Koman, pengacara HAM asal Indonesia yang mendampingi mahasiswa West Papua di Surabaya, dan penulis laporan ini, ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Timur pada 4 September. Polisi menuduhnya telah menghasut kekerasan melalui ujaran kebencian dan penyebaran berita bohong tentang insiden penggepungan asrama mahasiswa West Papua Surabaya lewat akun Twitter-nya, sehingga menyulut Gerakan Melawan. Polisi mengatakan penulis melanggar pasal 45A ayat (2) UU ITE, pasal 160 KUHP, pasal 15 KUHP, dan pasal 16 UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Karena saat itu penulis berada di Australia, polisi mengumumkan bahwa mereka telah meminta Interpol menerbitkan *red notice* untuk penulis. Polisi juga mengancam akan membekukan rekening bank penulis dan mencabut paspornya. Hingga hari ini, Kementerian Keuangan Indonesia masih memberlakukan hukuman finansial terhadap penulis, menuntut agar penulis mengembalikan dana beasiswa magister yang telah diterimanya senilai 773.876.918 rupiah. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Kemenkominfo pernah mengklaim bahwa kejadian 17 Agustus 2019 di asrama mahasiswa West Papua Surabaya yang dibagikan penulis sebagai hoaks, tapi kemudian mereka meminta maaf.

Yan Christian Warinussy, pengacara HAM terkemuka asli West Papua yang berbasis di Manokwari, dipanggil polisi sebagai saksi kasus makar dan penghasutan. Dalam surat polisi tertanggal 23 September, ia dipanggil untuk diinterogasi pada 26 September tentang pengibaran bendera Bintang Kejora yang terjadi pada 3 September di Manokwari.

Dandhy Laksono, seorang jurnalis dan pembuat film dokumenter terkenal dari Indonesia, ditangkap polisi sekitar jam 11 malam di rumahnya pada 26 September 2019. Polda Metro Jaya mengklaim twit Dandhy, tentang korban kerusuhan di Jayapura dan Wamena pada 23 September, adalah ujaran kebencian yang menghasut kekerasan, melanggar pasal 28 dan 45 UU ITE.²⁰ Ia dibebaskan beberapa jam kemudian yaitu pada jam 4 pagi karena dukungan publik baginya mengalir deras, namun status Dandhy masih sebagai tersangka hingga saat laporan ini ditulis.

Tiga pengacara HAM yang berbasis di Jayapura, kuasa hukum para tahanan politik 'The Balikpapan Seven', turut menjadi target serangan dan intimidasi. Pada 28 September 2019, pengacara pemenang penghargaan **Gustaf Kaver** diperingatkan polisi untuk tidak membuat komentar publik lagi tentang kasus yang ia tangani, setelah sebelumnya ia aktif berbicara di sejumlah webinar untuk kampanye. Tanggal 8 Juni 2020, seorang pengendara motor memukul kepala **Yuliana Yabansabra**, yang saat itu juga sedang mengendarai sepeda motor, untuk membuatnya terjatuh.²¹ Dua hari menjelang putusan, 15 Juni 2020, tanpa alasan yang jelas puluhan polisi dan tentara berdiri di luar kantor **Anum Siregar**, Aliansi Demokrasi untuk Papua (ALDP).

Pada **6 Juni 2020**, sebuah webinar yang kebanyakan membahas kasus 'The Balikpapan Seven', yang diselenggarakan mahasiswa Universitas Indonesia (UI), diklarifikasi oleh pejabat kampus beberapa jam setelah tayang sebagai bukan representasi resmi UI, dengan alasan bahwa narasumber dalam webinar itu "tidak pantas" jadi pembicara.²² Pembicara dalam webinar tersebut adalah mantan tahanan politik Sayang Mandabayan serta pengacara HAM Veronica Koman dan Gustaf Kaver. Badan Intelijen Negara (BIN) terlihat mendatangi kampus UI dan memberi pernyataan lima hari kemudian bahwa webinar tersebut "tidak seimbang".²³

20. A Dipa, "Filmmaker Dandhy Laksono named 'hate speech' suspect for tweeting about clashes in Papua", 27 September 2019. <https://www.thejakartapost.com/news/2019/09/27/filmmaker-dandhy-laksono-named-hate-speech-suspect-for-tweeting-about-clashes-in-papua.html>

21. AB Da Costa, "Escalating Intimidation, Threats, ahead of high-profile treason verdict: Rights group", 16 Juni 2020. <https://www.thejakartapost.com/news/2020/06/16/escalating-intimidation-threats-ahead-of-high-profile-treason-verdict-indonesian-rights.html>

22. TI Oktavianti, "UI disavows #PapuanLivesMatter discussion organised by student body", 8 Juni 2020. <https://www.thejakartapost.com/news/2020/06/08/ui-disavows-papuanlivesmatter-discussion-organized-by-student-body.html>

23. BIN-UI menilai diskusi soal Papua tidak berimbang", <https://www.youtube.com/watch?v=9pSazRbO4Ck>

Reaksi Dari Komunitas Internasional

Pada 2 September 2019, *Pacific Islands Forum* menyatakan keprihatinan mereka atas meningkatnya kekerasan di West Papua. Mereka meminta agar akar konflik segera diselesaikan dan mendesak kantor HAM PBB mengunjungi West Papua.²⁴ Dua hari kemudian, Papua New Guinea kembali mendesak PBB untuk mengunjungi West Papua.²⁵

Dua hari kemudian, 4 September, Komisaris Tinggi PBB untuk masalah HAM, Michelle Bachelet, menyatakan keprihatinannya atas eskalasi kekerasan di West Papua.²⁶ Dia juga mendorong Presiden Indonesia Jokowi untuk melakukan dialog dan menyatakan bahwa telah terjadi serangan terhadap pembela HAM dan jurnalis, termasuk pemadaman jaringan internet.

Masih di tanggal yang sama, enam Pelapor Khusus PBB mengirimkan pertanyaan kepada Pemerintah Indonesia tentang insiden rasisme di Jawa, penembakan di Deiyai, pemutusan internet, serta ancaman terhadap pengacara Veronica Koman dan jurnalis Victor Mambor.²⁷ Indonesia membantah semua tuduhan pelanggaran dalam surat tertanggal 12 September 2019.²⁸

Pada 16 September, lima Pelapor Khusus PBB menyerukan perlindungan terhadap Veronica Koman dan pihak-pihak yang memberitakan Gerakan Melawan.²⁹ Mereka juga mendesak agar segera dilakukan dialog. Pelapor Khusus PBB juga melakukan dua komunikasi formal dengan Pemerintah Indonesia terkait Gerakan Melawan.

Dalam sebuah surat tertanggal 20 November 2019, delapan Pelapor Khusus PBB mengirimkan daftar tuduhan tentang penggunaan kekuatan berlebihan dan penggunaan milisi sipil selama Gerakan Melawan.³⁰ Indonesia membantah tuduhan tersebut dalam surat balasan tertanggal 21 November 2019³¹ dan 14 Februari 2020.³²

Tanggal 6 September 2019, Selandia Baru mengatakan bahwa mereka sedang memantau situasi di West Papua secara cermat dan bahwa mereka telah menyatakan kekhawatirannya kepada Indonesia. Mereka juga mendorong Indonesia untuk mengizinkan kunjungan PBB, sebagaimana direkomendasikan oleh Pacific Islands Forum.³³ Kedutaan Besar Selandia Baru kemudian mengakui bahwa permintaannya untuk mengunjungi West Papua ditolak Indonesia. Diplomat dari Kanada dan Inggris juga tidak diberi akses ke West Papua.³⁴ Australia juga menyatakan kekhawatirannya dan mendesak “kedua belah pihak menahan diri secara mutlak menahan diri secara mutlak”, menyusul meletusnya hari paling mematikan sepanjang Gerakan Melawan pada 23 September 2019 di Wamena dan Jayapura.³⁵

24. Pacific Islands Forum Secretary General on events in West Papua, 2 September 2019. <https://www.forumsec.org/2019/09/02/pacific-islands-forum-secretary-general-on-events-in-west-papua/>

25. PNG urges UN visit to West Papua, 4 September 2019. <https://www.rnz.co.nz/international/pacific-news/398044/png-urges-un-visit-to-west-papua>

26. Comment by UN High Commissioner for Human Rights Michelle Bachelet on Indonesia (Papua and West Papua), 4 September 2019. <https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24942&LangID=E>

27. United Nations Commissions on Human Rights (UNHCR) Joint Communication by Special Procedures, 4 September 2019, UN Doc AL IDN 7/2019. <https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownloadPublicCommunicationFile?gld=24835>

28. Embassy of the Republic of Indonesia to the United Nations, WTO, and other International Organisations in Geneva Response by Ambassador/Permanent Representative Hasan Kleib, 12 September 2019, Re. No. 133/POL-II/IX/2019. <https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownloadFile?gld=34873>

29. “Indonesia must protect the rights of Veronica Koman and other reporting on Papua Papua and West Papua protests - UN experts”, 16 September 2019. <https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24990&LangID=E>

30. United Nations Commissions on Human Rights (UNHCR) Joint Communication by Special Procedures, 20 November 2019, UN Doc AL IDN 8/2019. <https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownloadPublicCommunicationFile?gld=24919>

31. Embassy of the Republic of Indonesia to the United Nations, WTO, and other International Organisations in Geneva, Response by Ambassador/Permanent Representative Hasan Kleib, 12 November 2019, Ref. No. 167/POL-II/XI/2019. <https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownloadFile?gld=34964>

32. Embassy of the Republic of Indonesia to the United Nations, WTO, and other International Organisations in Geneva, Response by Ambassador/Permanent Representative Hasan Kleib, 14 Februari 2020, Ref. No. 35/POL-II/II/2020. <https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownloadFile?gld=35175>

33. RNZ, “NZ ‘deeply concerned’ by West Papua violence”, 6 September 2019. <https://www.rnz.co.nz/international/pacific-news/398223/nz-deeply-concerned-by-west-papua-violence>

34. J Massola, “Indonesia blocks diplomats from Papua, while Australia sits back”, 8 Oktober 2019. <https://www.smh.com.au/world/asia/indonesia-blocks-diplomats-from-papua-while-australia-sits-back-20191007-p52yfh.html>

35. RNZ, “Australia urges restraint in West Papua amid ongoing violence”, 26 September 2019. <https://www.rnz.co.nz/international/pacific-news/399625/australia-urges-restraint-in-west-papua-amid-ongoing-violence>



BAB 3.
ANALISIS

Bom Waktu Yang Meledak

Insiden yang melibatkan bendera Merah Putih di sekitar Hari Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus terjadi setiap tahun. Sebuah bendera Indonesia raksasa dikibarkan di West Papua pada tahun 2017.³⁶ Tahun 2018, setahun sebelum terjadi pengepungan asrama yang memicu Gerakan Melawan, polisi dan milisi reaksioner sayap kanan pernah mengepung asrama mahasiswa West Papua yang sama di Surabaya, memaksa mereka mengibarkan bendera Indonesia.³⁷ Kisah pejuang kemerdekaan West Papua menyerahkan diri dan menyatakan kesetiaan kepada Republik Indonesia muncul pada periode periode ini tiap tahunnya. Fenomena ini menunjukkan betapa Indonesia sangat memaksakan nasionalismenya kepada orang orang West Papua.

Peristiwa 16 Agustus 2019 di Surabaya bukanlah kali pertama mahasiswa West Papua menjadi korban ujaran rasis oleh aparat Indonesia. Kejadian serupa sudah sering penulis dengar, disampaikan oleh mahasiswa di Jakarta, juga mendengarnya secara langsung saat kisruh demonstrasi yang dibubarkan paksa.

Pada Desember 2018, pemerintah daerah dan polisi serta militer di Surabaya secara paksa mengeluarkan lebih dari 200 mahasiswa West Papua dari kota Surabaya, pasca demonstrasi peringatan hari nasional West Papua di kota tersebut. Penulis hadir pada saat itu. Ratusan orang, mungkin orang-orang yang sama dengan pengepung pada Agustus tahun berikutnya, menghitung mahasiswa satu per satu saat mereka dipaksa berjalan keluar dari asrama menuju bus yang akan membawa mereka keluar dari kota Surabaya.

Pada 15 Agustus 2019 di Malang, usai demonstrasi mahasiswa West Papua yang dibubarkan polisi dan ormas reaksioner secara paksa, Wakil Walikota Malang mengatakan bahwa wilayahnya bukan tempat bagi kelompok separatis. Malam berikutnya, 16 Agustus 2019 di Surabaya, ratusan orang menyanyikan "Usir Papua" di luar asrama. Pada tanggal 18 Agustus, sebuah spanduk berisi ancaman akan mengusir orang West Papua yang terlibat dalam separatisme, dipasang di depan asrama mahasiswa West Papua Semarang. Hal ini menyakiti orang West Papua, karena pada kenyataannya, banyak dari mereka yang ingin bebas dari Indonesia tapi justru dilarang.

Penggunaan milisi reaksioner sayap kanan untuk menyerang mahasiswa West Papua di luar tanah airnya, saat mereka melakukan rapat, diskusi, maupun demonstrasi, makin lama makin meningkat selama empat tahun belakangan ini. Taktik ini muncul kurang lebih bersamaan dengan dibentuknya

36. Jayapura Kota, "Bentangkan Bendera Merah Putih Raksasa, Walikota Pastikan Papua adalah Bagian NKRI", 16 Agustus 2017, <http://jayapurakota.go.id/berita404/bentangkan-bendera-merah-putih-raksasa-walikota-pastikan-papua-adalah-bagian-dari-nkri.html?1508757024>

37. A Faizal, "Tolak Kibarkan Merah Putih, Mahasiswa Papua dan Warga Bentrok di Surabaya", 15 Agustus 2018, <https://regional.kompas.com/read/2018/08/15/18385041/tolak-kibarkan-merah-putih-mahasiswa-papua-dan-warga-bentro-k-di-surabaya>



Nabire, 20 August 2019

FRI-WP, kelompok orang Indonesia yang mendukung hak orang West Papua untuk menentukan nasibnya sendiri, pada akhir 2016. Kelompok milisi biasanya muncul dengan bendera Indonesia, terutama di pulau Jawa, Bali, dan Sulawesi. Ketika mereka melakukan aksi kekerasan, polisi biasanya hanya berdiri menonton atau malah menangkap mahasiswa West Papua yang diserang.

Strategi ini digunakan polisi untuk mengaburkan perannya dalam melakukan pelanggaran kebebasan berkumpul dan berserikat, dan untuk melawan narasi bahwa orang Indonesia mendukung hak menentukan nasib sendiri West Papua. Namun, tetap saja, kegagalan dalam melindungi demonstrasi damai dari aksi tandingan adalah salah satu bentuk pelanggaran atas kebebasan berbicara dan berkumpul.

Tahun lalu, taktik dan perlakuan buruk ini akhirnya menjadi bumerang dan menjadi pemicu lahirnya Gerakan Melawan. Negara juga tampaknya sadar, sehingga sepanjang Gerakan Melawan berlangsung, aksi tandingan dari ormas reaksioner di luar West Papua hanya terjadi sekali, yakni di Bandung, Jawa Barat. Sejak itu, ormas reaksioner mulai muncul lagi di berbagai aksi tandingan, walau tidak terlalu sering.

Meski tidak banyak, kelompok milisi pro Indonesia yang serupa juga ada di dalam West Papua. Misalnya, Paguyuban Nusantara dan Barisan Merah Putih (lihat Bab 1). Sebelum Gerakan Melawan, peran mereka biasanya adalah membuat pernyataan publik yang mempromosikan nasionalisme Indonesia. Sebagian kecil anggotanya adalah orang West Papua, yang digunakan oleh Indonesia sebagai taktik 'pecah belah dan kuasai'. Ketika Gerakan Melawan meletus, ada bukti bahwa kelompok milisi tersebut, juga milisi lainnya, menyerang orang West Papua dengan kekerasan. Dalam putusan yang menghukum para pembunuh Evertin Mofu di Jayapura (lihat Lampiran 3), terungkap bahwa Paguyuban Nusantara memobilisasi warga pendatang untuk menyerang demonstran West Papua.

Menggunakan milisi sipil untuk melawan aksi protes orang West Papua memperburuk konflik, bukan hanya karena berpotensi menciptakan konflik horizontal antar masyarakat setempat, tapi juga mendorong orang West Papua semakin jauh dari Indonesia serta memperdalam kebencian dan kemarahan mereka. Banyak mahasiswa West Papua yang memberitahu penulis bahwa mereka lebih memilih untuk melawan tentara Indonesia di hutan, bersama dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), daripada harus melawan milisi sipil. Hal serupa pernah diungkapkan beberapa aktivis nir kekerasan lainnya, yang merasa tidak ada ruang untuk aksi protes damai di jalan-jalan kota; mereka merasa tercekik oleh konflik terbuka.

Selain faktor-faktor tersebut, keengganan Pemerintah Indonesia untuk menangani akar penyebab konflik, terutama sejarah integrasi West Papua ke Indonesia yang diperdebatkan, adalah bom waktu utama yang meledak menjadi Gerakan Melawan.

Indonesia Rasis Terhadap Rakyat West Papua

Pemerintah Indonesia sedang membuat bom waktu lain, yang akan meledak suatu saat nanti. Pemerintah mengabaikan Gerakan Melawan ketika pemerintah seharusnya mengatasi masalah rasisme secara serius.



Timika, 21 August 2019

Perlu dicatat bahwa tidak seorang pun dalam tubuh pemerintahan, dan hanya beberapa di kalangan masyarakat sipil, yang bereaksi saat mahasiswa West Papua di Jawa dipersekusi selama empat hari berturut-turut. Orang-orang Indonesia baru mulai bereaksi hanya saat rakyat West Papua membakar kota-kota mereka.

Sementara, rakyat West Papua sangat marah pada tentara yang meneriakkan kata 'Monyet', dan pada polisi yang secara tidak proporsional melepaskan tembakan dan gas air mata ke dalam asrama, menyerang mahasiswa yang dikepung.

Hanya satu tentara yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan militer, hanya atas dasar indisipliner, bukan karena ujaran kebencian. Ia hanya dijatuhi hukuman percobaan dua bulan, artinya ia bahkan tidak harus masuk bui. Empat tentara lainnya hanya diskors untuk jangka waktu yang tidak jelas. Tidak ada satu pun polisi yang dihukum atas penggunaan kekuatan berlebihan terhadap para mahasiswa yang tidak bersenjata.

Dalam rangka menutupi kesalahan militer dan polisi, warga sipil kemudian dikorbankan, tindakan yang malah membuktikan lebih jauh betapa rasisnya Indonesia terhadap orang West Papua. Warga sipil rasis ini dijatuhi hukuman lima, tujuh, dan sepuluh bulan penjara: lebih ringan daripada hukuman yang dijatuhkan kepada para korban rasisme itu sendiri — orang-orang West Papua.

Alih-alih menghukum para pelaku rasisme secara layak, otoritas Indonesia malah memburu orang-orang West Papua, menangkap lebih dari seribu orang dan menetapkan lebih dari seratus orang sebagai tersangka selama periode Gerakan Melawan. Pesan yang disampaikan Indonesia adalah bahwa orang West Papua tidak diperbolehkan bangkit membela martabat mereka sendiri ketika dilecehkan secara rasial.

Pemerintah Indonesia, yang antara tidak kompeten atau tidak mau menangani konflik, mencari kambing hitam dari Gerakan Melawan. Kebebasan pers dan para pembela HAM diserang secara sistematis. Kapolri menyalahkan tiga kelompok pro referendum, dengan alasan bahwa kerusuhan yang terjadi sengaja dibuat untuk mendapat perhatian komunitas internasional dalam pertemuan Majelis Umum PBB akhir September 2019.

Bertolak belakang dari klaim Pemerintah Indonesia, aktivis pro-kemerdekaan justru mengampanyekan aksi damai. Bagi para aktivis pro-kemerdekaan itu, jika keadaan berubah menjadi kerusuhan, Pemerintah Indonesia justru jadi mendapat pembenaran untuk memiliterisasi situasi dan menumpas aksi protes. Ketika konflik horizontal meletus di Jayapura, para aktivis pro referendum berkampanye keras untuk meyakinkan orang-orang agar tidak terlibat benturan dengan milisi, mereka menyebut bentrokan dengan milisi sipil sebagai skenario yang dibuat pemerintah untuk mengalihkan fokus dari seruan utama mereka, yakni referendum kemerdekaan. Mereka menegaskan kembali bahwa yang mereka perangi dan lawan adalah sistem kolonial Indonesia, bukan orang Indonesia. Alhasil, di Jayapura, meski tiga warga West Papua tewas dan puluhan luka-luka akibat penusukan, tak ada satu pun warga pendatang yang tewas akibat diserang warga asli West Papua.

Hal tersebut konsisten dengan taktik gerakan perjuangan untuk hak menentukan nasib sendiri West Papua. Sayap non-bersenjata secara sadar memilih taktik damai untuk menarik perhatian internasional dan sangat disiplin untuk itu. Para mahasiswa di Jawa, misalnya, selalu dalam posisi defensif ketika diprovokasi milisi reaksioner sayap kanan. Mereka sadar bahwa Indonesia yang rasis akan menggambarkan mereka lebih "seperti binatang" lagi jika mereka jatuh ke dalam jebakan



TOTAL DURASI VONIS

Orang West Papua 110 Tahun
2 Bulan
12 Hari

Orang Indonesia 9 Tahun
8 Bulan

JUMLAH INDIVIDU

Orang West Papua 122
Orang Indonesia 7

ORANG WEST PAPUA YANG DIPENJARA

1.	Ariana Elopere	9 Bulan	47.	Terianus Madlama	3 Bulan 14 Hari	93.	Falerio Yaas	6 Bulan
2.	Ambrosius Mulait	9 Bulan	48.	Nius Wenda	7 Bulan	94.	Yan Surumaja	6 Bulan
3.	Isay Wenda	9 Bulan	49.	Steven Baransano	11 Bulan	95.	Lanti Nipsan	6 Bulan
4.	Carles Kossay	9 Bulan	50.	Thereslin Werfete	8 Bulan	96.	Willem Walilo	6 Bulan
5.	Dano Tabuni	9 Bulan	51.	Alex Pakage	6 Bulan 22 Hari	97.	Mikael Hitapok	6 Bulan
6.	Suryanta Ginting	9 Bulan	52.	Stefanus Goo	6 Bulan 22 Hari	98.	Donny Itlay	7 Bulan
7.	Erik Aliknoe	9 Bulan	53.	Simon Ukago	6 Bulan 22 Hari	99.	Maya Kamarigi	7 Bulan
8.	Pende Mirin	9 Bulan	54.	Melianus Mote	6 Bulan 22 Hari	100.	Pelles Yigibalom	7 Bulan
9.	Yunus Aliknoe	9 Bulan	55.	Juven Pekel	6 Bulan 22 Hari	101.	Abraham Dote	6 Bulan
10.	Sayang Mandabayan	9 Bulan	56.	Andreas Douw	6 Bulan 22 Hari	102.	Tenak Waker	7 Bulan
11.	Asa Asso	10 Bulan	57.	Stevanus Pigai	5 Bulan 22 Hari	103.	Jimbrif Kogoya	7 Bulan
12.	Agus Kossay	11 Bulan	58.	Mikael Bukega	5 Bulan 22 Hari	104.	Abua Yikwa	1 Tahun
13.	Buchtar Tabuni	11 Bulan	59.	Yos Iyai	5 Bulan 22 Hari	105.	Yogi Wenda	7 Bulan
14.	Alexander Gobay	10 Bulan	60.	Steven Kolbur	7 Bulan	106.	Alpon Meku	7 Bulan
15.	Ferry Gombo	10 Bulan	61.	Derek Aronggear	1 Tahun	107.	Bedira Tabuni	7 Bulan
16.	Steven Itlay	11 Bulan	62.	Martinius Asmuruf	1 Tahun	108.	Elimus Bayage	7 Bulan
17.	Hengki Hilapok	10 Bulan	63.	Mais Wiay	1 Tahun	109.	Yandu Kogoya	1 Tahun
18.	Irwanus Uropmabin	10 Bulan	64.	Rocky Dimara	10 Bulan	110.	Biko Kogoya	7 Bulan
19.	Rianto Ruruk	8 Bulan 15 Hari	65.	Jafar Marife	1 Tahun	111.	Rudi Komber	1 Tahun 5 Bulan
20.	Yoseph Syufi	8 Bulan 15 Hari	66.	Yusup Wairara	1 Tahun	112.	Jhon Assem	1 Tahun 4 Bulan
21.	Manase Baho	8 Bulan 15 Hari	67.	Billy Wairara	1 Tahun 10 Bulan	113.	Paskalis Tutuop	1 Tahun 4 Bulan
22.	Miwak Kareth	8 Bulan 15 Hari	68.	Gotlief Baransano	6 Bulan 20 Hari	114.	Iginansus Hukhukmana	1 Tahun 4 Bulan
23.	PH	4 Bulan	69.	Irtan Iwanggin	6 Bulan 20 Hari	115.	Marius Asso	10 Bulan
24.	Albun	8 Bulan	70.	Freudi Marlar	10 Bulan	116.	Oplanus Majage	10 Bulan
25.	Daud Matuan	8 Bulan	71.	Yance Songgreri	10 Bulan	117.	Septianus Malaseme	10 Bulan
26.	Elieser Siep	8 Bulan	72.	Lois Bosway	5 Bulan	118.	Hermia Elopere	10 Bulan
27.	Ricky Wanimbo	9 Bulan	73.	Oktovianus Hisage	6 Bulan	119.	Johanis Fetari	6 Bulan 15 Hari
28.	Natius Tabuni	9 Bulan	74.	Yosam Wenda	6 Bulan	120.	Renaldo Mirino	6 Bulan 15 Hari
29.	Pilatus Pahabol	9 Bulan	75.	Yoda Tabuni	6 Bulan	121.	Branto Babere	6 Bulan 15 Hari
30.	Jawa Wetiyo	1 Tahun 2 Bulan	76.	Dorty Kawena	6 Bulan	122.	Marthen Kewoy	6 Bulan 15 Hari
31.	Teresta Iyaba	6 Tahun	77.	Parra Wenda	6 Bulan			
32.	Narius Wenda	10 Tahun	78.	Ferlus Entama	6 Bulan			
33.	Samuel Kurisi	2 Tahun	79.	Yali Loho	6 Bulan			
34.	Kanilus Doga	2 Tahun	80.	Agustinus Mohl	6 Bulan			
35.	Yohanes Payage	1 Tahun 6 Bulan	81.	Ronal Wandik	6 Bulan			
36.	Luky Elopere	1 Tahun 6 Bulan	82.	Yusuf Moai	6 Bulan			
37.	Manu Alua	2 Tahun	83.	Jony Weya	6 Bulan			
38.	Sonni Yando	3 Tahun	84.	Persiapan Kogoya	6 Bulan			
39.	Randis Lokbere	1 Tahun 3 Bulan	85.	Mikha Asso	6 Bulan			
40.	Carlos Asemki	1 Tahun 2 Bulan	86.	Elo Hubi	6 Bulan			
41.	Yoni Maliyo	1 Tahun 2 Bulan	87.	Ary Asso	6 Bulan			
42.	Hermanto Nabyal	1 Tahun 2 Bulan	88.	Ruvinus Tambonop	6 Bulan			
43.	Keus Balyo	1 Tahun 2 Bulan	89.	Venus Dogopia	6 Bulan			
44.	Yosmin Duyala	1 Tahun 2 Bulan	90.	Dolvius Hisage	6 Bulan			
45.	Yenus Deal	1 Tahun 2 Bulan	91.	Piter Meraudje	6 Bulan			
46.	Riko Wariensi	7 Bulan	92.	Yorgen Albui	6 Bulan			

ORANG INDONESIA YANG DIPENJARA

MILITARY	0
POLICE	0
Syamsul Arifin	5 Bulan
Tri Susanti	7 Bulan
Andria Adiansyah	10 Bulan
Nasrul	3 Tahun
Irwani	3 Tahun
AI	11 Bulan
MGR	11 Bulan

itu. Dalam situasi dimana mereka tahu bahwa kemungkinan besar mereka akan diserang milisi reaksioner, mahasiswa yang dikenal mudah terprovokasi dilarang untuk ikut aksi demonstrasi. Dalam beberapa situasi, mereka tentu perlu membela diri, demi martabat serta keselamatan diri mereka.

Pandangan bahwa tidak mungkin ratusan ribu orang bangkit kecuali mereka diprovokasi oleh orang-orang tertentu, mencerminkan rasisme itu sendiri. Fenomena yang terjadi pada Gerakan Melawan adalah yang disebut sebagai 'kekuatan rakyat' (*people power*).

Rakyat West Papua dengan cepat menyadari mengapa Kapolri mengumumkan bahwa lebih dari separuh orang yang tewas dalam kerusuhan Wamena adalah warga pendatang. Sebab respon selanjutnya akan lain. Berbeda dari insiden di Deiyai yang korbannya adalah orang West Papua, kerusuhan Wamena menjadi tajuk utama semua berita nasional. Saluran donasi dibuka di seluruh Indonesia, bantuan mengalir masuk, pesawat evakuasi disediakan oleh TNI, tempat penampungan banyak didirikan, dan sarana pemulihan trauma disediakan. Dukungan semacam itu tidak pernah diberlakukan untuk orang-orang Nduga, yang telah mengungsi sejak akhir 2018.

Bom waktu yang tengah berjalan ini sangat mudah meledak. Ketika jaksa menuntut hukuman ekstrem hingga tujuh belas tahun terhadap tujuh tahanan politik West Papua di Balikpapan, Juni 2020, banyak orang West Papua kembali mengubah profil media sosial mereka menjadi gambar 'monyet' lagi, fenomena yang sama yang menandai dimulainya Gerakan Melawan setahun sebelumnya.

Jakarta menyadari kemarahan yang kembali menyeruak ini, didukung munculnya gerakan Papuan Lives Matter di seluruh pelosok tanah air. 'The Balikpapan Seven' masing-masing dijatuhi hukuman kurang dari satu tahun penjara. Menurut hukum Indonesia, jaksa penuntut harus mengajukan banding karena putusan yang diberi hakim jauh lebih rendah dari yang mereka tuntutan. Fakta bahwa jaksa pada akhirnya tidak melakukan banding, menyiratkan adanya intervensi politik.

Meskipun demikian, putusan tersebut masih mencerminkan rasisme. Betapa pun lemahnya dakwaan dan bukti yang disodorkan, orang West Papua tetap harus dinyatakan bersalah oleh pengadilan Indonesia—terutama mereka yang didakwa dengan pasal makar. Pengadilan Indonesia tidak sedang menguji kejahatan apapun, namun tengah menguji hati nurani orang West Papua. Sepanjang persidangan, sebagian besar pertanyaan hanya berkisar pada siapa yang meneriakkan 'Papua Merdeka', siapa yang memimpin rapat persiapan aksi, dan siapa yang membawa bendera Bintang Kejora. Daftar barang bukti makar yang dikutip oleh pengadilan ialah barang sehari-hari seperti kalkulator, gantungan kunci, ikat pinggang, *charger* ponsel, lampu dekorasi, gulungan kabel, dan *speaker* bluetooth.

Fakta bahwa setidaknya 2.000 mahasiswa West Papua yang 'eksodus' menolak melanjutkan studi di Indonesia dan memilih bertahan di tanah air mereka, menunggu dikuliahkan di kawasan Pasifik, mengindikasikan bahwa bara masih menyala.

Pelanggaran HAM Selama Gerakan Melawan

Pemadaman internet yang diberlakukan selama Gerakan Melawan merupakan pelanggaran terhadap hak atas kebebasan berekspresi dan hak atas informasi. Tindakan ini juga melanggar hak atas rasa aman masyarakat West Papua karena telah memperparah trauma. Tidak dapat berkomunikasi satu sama lain adalah satu hal, namun dibiarkan dalam kegelapan, bertanya-tanya apakah pemadaman ini berarti tiba waktunya mereka akan dibantai, adalah efek paling traumatis yang muncul selama pemadaman. Sebagai tambahan, Dekai, misalnya, menjadi seperti kota hantu dan anak-anak tidak bersekolah hingga berminggu-minggu karena masyarakat tidak dapat memverifikasi apakah rumor yang sedang beredar itu benar. Seandainya jaringan komunikasi berjalan normal, situasinya tentu bisa lebih cepat pulih.

Penembakan di Deiyai pada 28 Agustus 2019 kemungkinan besar merupakan pelanggaran HAM

berat. Dari rekaman yang ada, polisi dan tentara menembaki kerumunan warga sipil tanpa pandang bulu dan secara berlebihan, bahkan seorang anak berusia 12 tahun turut tertembak.

Pengepungan rumah sakit yang dilakukan oleh polisi dan tentara sesuai terjadinya tiap insiden menyebabkan banyak orang West Papua enggan untuk mencari perawatan akibat trauma. Dalam peristiwa Deiyai pada 28 Agustus 2019, misalnya, tiga kematian mungkin saja bisa dicegah jika para korban tidak takut berobat setelah lolos dari lokasi insiden. Tidak hanya hak atas kesehatan, namun hak atas hidup mereka juga telah dilanggar. Selain itu, penangkapan terhadap empat belas orang tertembak yang masih sedang dalam perawatan di rumah sakit, lagi-lagi merupakan pelanggaran terhadap hak atas kesehatan. Pola intimidasi seperti ini juga berdampak pada para pembela HAM karena menghambat advokasi dan pemantauan pelanggaran HAM.

Pemerintah Indonesia juga melanggar hak atas kebebasan berekspresi dan berkumpul para tahanan politik ketika menahan mereka secara sewenang-wenang. Fakta bahwa tahanan politik West Papua terus dipenjara selama pandemi COVID-19 juga telah melanggar hak atas kesehatan para tahanan.

Sebanyak 30 orang West Papua tewas karena luka tembak selama Gerakan Melawan berlangsung. Ini menunjukkan bahwa mereka dibunuh oleh aparat keamanan Indonesia, dan bahwa telah terjadi penanganan yang tidak proporsional terhadap para demonstran West Papua, sehingga mengakibatkan pelanggaran terhadap hak atas hidup mereka.

Investigasi independen terhadap pembunuhan warga sipil di Deiyai, 28 Agustus 2019, serta di Wamena dan Jayapura, 23 September 2019, penting dilakukan. Mayoritas orang West Papua tidak lagi percaya pada sistem peradilan Indonesia. Dengan mengizinkan tim independen—terutama tim independen internasional sebagaimana dikehendaki rakyat West Papua—untuk menyelidiki kasus-kasus pelanggaran HAM tersebut, bisa memberikan rasa keadilan dan martabat kepada rakyat West Papua.

Gerakan Yang Semakin Menguat

Rasisme di West Papua tidak hanya memicu perlawanan, tapi juga membangkitkan rasa *negritude* di antara orang West Papua. Banyak yang mengaku bahwa Gerakan Melawan telah mengingatkan mereka supaya seharusnya bangga dengan identitas mereka. Peristiwa tersebut juga membuat banyak yang makin yakin bahwa tidak ada harapan bila tetap berada di bawah kekuasaan Indonesia yang rasis.

Para tahanan politik 'the Balikpapan Seven' dipindahkan dari West Papua ke Provinsi Kalimantan Timur supaya mereka terpisah dari keluarga, teman, dan komunitasnya. Namun langkah Pemerintah Indonesia ini, secara tidak sengaja justru menumbuhkan solidaritas terhadap orang West Papua dari banyak orang Indonesia di Kalimantan, wilayah yang jumlah anggota FRI-WP, kelompok orang Indonesia yang mendukung perjuangan West Papua, baru beberapa orang. Kalimantan merupakan satu-satunya wilayah luas di Indonesia, yang tampaknya tidak turut melakukan demonstrasi anti-rasisme ketika Gerakan Melawan, tapi berbagai aksi solidaritas untuk West Faktor penting yang memperkuat gerakan adalah gerakan



2020 setelah jaksa penuntut umum, di tengah puncak gerakan *Black Lives Matter* tingkat global, menuntut para tahanan politik makar Gerakan Melawan hingga tujuh belas tahun penjara.

Video pendek yang berisi permohonan dari salah satu tahanan politik 'the Balikpapan Seven', yaitu pimpinan badan mahasiswa Ferry Gombo, viral di media sosial. Banyak mahasiswa Indonesia jadi tahu kasus ini serta menyatakan simpati dan dukungan. Dua minggu seterusnya menjelang putusan dibacakan, muncul aksi solidaritas dari rakyat Indonesia dalam jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya, terutama dari gerakan mahasiswa. Setidaknya ada 36 badan mahasiswa di seluruh Indonesia, termasuk provinsi paling barat, Aceh, menyatakan dukungan terbuka untuk pembebasan 'the Balikpapan Seven' dan *Papuan Lives Matter*. Berbagai webinar membahas rasisme yang diprakarsai orang-orang Indonesia berlangsung tiap harinya sepanjang Juni dan Juli.

Di Balikpapan, puluhan mahasiswa Indonesia dalam aksi protesnya berjalan melintasi kota ke PN Balikpapan selama tiga hari berturut-turut menjelang putusan dibacakan. Di halaman depan pengadilan, pada satu waktu, mereka berlutut dan meminta maaf kepada 'the Balikpapan Seven'. Juru bicara mereka berkata, "Kami tidak tahu lagi harus berbuat apa," sambil menangis. Pada hari putusan dibacakan, lebih dari tiga puluh mahasiswa Indonesia datang lebih awal sebelum sidang dimulai. Umat Islam dan Nasrani berdoa bersama di halaman depan. Mereka tetap berada di pengadilan sampai ketujuh sidang selesai pada sore hari. Demonstrasi solidaritas dari mahasiswa Indonesia juga terjadi di Samarinda (Kalimantan Timur) dan Tarakan (Kalimantan Utara), kota-kota yang sebelumnya belum pernah ada demonstrasi dengan isu West Papua.

Gerakan *Papuan Lives Matter* telah menyulut perbincangan di antara orang-orang Indonesia tentang West Papua dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Banyak yang karenanya menjadi kenal dengan masalah-masalah di West Papua, serta secara aktif mempelajari dan mendiskusikannya. Hal ini semoga berarti Pemerintah Indonesia tidak lagi dapat melakukan tindakan sewenang-wenang tanpa memperhitungkan konsekuensinya, sebab sudah semakin banyak rakyatnya yang akan mempertanyakan. Kesadaran bahwa selama ini Indonesia sedang menjajah West Papua sudah semakin meluas di kalangan masyarakat Indonesia.

Luka yang ada begitu dalam, hingga pada peringatan setahun Gerakan Melawan, banyak orang West Papua yang memperingati 17 Agustus 2020 sebagai Hari Anti-Rasisme Nasional West Papua. Indonesia selama ini terobsesi untuk membuat rakyat West Papua merayakan Hari Kemerdekaan RI, tapi ironisnya rakyat West Papua akan selalu mengenang kembali luka akibat rasisme ini pada hari yang dimaksud.





LAMPIRAN 1

PEMILU

Pemicu Gerakan West Papua Melawan 2019 adalah serangkaian insiden rasisme terhadap mahasiswa West Papua di sejumlah kota di Jawa. Insiden pertama terjadi di Malang pada 15 Agustus. Insiden yang dampaknya paling signifikan terjadi di Surabaya pada 16-17 Agustus, kemudian diperparah insiden di Semarang pada 18 Agustus.

Sejumlah detail peristiwa di Surabaya diperoleh dari korespondensi eksklusif antara penulis dan mahasiswa West Papua. Untuk laporan ini, mereka telah bersedia mengesampingkan kerahasiaan.

15 Agustus 2019

Untuk memperingati New York Agreement—perjanjian antara Belanda dan Indonesia tahun 1962 yang menjadi dasar pelaksanaan PEPERA (Penentuan Pendapat Rakyat) yang penuh kepalsuan—aksi-aksi protes digelar secara damai di sejumlah kota, baik di Indonesia maupun di West Papua. Aksi-aksi ini berujung penangkapan massal, pembubaran paksa, dan tindakan sewenang-wenang oleh aparat keamanan. Di Indonesia, aksi-aksi dipimpin Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) dan Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP). Sedangkan di West Papua, aksi dipimpin oleh United Liberation Movement for West Papua (ULMWP).

Demonstrasi damai di enam kota di Indonesia disertai persekusi rasis dari kelompok-kelompok ultranasionalis dan aparat keamanan. Namun, pemicu Gerakan Melawan adalah insiden di Malang yang diperburuk oleh pernyataan rasis Wakil Walikota Malang.

Malang, Provinsi Jawa Timur

Lima puluh enam demonstran yang terdiri dari mahasiswa West Papua dan Indonesia diserang secara fisik oleh organisasi masyarakat (ormas) ultranasionalis dan polisi, di bawah pengawasan tentara, sebelum akhirnya dibubarkan secara paksa dan dipindahkan dari titik aksi. Peserta aksi ditendang, dilempari batu dan air rica-rica, dipukul dengan helm, dan dilecehkan dengan makian rasis. Tiga belas orang di antara mereka sempat ditangkap polisi.

Dua puluh dua demonstran luka-luka: Pinel Gwijangge (22), Awi Pahabol (22), Lambentus Woge (24), Warinus Wilil (23), Harminus Loho (20), Pilatus Yusuf (19), Alseno Gwijangge (18), Timinus Gwijangge (21), Nikson Penggu (22), Yulianus Hilapok (19), Daniel Kadepa (23), Jeksen (22), Melki Elopere (17), Melky Huby (23), Anandi

Gwijangge (20), Barto Gwijangge (21), Opran Gombo (18), Ferry Takimai (21), Alex Wonda (20), Erince Penggu (21), Dani Nawipa (24), Jackson Degei (23).

Pada hari yang sama, Wakil Walikota Malang mengemukakan opsi memulangkan mahasiswa West Papua dari kota Malang karena, menurutnya, bentrokan dan demonstrasi yang menjurus makar tidak diizinkan di wilayahnya.³⁸ Walikota baru menyampaikan permintaan maaf dan menyatakan bahwa Pemerintah Kota Malang tidak mungkin akan punya kebijakan seperti itu, ketika gejala protes meledak di West Papua empat hari setelahnya—hari pertama Gerakan Melawan.³⁹

Sentani – Jayapura, Provinsi Papua

Masyarakat West Papua mendemonstrasikan dukungan dan harapan mereka agar isu West Papua dibahas dalam pertemuan pemimpin Pacific Islands Forum (PIF) yang sedang digelar pada minggu itu.

Dalam satu hari, tercatat ada 106 orang asli West Papua yang ditangkap karena aksi tersebut.

38. N. Ratri, "Wakil Wali Kota Malang Munculkan Opsi Pemulangan Mahasiswa Papua Pasca-Kericuhan", 15 Agustus 2019 <https://www.malangtimes.com/baca/42830/20190815/125400/wakil-wali-kota-malang-munculkan-opsi-pemulangan-mahasiswa-papua-pasca-kericuhan>

39. Z. Arifin, "Wali Kota Malang Minta Maaf Soal Mahasiswa Papua", 19 Agustus 2019 <https://www.liputan6.com/regional/read/4041566/wali-kota-malang-minta-maaf-soal-mahasiswa-papua>

Ternate, Provinsi Maluku Utara

Enam belas mahasiswa West Papua dan Indonesia dipukuli dan sempat ditangkap polisi selama beberapa jam. Mereka baru dibebaskan jam 19.30 WIT. Seorang mahasiswa Indonesia harus dilarikan ke rumah sakit karena asmanya kambuh saat dipukuli hingga tidak sadarkan diri.



Sula, Provinsi Maluku Utara

Seorang mahasiswa Indonesia ditahan polisi selama beberapa jam saat ia dan kawan-kawannya membagikan selebaran tentang New York Agreement. Ia baru dibebaskan setelah dipaksa menandatangani surat pernyataan bahwa ia tidak akan lagi berpartisipasi dalam gerakan solidaritas West Papua.



Ambon, Provinsi Maluku

Sebelas mahasiswa Indonesia dan West Papua ditangkap dan ditahan di kantor polisi setelah demonstrasi mereka dibubarkan paksa.

Bandung, West Java Province

Sekitar 25 peserta demonstrasi peringatan New York Agreement terpaksa pindah tempat aksi karena diintimidasi ratusan anggota ormas ultranasionalis dan Polisi.

(Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Malang)

16 Agustus 2019

Surabaya, Provinsi Jawa Timur

Sekitar jam 15.00 WIB, lima belas tentara berseragam formal dan berpakaian sipil mendatangi Asrama Kamasan III, yang saat itu ditempati lima belas mahasiswa West Papua. Tentara itu menggedor gerbang serta merusak fiber dan spanduk di pagar asrama sambil berteriak, *"Siapa yang buang bendera (Merah Putih) di selokan?! Siapa yang buang?"* Penghuni asrama bingung sebab mereka tidak tahu-menahu jika tiang bendera di luar asrama sudah rusak dan ada di selokan. Sebuah bendera Indonesia telah berkibar di depan asrama sejak beberapa hari sebelumnya, dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Bendera itu kemungkinan dipasang saat subuh sehingga penghuni asrama tidak tahu siapa yang memasangnya.

Para mahasiswa kaget saat mendengar tentara di luar berteriak, *"Hey, monyet, keluar! Monyet!"* Sebuah video rekaman kejadian tersebut akhirnya viral dan memicu Gerakan Melawan. Dalam beberapa hari berikutnya, 'Monyet' berubah menjadi simbol perlawanan.



Tangkapan layar dari rekaman tentara yang meneriakkan kata 'monyet' kepada mahasiswa di dalam asrama.

Sejam setelah insiden makian rasis dari tentara itu, ratusan orang dari berbagai ormas ultranasionalis dan milisi reaksioner sayap kanan berkumpul di depan asrama. Mahasiswa penghuni asrama tidak bisa lagi berada di halaman asrama karena akan langsung dilempari batu.

Sekitar jam 18.30 WIB, ratusan orang—termasuk anak-anak dan remaja—meneriakkan yel-yel, “*Usir, usir, usir Papua! Usir Papua sekarang juga!*” Ketika itu, mahasiswa di dalam asrama sudah mematikan lampu dan hanya menggunakan senter untuk pencahayaan seadanya. Kerumunan massa di luar mendiskusikan pembobolan pada jam 19.00 WIB. Empat puluh lima menit kemudian, orang-orang di luar berteriak, “Siap? Masuk ke dalam! Merdeka! Merdeka!”

Seorang pembela HAM—yang membaur di kerumunan untuk memantau situasi dari luar asrama—melaporkan bahwa jam 20.00 WIB polisi berusaha mengendalikan massa. Situasi kemudian perlahan mereda dan jumlah kerumunan berkurang. Pada saat ini semua berlangsung, para penghuni asrama mengamankan diri dengan berpindah ke lantai dua asrama. Namun, sejak jam 22.30 WIB jumlah massa yang berkerumun kembali bertambah. Beberapa bahkan datang dengan membawa gitar. Mereka menyanyikan lagu-lagu kebangsaan Indonesia sambil mengumpat pada mahasiswa West Papua.

Yogyakarta, Provinsi Yogyakarta

Pada malam hari, sejumlah mahasiswa West Papua menggelar aksi protes spontan di depan Polda Yogyakarta. Mereka menuntut agar persekusi yang tengah berlangsung di Surabaya segera diakhiri.

17 Agustus 2019 – Hari Kemerdekaan Indonesia

Surabaya, Provinsi Jawa Timur

Mahasiswa penghuni asrama telah kehabisan makanan dan air minum sejak siang sebelumnya. Akhir dari pengepungan asrama masih belum jelas. Pada malam hari, jumlah massa lebih sedikit dan tidak terlalu agresif lagi. Kelompok-kelompok solidaritas sepakat akan mengirim makanan dan minuman ke asrama. Namun, akan terlalu berbahaya jika orang Papua yang melakukannya, sehingga disepakati bahwa tugas itu akan dilakukan aktivis-aktivis Indonesia.

Lima belas menit lewat tengah malam, tiga mahasiswa Indonesia tiba membawa empat nasi kotak untuk mahasiswa West Papua yang terjebak di asrama. Mereka diteriaki saat mendekat ke asrama untuk menyerahkan makanan. Jam 01.40 WIB, dua mahasiswa Indonesia lain datang mengantar makanan dan air ke asrama. Skema pengiriman makanan sudah dirancang sedemikian rupa, bahwa bungkus makanan akan mereka kaitkan di sudut gerbang, lalu mereka akan langsung berjalan pergi.

Sayangnya, mereka ditarik oleh kerumunan massa. Mereka diinterogasi, dipukul, ditendang, kemudian dibawa ke kantor polisi. Salah seorang mahasiswa West Papua menangis akibat rasa bersalah ketika menyaksikan itu semua dari dalam asrama. Dua hari setelahnya, pada malam hari pertama Gerakan Melawan, Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) mengumumkan bahwa informasi terkait insiden ini yang disebar oleh penulis di media sosial adalah hoaks.⁴⁰ Tapi kemudian pihak kementerian meminta maaf karena telah membuat tuduhan yang keliru.

40.Kominfo, “[HOAKS] Polres Surabaya Menculik Dua Orang Pengantar Makanan untuk Mahasiswa Papua”, 19 Agustus 2019 https://www.kominfo.go.id/content/detail/20784/hoaks-polres-surabaya-menculik-dua-orang-pengantar-makanan-untuk-mahasiswa-papua/0/laporan_isu_hoaks

Setelah melalui perencanaan yang matang dan koordinasi dengan mahasiswa yang terperangkap di dalam, pada tengah hari, 27 mahasiswa West Papua dari asrama lain datang memberi dukungan, makanan, dan air minum. Mereka datang sekaligus dalam satu kelompok, jalan dengan cepat, sehingga kerumunan massa tidak sempat bereaksi. Gerbang asrama dibuka bagi mereka lalu segera kembali ditutup. Walau mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan atau apa yang akan terjadi selanjutnya, paling tidak, kini jumlah mereka bertambah untuk pertahanan diri (*self-defense*).

Perkembangan ini ternyata membuat kerumunan massa di luar asrama semakin bertambah. Polisi dan kerumunan meminta agar mahasiswa yang ada di dalam asrama menyerahkan diri. Mahasiswa di dalam tidak mengerti apa yang dikehendaki orang-orang di luar, bagaimana atau mengapa mereka mesti menyerahkan diri. Mereka berdiskusi di lantai dua dan sepakat untuk tidak menyerah pada kerumunan dan aparat sebab dirasa tidak masuk akal. Mereka merasa bahwa mereka tengah berada di honai (rumah) mereka sendiri.

Sekitar jam tiga sore, mahasiswa-mahasiswa itu baru saja sepakat untuk mengoper telepon seluler mereka ke polisi, agar pengacara mereka (penulis) bisa bicara dengan polisi, meminta penjelasan apa yang dimaksud dengan “menyerah”. Tapi tiba-tiba terdengar suara tembakan. “*Sekarang apa yang harus kita lakukan? Yesus! Dong (mereka) ada tembaki kita!*” teriak seorang mahasiswa, yang dijawab penulis, “*Jangan lawan balik. Ikuti polisi.*” Itulah pesan yang mahasiswa itu teriakkan pada mahasiswa lain yang kepanikan.

Mahasiswa ini tetap menyalakan sambungan telepon sehingga penulis bisa mendengar apa yang para mahasiswa itu tengah hadapi.

Tak lama kemudian terdengar seorang pria beraksen Jawa berteriak, “*Tiarap! Jongkok!*” Para mahasiswa disuruh turun dari lantai dua dengan jalan jongkok lalu menuju truk polisi. Mereka diteriaki dan diumpat polisi selama proses ini berlangsung. Lima mahasiswa mengalami luka: empat karena pukulan polisi, sedangkan yang satu lagi luka di bagian kaki karena terkena cangkang gas air mata.

CNN Indonesia melaporkan, total ada 23 tembakan—termasuk tembakan gas air mata—yang diarahkan ke asrama.⁴¹ Perlakuan yang tidak proporsional ini dilakukan terhadap mahasiswa yang kelaparan, haus, dan kelelahan, yang telah dikepung selama lebih dari 24 jam.

Saat 43 mahasiswa West Papua itu ditangkap dan dibawa ke Polrestabes Surabaya untuk diinvestigasi masalah bendera, polisi menggeledah asrama. Diketahui kemudian bahwa polisi merusak sejumlah bagian asrama seperti jendela dan pintu.

Pasca dibebaskan pada tengah malam, mahasiswa West Papua terpaksa tidur di halaman depan karena di dalam asrama masih menyengat bau gas air mata. Bau tidak sedap itu bertahan hingga hampir satu bulan lamanya dan selama itu pula para mahasiswa tidur di luar. Di beberapa ruangan yang ventilasinya kurang baik, bau gas masih tercium sampai Desember 2019.

Keesokan hari setelah penangkapan tersebut, aparat memasang dua CCTV yang mengarah ke asrama. Pada 9 September 2019, saat para mahasiswa masih tidur di luar asrama, dua kantong berisi ular dilempar oleh orang tidak dikenal.

41. CNN Indonesia, “Polisi Tangkap 43 Mahasiswa dari Asrama Papua di Surabaya”, 17 Agustus 2019. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190817181215-20-422304/polisi-tangkap-43-mahasiswa-dari-asrama-papua-di-surabaya>

Aparat kepolisian
bersenjata lengkap
melakukan aba-aba di
depan asrama.



Aparat kepolisian
bersenjata lengkap
memasuki halaman depan
asrama.



Para mahasiswa yang
berada di lantai dua asrama
mengangkat tangan.





Aliansi Mahasiswa Papua / foto-foto jendela dan pintu yang dirusak dan satu dari sejumlah mahasiswa yang terluka.

Jayapura, Provinsi Papua

Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menginisiasi aksi spontan yang diikuti puluhan orang West Papua. Fajar Gerakan Melawan tengah terbit. Foto seorang peserta aksi yang memegang poster bertulisan “*Kalau kami monyet, jangan paksa monyet kibarkan Merah Putih*”, menyebar luas di kalangan orang-orang Papua.



Komite Nasional Papua Barat

18 Agustus 2019

Semarang, Provinsi Jawa Tengah

Asrama mahasiswa West Papua di Semarang dikepung milisi sipil reaksioner bersama polisi dan tentara. Lurah setempat dan polisi meminta identitas para penghuni asrama walau mahasiswa itu sudah bersedia mengibarkan bendera Merah Putih.

Sebuah spanduk besar, sebagaimana ditunjukkan di bawah ini, telah terpasang di dekat asrama sejak 14 Agustus 2019. Spanduk itu berisi tulisan: *"Kami, warga Kelurahan Candi, tidak setuju asrama West Papua digunakan untuk kegiatan yang mengarah pemisahan Papua dari NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Jika hal tersebut di atas dilakukan, kami sepakat menolak keberadaan West Papua di Kelurahan Candi."*



Jayapura, Provinsi Papua

Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe mengeluarkan pernyataan pers atas serangan rasialis terhadap mahasiswa West Papua selama empat hari belakangan di Malang, Surabaya, dan Semarang.

EVOLUTION BECOMES REVOLUTION

" FIGHT BACK "

West Papua

Sejak saat ini, mayoritas masyarakat West Papua menggunakan gambar monyet dan kera sebagai foto profil media sosial mereka. Mereka menyebut diri sebagai 'Monyet' dalam berbagai poster dan ajakan protes. Dengan kata lain, makian rasis tersebut mereka ambil alih sebagai simbol perlawanan. Banyak orang Indonesia yang memberikan dukungan kepada West Papua di media sosial. Hal-hal ini menandai lahirnya Gerakan Melawan.



A person wearing a lion's head costume is sitting in the driver's seat of a car at night. The car's headlights are on, and the scene is illuminated by a warm, orange light, possibly from the headlights or a nearby fire. The background shows a building with vertical columns.

LAMPIRAN 2

**GERAKAN
MELAWAN**

Gerakan Melawan berlangsung selama periode 19 Agustus hingga 30 September 2019. Kronologi dari berbagai peristiwa di bawah ini dikompilasi dari laporan-laporan yang penulis terima dari sumber pertama, para pembela HAM, dan berita media. Insiden kematian, luka-luka, dan penangkapan masing-masing ditempatkan pada tanggal kejadian yang bersangkutan.

19 Agustus 2019

Ribuan orang West Papua turun ke jalan pada hari pertama Gerakan Melawan yang berlangsung di tujuh kota di West Papua dan dua kota di Indonesia (Bandung dan Makassar).⁴² Di Manokwari dan Sorong, protes disertai aksi kekerasan.



Aliansi Mahasiswa Papua/polisi di asrama mahasiswa di Jakarta

Sebagai upaya meredam kemarahan masyarakat West Papua—yang membuat Jayapura lumpuh serta Manokwari dan Sorong terbakar—Gubernur Provinsi Jawa Timur menyampaikan permintaan maaf pada masyarakat West Papua melalui televisi nasional dan menjamin bahwa mahasiswa West Papua di provinsinya tidak akan pernah diusir.⁴³ Gubernur Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat menangis saat mengomentari rasisme yang menimpa masyarakat West Papua. Namun, aparat keamanan tampak

42. O. Flash and A. Aibah 'USIR PAPUA ??? Oncho FLash X Andho Aibah (Music Video)', 19 Agustus 2019 <https://www.youtube.com/watch?v=Hj31-9vimbo>; Musisi West Papua turut berdemonstrasi dengan meluncurkan lagu dan video musik tentang persekusi di Surabaya dan rasa bangga mereka atas identitas Melanesia berkulit hitam, berjudul "Usir Papua??" Official DXH Crew Papua 'Cara Tara Bae - DXH Crew, 19 Agustus 2019 <https://www.youtube.com/watch?v=jLPwa8u4a8>. Musisi West Papua lainnya juga merilis lagu tentang persekusi di Surabaya. Riko Manutur x Laxzl x Rehza NS x Grld 'Tolak Rasisme - 14X21 ft. New Star (Riko Mntr x Laxzl x Rehza NS x Grld) Official Music Video', 19 Agustus 2019 https://www.youtube.com/watch?v=y6GtPq_s6Ks. Sebuah kelompok musik hip-hop dari Manado, Sulawesi Utara, turut membuat lagu tentang persekusi rasial dan Gerakan Melawan dengan judul "Tolak Rasisme",
43. BBC News Indonesia, 'Manokwari rusuh: Massa berangsur tinggalkan lokasi demonstrasi, para pejabat Jatim minta maaf', 19 August 2019 <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-49391778>. Walikota Surabaya dan Malang meminta maaf secara terbuka kepada masyarakat West Papua.
44. H. Kusuma 'Manokwari Rusuh, Jokowi: Saling Memaafkan, Pemerintah Jaga Papua-Papua Barat', 19 Agustus 2019 <https://news.detik.com/berita/d-4672151/manokwari-rusuh-jokowi-saling-memaafkan-pemerintah-jaga-papua-papua-barat> Kemenkopolhukam Wiranto memuji pejabat publik di Jawa atas permintaan maafnya dan mengecam pelaku kerusuhan. Presiden Indonesia melakukan konferensi pers, meminta para pihak minta maaf satu sama lain.



Gubenur Papua Barat
Domingus Mandacan



Gubernur Papua
Lukas Enembe

tidak menyesal dan tetap mengawasi beberapa asrama mahasiswa West Papua dengan cara yang mengusik. Polisi mendatangi asrama mahasiswa West Papua di Jakarta, Bogor (Provinsi Jawa Barat), dan Lombok (Provinsi Nusa Tenggara Barat), untuk mencegah para mahasiswa melakukan demonstrasi.

Tidak lama setelah aksi-aksi protes pecah di berbagai kota di West Papua, akses internet di West Papua mulai dibatasi untuk 'mencegah penyebaran hoaks'. Alih-alih mengadili para pelaku tindakan rasis di Jawa, polisi malah menarget akun-akun media sosial yang, menurut pihak kepolisian, "memprovokasi" kerusuhan.⁴⁵ Kemenkominfo mengumumkan bahwa twit penulis tentang dua orang Indonesia yang ditangkap di Surabaya setelah menyerahkan makanan pada mahasiswa West Papua yang terjebak di asrama, 17 Agustus 2019, sebagai hoaks.⁴⁶

45. R. Ayuningtyas, 'Polri Buru Penyebar Konten Rasis Pemicu Kerusuhan Manokwari', 19 Agustus 2019 <https://www.liputan6.com/news/read/4041247/polri-buru-penyebar-konten-rasis-pemicu-kerusuhan-manokwari>

46. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia '[HOAKS] Polres Surabaya Menculik Dua Orang Pengantar Makanan untuk Mahasiswa Papua', 19 Agustus 2019 https://www.kominfo.go.id/content/detail/20784/hoaks-polres-surabaya-menculik-dua-orang-pengantar-makanan-untuk-mahasiswa-papua/0/laporan_isu_hoaks



Kabarpapua / Litha

Manokwari, Provinsi Papua Barat

Di Manokwari, aksi protes dimulai sejak jam delapan pagi. Satu jam kemudian, kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat telah dibakar massa. Sebuah gerai mobil juga terbakar satu jam setelah kantor DPRD terbakar. Wakil Gubernur berpidato mengecam serangan rasis terhadap mahasiswa West Papua di Jawa. Saat protes berlangsung, puluhan demonstran sempat menyanyikan yel-yel *"Usir, usir, usir pendatang!"*, sebagai bentuk cemooh atas yel-yel *"Usir Papua"* yang dinyanyikan massa pengepung asrama mahasiswa West Papua di Jawa, 16 Agustus 2019. Para demonstran menebang sejumlah pohon dan membakar ban untuk memblokir jalan-jalan utama. Situasi berangsur-angsur reda pada sore hari. Sekelompok remaja membawa sebuah tiang dengan bendera Bintang Kejora sambil berlari mengitari kota. Di tempat lain, ribuan orang yang dipimpin mahasiswa melakukan aksi long march secara damai. Dua belas orang ditangkap dan diadili atas kejadian hari itu.

Sorong, Provinsi Papua Barat

Bandara Domine Eduard Osok dibakar dan kendaraan-kendaraan di parkirannya banyak yang rusak.⁴⁷ Sekitar 90% bagian gedung penjara kota terbakar. Banyak narapidana berkumpul di halaman depan, tetapi 258 orang lainnya melarikan diri. Lima belas bangunan, termasuk sebuah kantor polisi dan kantor DPRD, turut dibakar.⁴⁸ Jalan-jalan utama diblokir dengan pohon yang ditebang dan ban yang dibakar. Gas air mata dan meriam air digunakan polisi untuk membubarkan demonstran. Sebelas orang ditangkap karena diduga melakukan kerusuhan, proses hukum tujuh orang di antaranya berlanjut hingga ke pengadilan.



Bandara Domine Eduard Osok termasuk salah satu gedung yang dibakar

47. F. Pebrianto and J. Hantoro, 'Kronologi Kerusuhan di Manokwari dan Sorong, Papua Barat', 20 Agustus 2019 <https://nasional.tempo.co/read/1238032/kronologi-kerusuhan-di-manokwari-dan-sorong-papua-barat>

48. M. Arnani and R. E. A. Sartika, 'Kerusuhan di Papua, Apa yang Terjadi di Manokwari hingga Jayapura?', 29 Agustus 2019 <https://www.kompas.com/tren/read/2019/08/29/183000065/kerusuhan-di-papua-apa-yang-terjadi-di-manokwari-hingga-jayapura>



DPRD Sorong dibakar

Jayapura, Provinsi Papua

Ibu kota provinsi lumpuh saat ribuan orang dari berbagai penjuru turun ke jalan menuju kantor gubernur. Anggota DPRD Papua ikut bergabung dengan barisan massa, dan bendera Indonesia di halaman kantor gubernur diturunkan



Seorang demonstran mengenakan topeng 'monyet'



Tidak ada bendera Indonesia di tiang bendera halaman kantor Gubernur Papua



Merauke, Provinsi Papua

Ratusan demonstran dicegah polisi saat hendak memasuki kota.



Kaimana, Provinsi Papua Barat



Raja Ampat, Provinsi Papua Barat



Yapen, Provinsi Papua Barat

Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan

Di luar West Papua, ratusan mahasiswa West Papua dan Indonesia menggelar protes serupa. Pada malam harinya, milisi reaksioner sayap kanan mengepung asrama mahasiswa West Papua dan melemparinya dengan batu. Para mahasiswa juga diserang secara fisik hingga satu luka-luka. Polisi campur tangan dalam meredakan situasi.

20 Agustus 2019

Aksi-aksi protes meletus di tujuh kota di West Papua dan tiga kota di Indonesia, termasuk di Yogyakarta. Aksi protes berlangsung selama dua hari berturut-turut di empat kota: Kaimana, Yapen, Merauke, dan Makassar. Sedangkan, di Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat, aksi protes berujung ricuh. Ratusan polisi dan militer tambahan tiba di Manokwari pada malam harinya.

Di Surabaya, sejumlah mahasiswa West Papua diundang Walikota Surabaya ke sebuah acara. Salah seorang mahasiswa West Papua yang mengikuti pertemuan itu kemudian mengklarifikasi bahwa ia tidak termasuk dalam mahasiswa yang menjadi korban persekusi rasialis, dan mengaku bahwa mereka diberi informasi yang keliru tentang sifat dari pertemuan tersebut.

Di samping aksi protes jalanan, seniman-seniman West Papua terus menyumbang musik bagi Gerakan Melawan.⁴⁹

Merauke, Papua Province



49. Seorang seniman West Papua Mor M.A.C merilis sebuah lagu tentang Gerakan Melawan di YouTube dengan judul "I'm Monkey" (<https://www.youtube.com/watch?v=JWLDND-VwuQ&feature=share>).



Seorang warga dengan kursi roda dan anak-anak West Papua berpartisipasi dalam barisan protes



Seorang mama Papua menyampaikan orasi



Nabire, Provinsi Papua

Biak,
Provinsi
Papua



Yapen,
Provinsi
Papua Barat



Bintuni, Provinsi Papua Barat



Kaimana, Provinsi Papua Barat

Tampak dalam sebuah video, seorang mama West Papua yang sudah tua turut serta dalam aksi protes dengan duduk di bangku penumpang sepeda motor, menjelaskan tentang sejarah West Papua dan keinginannya untuk merdeka.

Dalam video lain, mama-mama Papua menangis saat memanjatkan doa, "Tolong bebaskan kami, karena kami tidak cocok hidup bersama orang lain."



Bengkulu,
Provinsi
Bengkulu



Makassar,
Provinsi
Sulawesi
Selatan



21 Agustus 2019

Gerakan Melawan berlanjut di enam kota di West Papua dan sebuah kota di Indonesia. Media memberitakan, 300 aparat militer dan 960 polisi tambahan telah dikirim ke West Papua.⁵⁰ Protes berakhir rusuh di Fakfak, tempat bendera Bintang Kejora dikibarkan, dan juga di Timika. Bintang Kejora juga berkibar di Sorong.

Kemenkominfo mengumumkan bahwa akses internet di West Papua diblokir “hingga situasi kembali normal”.⁵¹ Pada hari yang sama, Menkominfo meminta maaf karena telah melabeli twit penulis—tentang

50. T. Wibawa, 'West Papua protests continue despite Indonesian police claiming to have regained control', 21 Agustus 2019. <https://www.abc.net.au/news/2019-08-21/west-papua-protest-indonesian-military-police-clean-up/11433840>

51. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia 'Pemblokiran Layanan Data di Papua dan Papua Barat', 21 Agustus 2019. https://www.kominfo.go.id/content/detail/20821/siaran-pers-no-155hmkominfo082019-tentang-pemblokiran-layanan-data-di-papua-dan-papua-barat/0/siaran_pers



Spanduk dengan tulisan “Siapa pun yang datang, kami tolak” terpampang di depan gerbang asrama Kamasan, Surabaya.

dua mahasiswa Indonesia yang ditahan pada 17 Agustus saat menyerahkan makanan pada mahasiswa West Papua yang terkepung di asrama—sebagai hoaks.⁵²

Di Surabaya, mahasiswa korban pengepungan dan persekusi menolak menemui pihak mana pun, termasuk orang-orang West Papua yang bekerja bagi Pemerintah Indonesia – baik itu para gubernur, staf presiden, anggota DPR RI, atau walikota.⁵³

Di Yapen, polisi mengizinkan demonstrasi yang rencananya akan digelar keesokan harinya, dengan syarat tidak ada pawai dan berlangsung damai.

Majelis Rakyat Papua (MRP) menerbitkan pernyataan bahwa seluruh mahasiswa West Papua yang kuliah di luar West Papua disarankan pulang ke Bumi Cenderawasih karena masalah rasisme dan keamanan. Ribuan mahasiswa West Papua secara bertahap pulang ke tanah air mereka dalam beberapa pekan berikutnya.

Puluhan demonstran West Papua ditangkap, tapi belum ada pelaku persekusi rasialis di Jawa yang ditangkap.

52. C. M. Annur and D Setyowati, 'Kominfo Minta Maaf Atas Cap Disinformasi Cuitan Veronica Soal Papua', 21 Agustus 2019. <https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/5e9a5033a3878/kominfo-minta-maaf-atas-cap-disinformasi-cuitan-veronica-soal-papua>

53. Sementara itu, polisi di Makassar mendatangi asrama mahasiswa West Papua, mengajak mereka berdialog dengan pemerintah daerah. Mahasiswa tersebut juga menolak. Pada hari yang sama, AMP menjelaskan mengapa permintaan maaf dari Indonesia tidak akan cukup, dan mengapa hanya referendum penentuan nasib sendiri yang dapat mengakhiri rasisme.

Fakfak, Provinsi Papua Barat

Seorang pembela HAM melaporkan bahwa demonstran dari setiap penjuru kota bergerak menuju kantor Dewan Adat Papua (DAP) sejak jam 7 pagi. Mereka kemudian berjalan menuju Pasar Tumbruni dan membakarnya. Aparat gabungan datang dan membubarkan mereka menggunakan gas air mata. Dalam rekaman video tampak seorang peserta aksi berjalan tenang sambil membawa bendera Bintang Kejora berukuran raksasa di hadapan aparat keamanan Indonesia. Massa kemudian kembali ke kantor DAP dan di sana mereka mengibarkan bendera Bintang Kejora. Saat bupati dan anggota DPRD setempat tiba, demonstran menyatakan sikap mereka yaitu mengutuk rasisme dan meminta para pejabat untuk memulangkan orang-orang West Papua dari Jawa ke tanah air, begitu juga sebaliknya, memulangkan orang-orang Jawa dari West Papua. Pada satu titik, para demonstran mendesak agar para pejabat tersebut mencium bendera Bintang Kejora.



Bintang Kejora berkibar di kantor DAP

Setelah bupati dan anggota dewan meninggalkan kantor DAP, sekelompok milisi pro Indonesia, Barisan Merah Putih (BMP), mendatangi kantor DAP sambil membawa bendera-bendera Merah Putih. Demonstran nyaris menyerang mereka tapi polisi segera menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa. Ketika demonstran anti-rasisme terpecah, milisi yang membawa senjata tajam menyerang demonstran dan membakar kantor DAP sambil menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Polisi dan militer yang ada di lokasi kejadian hanya menonton tanpa ada upaya pencegahan. Rekaman video yang kemudian menyebar menunjukkan bahwa polisi dan tentara mengarahkan milisi bersenjata untuk mengejar demonstran West Papua.

Saat peristiwa ini terjadi, perut seorang demonstran West Papua berusia 19 tahun, MN, terkena tebasan senjata tajam hingga ususnya keluar. Saat ia hendak melarikan diri, terdengar rentetan tembakan dari polisi juga tentara, dan milisi masih berada di belakangnya. Seorang teman berusaha menolongnya tapi MN menyuruh temannya itu pergi meninggalkannya karena ia tak sanggup lagi untuk berdiri. Milisi datang lalu memukulinya, tanpa menghiraukan kondisinya. Ia dalam kondisi kritis saat dibawa ke rumah sakit, tapi akhirnya selamat. Ia harus dioperasi beberapa kali sepanjang tahun dan harus berobat ke Makassar, Sulawesi Selatan. Ia masih kesulitan buang air besar hingga hari ini.

Dua orang demonstran West Papua lainnya, Isak Bahbah (25) and Patrisius Hanaba (50), terkena peluru sehingga luka ringan. Mereka berobat ke klinik setempat.

Polisi dan TNI masih berpatroli hingga malam dan milisi mendirikan tenda dekat jalan utama. Sekitar jam 20.00 waktu setempat, dua belas orang mendatangi kantor DAP yang sudah terbakar dan membakar sebuah mobil. Situasi di Fakfak tetap panas hingga akhir bulan ketika pemerintah provinsi menggelar acara rekonsiliasi.

Hanya orang West Papua yang ditangkap hari itu. Empat diantaranya diproses hukum hingga pengadilan.



Kantor DAP terbakar



ANTARA / Jeremias Rahadat

Timika, Provinsi Papua Barat

Ribuan orang turun ke jalan di bawah pengawasan aparat militer bersenjata lengkap. Demonstran menduduki kantor DPRD setempat. Beberapa kendaraan dan sebuah hotel dirusak. Demonstran kemudian dibubarkan paksa menggunakan gas air mata dan tembakan senjata api. Empat puluh lima orang ditangkap. Sepuluh di antara mereka dijadikan tersangka, namun hanya tiga yang diproses hingga tingkat pengadilan.

TSepuluh orang yang ditahan mengalami penganiayaan, khususnya dipukul dengan popor senapan. Mereka adalah **Teryanus Madlama** (21), **Nius Wenda** (24), **Melkisedek Yobee** (16), **Yermin Gombo** (19), **Riko Waryensi** (25), **Urbanus Juka** (21), **Elly Dolame** (20), **Lanny Kogoya** (17), **Timinus Wenda** (25), dan **Maikel Gombo** (20).

Sembilan belas orang lainnya luka-luka akibat penganiayaan polisi. Di antaranya:

1. **Sagintak Wasiangge**: siswa SMA ini ditendang dan dipukul dengan baton karet pada saat penangkapan, telinganya ditusuk dengan senjata di truk polisi, tulang punggungnya dipukul dengan logam setidaknya dua kali sebelum diinterogasi, telinga kanan dihantam senapan dan dipukul hingga berdarah di kantor polisi.
2. **Robi Nirigi**: dahi anak kecil yang belum sekolah ini dipukul di ruang interogasi.
3. **Jerianus Gwijangge**: siswa SMA ini dipukul di bagian kepala dan tulang punggung.
4. **Indibirik Kamarigi**: tulang belakang dan punggungnya ditendang berkali-kali dengan sepatu bot, dipukul saat ditangkap dan saat di kantor polisi.
5. **Ebenus Gwijangge**: siswa SMA ini dipukul di punggung dengan baton logam sebelum diinterogasi.
6. **Rekanus Kerabea**: ia dihantam popor senapan di depan kantor polisi, kemudian dengan baton logam di dalam kantor polisi sebelum diinterogasi.
7. **Meli Kerabea**: ia dihantam popor senapan saat diseret secara paksa ke dalam truk polisi; lutut dan tulang rusuknya ditendang ketika tiba di kantor polisi, dan ia dipukul dengan baton logam di ruang interogasi.
8. **Kongkinus Uamang**: siswi SMA ini bukan bagian dari demonstran, tapi mata kanannya dipukul saat ditangkap.
9. **Efesus Lepi**: ia dihantam popor senapan dan ditendang juga dipukuli selama penangkapan.
10. **Pendi Yanengga**: ia dihantam popor senapan dan baton karet saat ditangkap.
11. **Moni Diwitau**: ia dipukuli saat ditangkap.

12. **Melianus Ayomi:** ia dipukuli saat ditangkap.
13. **Anius Uamang:** dipukul sampai berdarah dan dibawa ke rumah sakit.
14. **Damianus Anouw:** kepala dan punggungnya dihantam dengan senapan dan pinggul kanannya ditendang.
15. **Yanes Stenamun:** kepala dan lutut sebelah kiri dipukul, hidung dan bibir dipukul sampai berdarah, dan wajahnya dipukul sampai pipi kanannya bengkak.
16. **Lusia Amisim:** kaki kanannya ditembak.
17. **Wilson Hisage:** siku kirinya ditembak.
18. **Mama Nawipa:** lengan kirinya ditembak.
19. **Mama Gobai:** kaki kanannya ditembak.



**Manokwari,
Provinsi Papua
Barat**



Cirebon, Provinsi Jawa Barat

Puluhan mahasiswa Indonesia menggelar aksi protes mengancam rasisme dan menuntut pelaku tindakan rasis diadili.



Maybrat, Provinsi Papua Barat



Biak, Provinsi Papua Barat



22 Agustus 2019

Aksi-aksi protes berlangsung di tiga kota di West Papua, empat kota di Indonesia, dan di Timor Leste. Asrama mahasiswa West Papua di Manado dan Semarang jadi sasaran pengintaian pihak kepolisian yang mengganggu kenyamanan. Pada tahap ini, 34 demonstran West Papua telah ditangkap, tapi belum ada pelaku tindakan rasis yang ditangkap.

Polisi di Bandung, Jawa Barat, mengulang tindakan rasis institusional mereka dengan mengirim puluhan botol minuman keras ke asrama Kamasan II, Bandung, karena selama ini orang West Papua distigma sebagai 'pemabuk'. Grafiti solidaritas bagi rakyat West Papua terlihat di Solo (Jawa Tengah), Pontianak (Kalimantan Barat), dan Manado (Sulawesi Utara).



"Papua berhak merdeka"



"Aku malu tinggal di negeri penjajah!"

Dogiyai, Provinsi Papua



Para demonstran menurunkan segala atribut berwarna merah dan putih, warna bendera Indonesia.

Nabire, Provinsi Papua



Kami sudah lama dianggap monyet oleh NKRI (sejak 1961 hingga sekarang)



Dili, Timor Leste

Setelah menggelar konferensi pers, puluhan aktivis di Timor Leste yang bersolidaritas pada West Papua ditangkap saat berpawai menuju Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) setempat.



Jakarta

Para demonstran melepas baju dan menepuk-nepuk dada mereka sambil berteriak “Kami monyet!” di hadapan polisi dan tentara. Sempat terjadi bentrokan saat aparat keamanan mencegah demonstran bergerak ke arah Istana Negara. Akhirnya para demonstran berhasil menembus barikade polisi. Bendera Bintang Kejora dikibarkan dan para demonstran melakukan ‘waita’, tarian tradisional West Papua, di depan istana. Demonstrasi berlangsung tertib dan damai hingga peserta aksi membubarkan diri jam 17.40 WIB.⁵⁴



Dita Alangkara/AP

54. BBC News Indonesia, 'Unjuk Rasa Papua di Jakarta: 'Tangkap dan adili aktor intelektual pengepungan asrama'', 22 Agustus 2019. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-49431327>

Bogor, Provinsi Jawa Barat



Bandung, Provinsi Jawa Barat

Seorang mahasiswa West Papua yang berada di asrama mahasiswa West Papua, Kamasan II, Bandung, dikirim dua kerat vodka lokal oleh pihak kepolisian, saat puluhan mahasiswa lainnya tengah berdemonstrasi di depan Gedung Sate. Karena merasa distigma secara rasial sebagai 'pemabuk', para mahasiswa mengembalikan minuman beralkohol itu kepada polisi yang mengirim, yang saat itu kebetulan berada di lokasi protes.



Yahukimo, Provinsi Papua

Ribuan orang West Papua melakukan 'waita', tarian tradisional West Papua, sambil mengibarkan Bintang Kejora.



Salatiga, Provinsi Jawa Tengah



Bali, Provinsi Bali



23 Agustus 2019

Kepolisian Indonesia mengklaim bahwa Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) mulai masuk ke Kota Wamena dari basis mereka di hutan. Seorang pejuang kemerdekaan tewas ditembak di Wamena.⁵⁵ Pembela HAM setempat melaporkan bahwa dua anggota kepolisian terluka dalam bentrokan tersebut.

Di Kabupaten Puncak, aparat keamanan Indonesia menyisir dan menyerang Desa Tegelobak, Distrik Gome. Aparat menuduh bahwa desa tersebut telah menjadi markas TPNPB. Warga sipil setempat melarikan diri karena ketakutan.⁵⁶

Di Merauke, polisi membubarkan orang-orang West Papua yang membagikan selebaran kampanye anti-rasisme di pasar.

Mahasiswa West Papua di Bandung menolak pertemuan dengan Gubernur Jawa Barat dan menolak undangan Polda Jawa Barat untuk 'bakar batu' dalam rangka rekonsiliasi. Beberapa kelompok masyarakat sipil di Jakarta menyerahkan sebuah petisi pada Kemenkominfo serta menggelar protes di depan kantor kementerian. Mereka menuntut agar pembatasan internet di West Papua segera dihentikan.



Pengacara HAM Jennifer Robinson dan penulis mengirim desakan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait pemblokiran internet di West Papua.⁵⁷ Pada 12 September 2019, perwakilan Indonesia di PBB menjawab sejumlah pertanyaan dari PBB terkait masalah ini dan mengatakan bahwa pemblokiran internet yang dilakukan Pemerintah Indonesia dilakukan demi mencegah "hoaks yang digunakan untuk memicu kerusuhan di Papua".⁵⁸

55. J. R. Purba and A. Ika, 'Kontak Senjata di Wamena, 1 Anggota KKB Dilumpuhkan TNI-Polri', 23 Agustus 2019. <https://regional.kompas.com/read/2019/08/23/13034171/kontak-senjata-di-wamena1-anggota-kkb-dilumpuhkan-tni-polri>

56. A. Belau, 'Aparat Gabungan Dilaporkan Sedang Penyisiran di Puncak Papua', 25 Agustus 2019. <https://suarapapua.com/2019/08/25/aparat-gabungan-dilaporkan-sedang-penyisiran-di-puncak-papua>

57. J. Robinson, 'Urgent appeal filed with UN Special Rapporteur by West Papuan journalist over internet blocking by Indonesia', 23 Agustus 2019. <https://www.doughtystreet.co.uk/news/urgent-appeal-filed-un-special-rapporteur-west-papuan-journalist-over-internet-blocking>

58. Embassy of the Republic of Indonesia to the United Nations, WTO and other International Organisations in Geneva, letter of response by Ambassador/Permanent Representative Hasan Kleib, 12 September 2019 Ref. No. 133/POL-II/IX/2019. <https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownloadFile?gld=34873>

Pesan solidaritas bagi West Papua datang dari Australia. Markas Angkatan Pertahanan Australia (The Australian Defence Force) dan Angkatan Laut Australia (The Royal Australian Navy) dilempari bom cat oleh aktivis solidaritas setempat karena dianggap kerap menggelar latihan bersama dengan tentara Indonesia, maka dianggap terlibat dalam pelanggaran HAM di West Papua. Grafiti solidaritas juga terlihat di Brisbane, begitu juga video solidaritas dari Alice Springs.



Aksi solidaritas di Cairns, Australia

Aksi-aksi protes terjadi di Sarmi, West Papua, di dua kota di Indonesia, dan di Papua Nugini.

Yogyakarta, Provinsi Yogyakarta

Mahasiswa Indonesia menggelar demonstrasi dengan membawa spanduk yang tulisannya mengolok jargon persatuan nasional Indonesia menjadi "Bhineka Tinggal Kata".



Palu, Provinsi Sulawesi Tengah

Sejumlah orang Indonesia mengutuk rasisme dan menuntut hak untuk menentukan nasib sendiri bagi rakyat West Papua di depan markas Polda Sulawesi Tengah.



24 Agustus 2019

Mahasiswa West Papua di Jawa dan Bali merilis pernyataan menolak segala upaya rekonsiliasi dengan Pemerintah Indonesia dan menuntut hak menentukan nasib sendiri. Mereka juga menolak pendekatan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang, menurut mereka, selalu gagal menangani pelanggaran HAM di West Papua.

Ratusan orang West Papua mengungsi akibat operasi aparat gabungan terbaru di Kabupaten Puncak. Seorang warga sipil, Ginobina Tabuni (60), terbakar hingga tewas di dalam honai saat Desa Upaga diserbu polisi dan tentara.⁵⁹



59. H. Yeimo, 'Korban honai terbakar di Gome diperabukan pada Minggu', 27 Agustus 2019. <https://jubi.co.id/korban-honai-terbakar-di-gome-diperabukan-pada-minggu>

Aksi-aksi protes berlangsung di Papua Nugini juga di dua kota di Indonesia, termasuk di Kupang (Nusa Tenggara Timur), yang mana demonstran dilarang meneriakkan “Papua merdeka” dan dilarang mengenakan atribut bermotif Bintang Kejora.

Port Moresby, Papua Nugini

TPowes Parkop, Gubernur Port Moresby dan Distrik Ibu Kota Nasional, memimpin demonstrasi ribuan massa pendukung West Papua. Beberapa peserta demonstran sempat membakar sebuah bendera Indonesia.



Semarang, Provinsi Jawa Tengah





Bali

25 Agustus 2019

Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) mengeluarkan pernyataan solidaritas untuk West Papua. Pernyataan mereka menyoroti pentingnya menghindari nasionalisme buta yang merendahkan hak asasi manusia.⁶⁰

Sebuah penghormatan bagi Gerakan Melawan dilakukan ketika Darwin Festival berlangsung di Australia. Grafiti solidaritas muncul di Bali, Indonesia, dan Sydney, Australia.

60. BEM FISIP UI, 'Seruan Solidaritas: Di Antara Perikemanusiaan dan Persatuan Indonesia', 15 Agustus 2019. <https://drive.google.com/file/d/1zd7rDA7ee34Xdz0BmaixD8vvC1FM5wL0/view>



Polisi mendatangi SMA di Pasuruan

26 August 2019

MRP menerbitkan pernyataan berisi seruan agar seluruh mahasiswa West Papua kembali ke tanah air dan menyatakan bahwa isu rasisme ini akan dibawa ke PBB.

Lebih dari 800 rakyat West Papua mengungsi akibat operasi aparat gabungan terbaru di Kabupaten Puncak.⁶¹

Di Pasuruan, Jawa Timur, polisi memaksa siswa sekolah menengah atas (SMA) membaca teks bernuansa nasionalisme Indonesia untuk direkam. Peristiwa ini menyebabkan setidaknya seorang siswa menangis.

61. A. Belau, '800-an Orang Mengungsi ke Distrik Gome, Puncak Papua', 26 Agustus 2019. <https://suarapapua.com/2019/08/26/800-an-orang-mengungsi-ke-distrik-gome-puncak-papua>

Deiyai, Provinsi Papua

Ribuan demonstran turun ke jalan dan berkumpul di kantor bupati. Saat seorang peserta aksi tengah berorasi, salah seorang peserta aksi lainnya memanjat tiang bendera dan mengibarkan bendera Bintang Kejora. Bendera itu berkibar di halaman kantor bupati selama delapan jam.



Wamena, Provinsi Papua

Ribuan rakyat West Papua melakukan demonstrasi, termasuk penduduk Nduga yang terusir akibat operasi militer yang, kala itu, telah menyebabkan 186 warga sipil meninggal.



Yahukimo, Provinsi Papua

Bendera Bintang Kejora berkibar.



Dogiyai, Provinsi Papua

Seorang West Papua yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil Indonesia berorasi bahwa ia siap melepas seragamnya karena sudah banyak penduduk Dogiyai meninggal sebagai korban tentara dan polisi. “Tidak akan ada perdamaian bersama NKRI,” ujarnya.



Paniai, Provinsi Papua



Pegunungan Bintang, Provinsi Papua



Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan



The Hague, Belanda

Aktivis solidaritas melakukan aksi protes dan melakukan pertunjukan di depan KBRI setempat.



27 Agustus 2019

Di Surabaya, Jawa Timur, mahasiswa West Papua menolak menemui Gubernur Papua yang jauh-jauh datang untuk menengahi permasalahan. Para mahasiswa menilai Gubernur Papua merupakan kaki tangan Pemerintah Indonesia. Mereka malahan meneriakkan “Papua Merdeka” di hadapan sang gubernur dan rombongannya.

Aksi protes berlangsung di satu kota di West Papua dan satu kota di Indonesia.

Bandung, Provinsi Jawa Barat

Demonstran diblokade aparat keamanan saat hendak melakukan protes ke Markas Kodam III/ Siliwangi.



Sorong, Provinsi Papua Barat

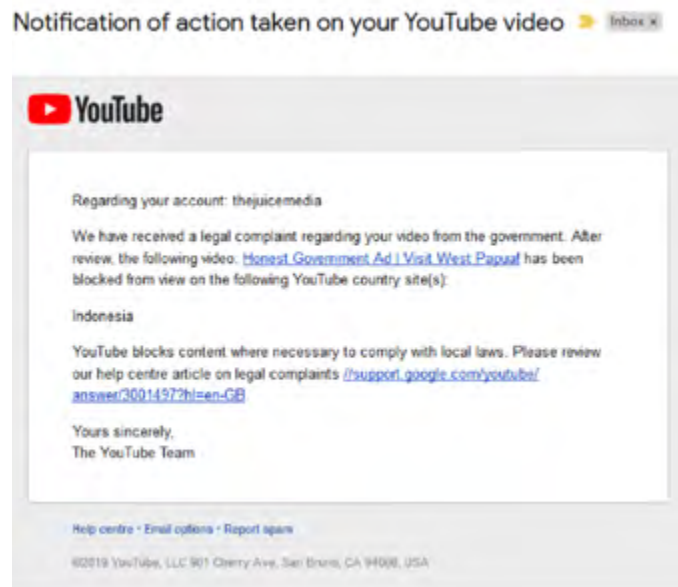
Di kantor walikota, demonstran menyerahkan bendera Indonesia pada perwakilan pemerintah. Itu mereka lakukan sebagai simbol penolakan mereka atas otonomi khusus dan segala bentuk kompromi dengan Indonesia. Mereka menuntut referendum kemerdekaan.



28 August 2019

Di Yogyakarta, mahasiswa West Papua menolak menemui perwakilan MRP yang datang berkunjung, sebagai cara mengekspresikan penolakan mereka atas otonomi khusus dan segala bentuk kompromi.

Aksi protes berlangsung di dua kota di Indonesia dan di satu kota di West Papua serta menjadi hari kedua yang paling mematikan dalam Gerakan Melawan.



Akun Twitter resmi TNI mengklaim bahwa laporan *Reuters* tentang penembakan di West Papua yang terjadi hari itu adalah hoaks. Pemerintah Indonesia meminta YouTube memblokir sebuah video satire tentang West Papua, "Honest Government Ad – Visit West Papua!", yang dibuat media asal Australia, *Juice Media*, supaya tidak bisa ditonton di Indonesia. Beberapa akun media sosial aktivis West Papua yang kerap membagikan update situasi pun ditangguhkan (*suspended*).

Deiyai, Provinsi Papua

Menurut laporan oleh gereja KINGMI, delapan orang sipil West Papua dan satu anggota TNI meninggal, sedangkan 50 orang sipil West Papua dan 7 anggota Brimob luka-luka.

Ribuan demonstran tiba di kantor bupati di Waghete pada tengah hari. Saat beberapa demonstran menyampaikan orasi di halaman kantor, jumlah polisi dan tentara terus bertambah. Personel tambahan itu datang dari luar Deiyai.

Sekitar dua jam kemudian, Yustinus Takimai sedang berdiri di salah satu pojokan saat tiba-tiba ditabrak sebuah mobil yang dikendarai personel TNI. Seketika ia meninggal. Demonstran yang berdiri di dekatnya langsung menembakkan anak panah ke arah tentara yang ada di dalam mobil. Insiden ini merupakan pemicu dari kerusuhan yang kemudian terjadi.

Para demonstran menjadi marah saat mereka mendengar rentetan tembakan. Mereka melemparkan batu dan menembakkan anak panah ke arah aparat keamanan sambil berteriak, "Kalian bilang kami monyet. Sekarang kalian datang mau bunuh kami juga?" Teriakan itu dijawab dengan tembakan gas air mata dan peluru tajam oleh polisi dan tentara. Akibatnya banyak yang meninggal dan terluka, sebagian demonstran lainnya melarikan diri ke hutan.

Mayat-mayat yang bergelimpangan di halaman depan kantor bupati dijaga aparat keamanan. Paramedis dengan sebuah ambulans tiba di lokasi satu jam kemudian, tapi mereka meninggalkan lokasi dengan tangan kosong karena ditakut-takuti aparat, dianggap sebagai bagian dari demonstran. Mereka harus kembali ke rumah sakit dengan berjalan kaki yang kemudian mereka putuskan untuk tutup lebih awal.

Sore harinya, mayat-mayat dan orang-orang yang mengalami luka dibawa ke Rumah Sakit Madi, rumah sakit yang punya fasilitas lebih baik di kabupaten tetangga, Paniai. Pada titik ini, layanan internet dan seluler telah dimatikan, serta jalan utama yang menghubungkan Paniai dan Deiyai ditutup polisi dan tentara. Aparat keamanan meminta agar sepuluh senjata yang direbut saat kerusuhan terjadi dikembalikan.

Pada hari berikutnya, aparat keamanan tambahan dikirim ke Deiyai dan Paniai. Pastor Santon Takege ditodong senjata saat berusaha mengunjungi rumah sakit dan orang-orang yang ditangkap. Marinus Ikomou, Derikson Adii, Hans Ukago, dan Yustinus Takimau dimakamkan di kampung kelahiran masing-masing.

Pada 30 Agustus, jenazah Aleks Pigai, Pilemon Waine, dan Aminadap Kotouki dikembalikan dari Paniai ke Deiyai, kemudian dibawa ke kampung asal masing-masing untuk dimakamkan. Sembilan senjata yang dicuri dari mobil tentara, dikembalikan lewat perantara pemerintah setempat. Yemi Douw meninggal di rumahnya di Kampung Widimei, setelah mengalami luka berat. Sekitar tengah hari, seluruh sepeda motor yang ditinggalkan di kantor bupati karena tidak sempat diambil setelah kerusuhan terjadi, dibawa aparat ke Nabire. Hingga hari ini, ratusan sepeda motor itu tidak kunjung dikembalikan pada pemiliknya, dan polisi enggan memberi keterangan berapa jumlah total sepeda motor yang diambil paksa tersebut.

Keesokan harinya, sepuluh pasien yang tengah dirawat di rumah sakit di Paniai ditangkap oleh polisi untuk diinvestigasi tentang kerusuhan. Seorang korban sipil, Yemi Douw, dimakamkan.

Pada pekan berikutnya, aparat keamanan gabungan melakukan operasi penyisiran atribut Bintang Kejora dan senjata tajam di kampung-kampung. Mereka memaksa orang-orang yang memakai koteka agar mengenakan pakaian. Penduduk kampung menjadi trauma dan takut untuk beraktivitas biasa seperti berkebun, memancing, atau mengumpulkan kayu.

Pada 2 September: Desa Okomo dan sekitarnya

Pada 4 September: Desa Diyai I dan Diyai II. Pastor Demianus Adii diintimidasi.

Pada 5 September: Desa Bomou I, Bomou II, dan Yaba.

Pada 6 September: desa-desa di wilayah Yatamo. Pastor Ibrani Dwijangge diintimidasi.

Pada 7 September, empat pasien lagi, yang masih dirawat di rumah sakit karena luka berat, ditangkap dan dibawa ke kantor polisi untuk diinvestigasi. Dari 14 orang yang ditangkap, 9 di antaranya kemudian menjadi tahanan politik.

Korban sipil yang meninggal:

1. **Yustinus Takimai** (24): Saat ikut demonstrasi, ia tiba-tiba ditabrak mobil yang dikendarai tentara. Ia meninggal seketika dan penabrakan itu jadi pemicu kerusuhan. Ia dimakamkan keesokan harinya
2. **Alpius Pigai** (20): Ia ditembak di dada dan meninggal di lokasi kejadian. Ia berasal dari Desa Digibagata, Distrik Tigi Barat. Ia baru dimakamkan dua hari setelah kejadian.
3. **Marinus Ikomou** (37): Ia ditembak saat protes berlangsung, berhasil kabur ke Desa Yaba dan kemudian meninggal di sana pada hari yang sama. Keluarganya membawa jasadnya ke kampung kelahirannya di Ayatei, Distrik Tigi Barat, untuk dimakamkan keesokan harinya
4. **Hans Ukago** (26): Ditembak di bagian punggung, roboh dan tewas di gerbang kantor bupati. Ia berasal dari Desa Diyai, Distrik Tigi Barat, tempat ia dimakamkan keesokan harinya.
5. **Derikson Adii** (21): HDitembak dan berhasil melarikan diri ke Mogouda, tempat akhirnya ia jatuh tidak berdaya. Jasadnya dibawa keluarganya ke kampung halaman di Desa Atouda dan dimakamkan keesokan harinya.
6. **Pilemon Waive** (28): Ia ditembak di bagian dada dan tewas seketika. Ia berasal dari Desa Demago, Distrik Tigi Barat, dimakamkan dua hari setelah kejadian.
7. **Aminadap Kotouki** (35): Meninggal setelah ditembak di bagian perut dan pelurunya tembus hingga ke punggung. Ia berasal dari Desa Bomou, Distrik Waghete. Ia dimakamkan dua hari kemudian.
8. **Yemi Douw** (29): Ia ditembak di bagian perut tapi berhasil melarikan diri ke Punyai, tempat ia tewas dua hari kemudian. Ia berasal dari Desa Widime, Distrik Tigi Barat. Dimakamkan sehari setelah tewas.

Korban sipil luka-luka:

1. **Yul Badii** (20): Warga Desa Ayatei, Distrik Tigi Barat. Tertembak di paha kanan.
2. **Bernadus Kotouki** (16): Mahasiswa dari Desa Bomou, Distrik Waghete. Tertembak di paha kanan
3. **Yohanes Adii** (47): Petani dari Desa Edaratoli, Distrik Tigi Timur. Tertembak di paha kiri.
4. **Juven Pekei** (34): Petani dari Desa Widime, Distrik Tigi Barat. Tertembak di paha.
5. **Simon Pakage** (29): Petani dari Desa Widime, Distrik Tigi Barat. Tertembak di paha.
6. **Samuel Edowai** (26)
7. **Gergorius Tekege** (29): Petani dari Desa Okomokebo, Distrik Waghete. Tertembak di punggung bagian kanan.
8. **Simon P Ukago** (27): Petani dari Desa Diyai II, Distrik Tigi Barat. Ditangkap saat demonstrasi berlangsung dan disiksa saat di dalam mobil menuju Rumah Sakit Madi.
9. **Step Pigai** (26): Mahasiswa dari Desa Waghete II. Ia ditangkap dan dibawa ke rumah sakit tapi disiksa saat dalam kendaraan.
10. **Melianus Mote** (32): Mahasiswa dari Desa Waghete. Tertembak di mata kanan.
11. **Mikael Bukega** (26): Petani dari Desa Okomokebo. Disiksa saat dalam perjalanan menuju rumah sakit.
12. **Alex Pakage** (28): Pegawai negeri dari Desa Oneibo, Distrik Waghete. Tertembak di paha kanan.
13. **Stepanus Goo** (29): Warga Desa Jinidoba, Distrik Tigi Barat. Tertembak di paha kiri.
14. **Yos Iyai** (30): Mahasiswa dari Desa Digibagata, Distrik Tigi Barat. Tertembak di betis kiri.
15. **Leander Doo** (30): Petani dari Desa Watiyai, Distrik Tigi Timur. Tertembak di paha kiri.
16. **Frans Nawipa** (35): Petani dari Desa Watiyai, Distrik Tigi Timur. Tertembak di paha kiri, peluru menembus ke alat kelaminnya.
17. **Yonas Kayame** (28): Mahasiswa dari Desa Edarotali, Distrik Tigi Timur. Tertembak di pinggang belakang.
18. **Elihut Pigai** (21): Warga Desa Widiwakiya, Distrik Tigi Timur. Tertembak di paha kanan.
19. **Yance Dawapa** (26): Petani dari Desa Wagoni, Distrik Tigi Barat. Disiksa saat dibawa ke rumah sakit. Kepalanya dipukuli berkali-kali dengan ujung senapan hingga tidak sadarkan diri setibanya di unit gawat darurat.
20. **Elisabet Mote** (29): Mahasiswi dari Desa Yaba, Distrik Waghete. Ia tertembak di bagian perut hingga ususnya keluar. Ia langsung pulang setelah mendapat pertolongan di rumah sakit karena takut melihat polisi yang banyak di rumah sakit.

21. **Yanto Dogopia** (19): Warga Desa Bomou I. Tertembak di betis kanan dan paha kiri.
22. **Martinus Iyai** (30): Petani dari Desa Digibagata, Distrik Tigi Barat. Tertembak di paha kanan dan kiri, paha kanan mengalami luka parah.
23. **Yustinus Agapa** (17): Pelajar dari Desa Widime, Distrik Tigi Barat. Mengalami luka parah setelah paha kanannya ditembus peluru.
24. **Apilin Mote** (35): Seorang ibu rumah tangga dari Desa Yaba, Distrik Waghete. Mengalami luka parah setelah peluru menembus samping paha kanan.
25. **Naomi Pigome** (28): Warga Desa Digibagata, Distrik Tigi Barat. Luka parah setelah jatuh ke selokan akibat gas air mata.
26. **Felex Agapa** (26): Warga Desa Widime, Distrik Tigi Barat. Tertembak di betis kiri.
27. **Karel Kotouki** (64): Petani dari Desa Wigime, Distrik Tigi Barat. Tertembak di betis kanan.
28. **Alex Douw** (23): Warga Desa Widime, Distrik Tigi Barat. Tertembak di pipi kanan.
29. **Andreas Douw** (22): Warga Desa Widime, Distrik Tigi Barat. Tertembak di bagian ketiak.
30. **Irarius Douw** (25): Warga Desa Widime, Distrik Tigi Barat. Tertembak di betis sebelah kiri.
31. **Frengki Pekei** (24): Warga Desa Gakobo, Distrik Tigi Barat. Tertembak di sisi kanan punggung.
32. **Fenior Pekei** (12): Anak Desa Yaba, Distrik Waghete. Lutut kanannya terkena peluru. Dia harus merangkak selama beberapa hari untuk sampai ke rumah.
33. **Agus Mote** (20): Mahasiswa dari Desa Yaba, Distrik Waghete. Mata kanannya terluka.
34. **Ones Badii** (-): Warga Desa Kogemani, Distrik Tigi Barat. Tertembak di dada.
35. **Anggel Kotouki** (20): Warga Desa Bomou II, Distrik Waghete. Tertembak di dada.
36. **Domin Pakege** (25): Warga Desa Bomou II, Distrik Waghete. Tertembak di dada.
37. **Marthinus Dogopia** (21): Warga Desa Onebo, Distrik Waghete. Tertembak di paha.
38. **Amos Pakage** (24): Warga Desa Bomou II, Distrik Waghete. Tertembak di perut.
39. **Ukago Mabipai** (20): Warga Desa Diyai I, Distrik Waghete. Tertembak di kaki kanan.
40. **Titus Giay** (24): Warga Desa Omago II, Distrik Waghete. Tertembak di paha, peluru tembus ke punggung.
41. **Yufri Bobii** (21): Warga Desa Ayatei, Distrik Waghete. Tertembak di dada kanan.
42. **Olis Pekey** (19): Warga Desa Ayatei, Distrik Waghete. Tertembak di dada kanan.
43. **Leander Douw** (28): Petani dari Desa Gakobo. Tertembak di bagian kiri kepala.
44. **Yerino Madai** (30): Petani dari Desa Dagokebo, Distrik Tigi Timur. Tertembak di kaki kiri.
45. **Lidia Adii** (29): Seorang ibu rumah tangga dari Desa Watiyai, Distrik Tigi Timur. Tertembak di betis kiri.
46. **Paulus Adii** (29): Petani dari Desa Tokeugida, Distrik Tigi Timur. Tertembak di punggung.
47. **Demianus Adii** (21): Warga Desa Udaugi, Distrik Tigi Timur. Kedua kakinya patah ditabrak mobil yang dikendarai tentara—mobil yang menewaskan Yustinus Takimai.
48. **Yulius Adii** (30): Petani dari Desa Edaratoli, Distrik Tigi Timur. Tertembak di betis kanan.
49. **Leander Waine** (29): Petani dari Desa Wagomani, Distrik Tigi Barat. Tertembak di ketiak kanan.
50. **Yustinus Wandagau** (22): Mahasiswa dari Distrik Waghete. Lengan kanannya ditembus sebuah peluru.



Jakarta Post

Jakarta

Demonstran anti-rasisme mengibarkan Bintang Kejora di depan Istana Negara. Delapan orang kemudian ditangkap dan enam di antaranya ditahan, dikenai pasal makar.



Jember, Provinsi Jawa Timur

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) merilis pernyataan sikap mengutuk upaya-upaya pemerintah dan aparat keamanan yang menghalang-halangi peliputan demonstrasi di Deiyai.

29 Agustus 2019

Serangkaian serangan terencana terhadap para pembela HAM dimulai. Di Surabaya, milisi reaksioner sayap kanan melakukan aksi protes di depan kantor LBH Surabaya karena LBH Surabaya kerap mendampingi mahasiswa West Papua. Sore harinya, sekelompok orang berkumpul di depan asrama mahasiswa Surabaya tanpa alasan yang jelas.

Warga Yahukimo melaporkan gangguan komunikasi telah menyebabkan kebingungan dan kekhawatiran, membuat orang-orang tua menjaga anak-anak mereka tetap di rumah ketimbang berangkat ke sekolah selama hampir seminggu. Karena gangguan ini, mereka juga khawatir akan ada tindakan keras dari aparat keamanan tanpa diketahui dunia luar.

Tiga ratus personel brimob tambahan dikirim ke dataran tinggi West Papua, tempat bentrokan mematikan terjadi sehari sebelumnya.⁶²

Demonstrasi berlangsung di dua kota di West Papua. Demonstrasi di Jayapura berujung rusuh.

62. Suara.com 'Kapolri kirim pasukan ke Deiyai dan Paniai, Brimob ke Jayapura' 29 August 2019. <https://www.suara.com/news/2019/08/29/122433/kapolri-kirim-ratusan-pasukan-ke-deiyai-dan-paniai-brimob-ke-jayapura>

Yalimo, Provinsi Papua



Jayapura, Provinsi Papua

TRibuan orang turun ke jalan dan membuat aktivitas kota menjadi lumpuh. Demonstrasi yang dipimpin organisasi-organisasi mahasiswa itu berjalan damai. Namun, di beberapa tempat lain, demonstrasi berakhir rusuh. Kantor MRP, bangunan di sekitar pelabuhan, kendaraan, dan sejumlah fasilitas umum, terbakar dan rusak. Lapas Abepura, tempat sejumlah tahanan politik West Papua ditahan, merupakan salah satu gedung yang terbakar dan rusak, banyak tahanan yang akhirnya melarikan diri. Sebuah polsek serta kendaraan dinas militer dan polisi juga terbakar.⁶³ Sebanyak 64 orang ditangkap hari itu, 28 diantaranya hingga ke tingkat pengadilan.



Jubi / Agus Pabika

63. D. Lestari and B. Nugraha, 'Rusuh di Jayapura, lapas dirusak dan polsek dibakar', 29 August 2019 <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1231156-rusuh-di-jayapura-lapas-dirusak-dan-polsek-dibakar>



Milisi memanjat pagar
LBH Jakarta

Seorang peserta aksi dihajar popor senapan dan lima belas demonstran lainnya ditembak peluru karet— termasuk enam orang yang harus dirawat di rumah sakit. Mereka bergabung kembali dengan barisan demonstran setelah luka mereka diobati.⁶⁴

Menurut polisi, hari itu ada empat orang yang tewas.⁶⁵ Salah satunya adalah Marselino Samon yang ditemukan tewas dengan bekas luka tusukan.

Setelah memutus jaringan telepon di Deiyai sehari sebelumnya, pemerintah juga memutus jaringan telepon di Jayapura.⁶⁶ Listrik juga terputus setelah kabelnya terbakar.⁶⁷

Demonstran mengibarkan Bintang Kejora di kantor gubernur sepanjang sore dan terus menduduki kantor gubernur hingga keesokan harinya.

64. B. Mawel, 'Tertembak peluru karet, 15 mahasiswa tetap bisa berunjukrasa, satu lainnya dipopor' 29 August 2019 <https://jubi.co.id/tertembak-peluru-karet-15-mahasiswa-tetap-bisa-berunjukrasa-satu-lainnya-dipopor>

65. Liputan6.com, 'Polisi ungkap empat warga tewas usai kerusuhan di Jayapura', 2 September 2019. <https://www.liputan6.com/news/read/4052511/polisi-ungkap-empat-warga-tewas-usai-kerusuhan-di-jayapura>

66. Suara.com, 'Aksi anti rasisme di Jayapura memanas, pemerintah matikan telepon dan sms', 29 August 2019 <https://www.suara.com/news/2019/08/29/142135/aksi-anti-rasisme-di-jayapura-memanas-pemerintah-matikan-telepon-dan-sms>

67. CNN Indonesia, 'Demo rusuh, PLN putus aliran listrik se-Jayapura', 29 August 2019 <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190829161318-20-425817/demo-rusuh-pln-putus-aliran-listrik-se-jayapura>

30 August 2019

Kelompok-kelompok pembela HAM di empat kota berbeda di Indonesia menjadi target intimidasi — serupa dengan yang dialami LBH Surabaya sehari sebelumnya. Kantor LBH Jakarta, Perkumpulan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) Jawa Barat, LBH Makassar, dan KontraS Surabaya, digerus milisi sipil reaksioner yang membawa bendera dan atribut Merah Putih. Lembaga-lembaga itu diprotes karena kerap mendampingi aksi mahasiswa West Papua. Ormas-ormas reaksioner menuduh kelompok-kelompok pembela HAM itu sebagai provokator.



Ormas reaksioner di depan kantor PBHI Jawa Barat, Kota Bandung



Ormas reaksioner di depan kantor KontraS Surabaya



Di Surabaya, sebuah spanduk bertulisan “Referendum is the solution (Referendum adalah solusinya)” yang terpasang di depan asrama mahasiswa West Papua, dilempar bom cat oleh sejumlah pengendara sepeda motor.

Tambahan 600 personel brimob dikirim ke Jayapura.⁶⁸ Tambahan 329 prajurit TNI⁶⁹ dan 250 personel brimob⁷⁰ dikirim ke West Papua secara umum.

Di Jayapura, DAP mempertanyakan motif di balik pertemuan tertutup antara Panglima TNI, Kapolri, dan milisi ultranasionalis—Barisan Merah Putih.⁷¹

Kepala kelompok milisi Islam terbesar di Indonesia menanggapi laporan media massa yang menyatakan bahwa kelompoknya turut mengirim pasukan ke West Papua. Menurutnya, “2000 orang yang dimaksud kemungkinan merupakan bagian dari sekitar 5000 anggota yang sebelumnya memang telah ada dan tinggal di Papua.” Ia memastikan tidak ada pengiriman personel ke Bumi Cenderawasih. Ia mengaku organisasinya siap “membantu TNI jika diperlukan untuk menenangkan situasi dan meredam isu separatisme di sana.”⁷²

Di Jakarta, mahasiswa West Papua Charles Kossay dan Dano Tabuni ditangkap Polda Metro Jaya. Polisi pun mendatangi asrama mahasiswa West Papua di Depok, Jawa Barat, untuk menangkap dua mahasiswa lainnya. Mahasiswa West Papua menuntut pembebasan kawan-kawannya yang ditangkap dan mengatakan bahwa “Monyet-monyet Papua dari Sorong sampai Samarai siap memenuhi penjara kolonial.”

68. Tim Detikcom - Detiknews, 'Demo berujung rusuh, 600 Brimob dari Kaltim dikirim ke Jayapura', 29 August 2019 <https://news.detik.com/berita/d-4686297/demo-berujung-rusuh-600-brimob-dari-kaltim-dikirim-ke-jayapura>

69. R. Ratumakin, 'Ratusan Kostrad dan Marinir didatangkan ke Papua', 31 August 2019 <https://jubi.co.id/ratusan-kostrad-dan-marinir-didatangkan-ke-papua>

70. iNews.id, 'Bantu pengamanan kerusuhan Papua, Polda Kalbar kirim 250 Brimob', 30 August 2019 <https://www.inews.id/multimedia/photo/bantu-pengamanan-kerusuhan-papua-polda-kalbar-kirim-250-brimob>

71. E. Wally 'DAP wilayah Mamta-Tabi pertanyakan pertemuan Kapolri dan Panglima TNI dengan Barisan Merah Putih', 30 August 2019. <https://jubi.co.id/dap-wilayah-mamta-tabi-pertanyakan-pertemuan-kapolri-dan-panglima-tni-dengan-barisan-merah-putih>

72. E. Dimedjo, 'Gus Yaqut: Tidak ada pengiriman Banser NU ke Papua', 30 August 2019 <https://www.tagar.id/gus-yaqut-tidak-ada-pengiriman-banser-nu-ke-papua>



Jayapura, Provinsi Papua

Aksi protes berlangsung di Jayapura selama dua hari berturut-turut. Rakyat West Papua menduduki kantor gubernur, menuntut referendum kemerdekaan. Bendera Bintang Kejora berkibar di halaman kantor.

Milisi sipil warga pendatang bernama Paguyuban Nusantara, dengan membawa senjata tajam dan tumpul, menyisir orang-orang West Papua di Entrop dan dekat wilayah pasar Youtefa. Mereka melemparkan batu ke arah mobil yang kaca jendelanya tertutup. Orang-orang West Papua juga dikejar oleh milisi sipil sehari sebelumnya.

Di hari yang sama, milisi sipil merusak sebuah mobil dan memaksa delapan orang West Papua keluar. Milisi itu kemudian menebas, menusuk, dan hampir membunuh mereka. Salah seorang di antara mereka kondisinya kritis.



Keluarga Evertin Mofu

Jasad Oktavianus Mote (21) penuh luka saat ditemukan. Evertin Mofu (21) ditusuk hingga tewas di depan kantor DPRD. Kasusnya menjadi satu-satunya kasus yang para pembunuhnya diadili hingga ke tingkat pengadilan.

Jam 11.00 waktu setempat, Bupati mendatangi kelompok milisi, meminta agar mereka membuka blokade dan menghentikan aksi penyisiran. Namun mereka menolak.

Rumor dan rasa takut menyebar cepat di seantero kota akibat gangguan jaringan komunikasi, tidak ada yang bisa memverifikasi informasi apa pun. Ribuan demonstran terjebak di kantor gubernur karena tidak mau terlibat bentrokan dengan milisi. Mereka menegaskan bahwa mereka tidak hendak berkelahi dengan orang Indonesia, karena yang mereka lawan adalah sistem kolonial. Demonstran menunggu Kapolda Papua dan anggota legislatif setempat untuk mengevakuasi mereka.

31 Agustus 2019

Malam hari di Jakarta, lebih dari seratus mahasiswa West Papua menyerahkan diri kepada polisi sebagai bentuk solidaritas terhadap kawan-kawan mereka yang ditangkap. Ambrosius Mulait dan Isay Wenda ditangkap saat melakukan aksi solidaritas ini.



Polisi mendatangi asrama mahasiswa West Papua di Jakarta lalu menangkap dua mahasiswa. Di tempat lain, Juru Bicara FRI West Papua turut ditangkap. Dari enam orang yang ditangkap hari ini, empat diantaranya dikenakan pasal makar sedangkan dua lainnya dipulangkan.

Menkopolhukam Wiranto menjawab pertanyaan wartawan tentang jumlah korban kerusuhan di Papua, *"Terserah kita mau umumkan jumlah korban atau tidak."*⁷³

Aksi protes berlangsung di beberapa kota di Indonesia.

Medan, Provinsi Sumatera Utara



⁷³ Ihsanuddin, 'Wiranto: Terserah kita mau umumkan jumlah korban atau tidak', 30 August 2019 <https://nasional.kompas.com/read/2019/08/30/21424651/wiranto-terserah-kita-mau-umumkan-jumlah-korban-atau-tidakk>

Seorang warga Indonesia memimpin demonstrasi



Yogyakarta,
Provinsi
Yogyakarta

"Saya rakyat Indonesia mendukung Papua merdeka"



1 September 2019

Di Jayapura, sebuah asrama mahasiswa West Papua diserang milisi bersenjata saat dini hari. Aparat keamanan datang untuk menengahi, tapi dalam sebuah rekaman video aparat tampak hanya menonton saat milisi menyerang. Mikael Kareth (28), seorang korban salah sasaran, tertembak saat sedang menonton kejadian. Ia dibawa ke rumah sakit tapi tidak sanggup bertahan. Mikael adalah orang asli West Papua yang sedang kuliah di Universitas Cenderawasih. Jasadnya tiba di Sorong, kota kelahirannya, 4 September 2019. Korban lain, Sisilia (19), tertembak saat berusaha melarikan diri menghindari bentrokan. Secara keseluruhan, satu dari dua orang West Papua yang tertembak tewas dan 28 orang lainnya luka-luka.⁷⁴

74. A. Flassy, 'Bentrokan antar warga terjadi, pemerintah diminta percepat proses rekonsiliasi', 1 September 2019. <https://jubi.co.id/bentrokan-antar-warga-terjadi-pemerintah-diminta-percepat-proses-rekonsiliasi/>

Sementara di Yahukimo, dua sekolah negeri dibakar. Humas pemerintah setempat menyatakan bahwa situasi memanas karena rumor yang beredar.⁷⁵

Kapolri mengumumkan bahwa 6000 personel militer dan polisi telah dikirim ke West Papua, termasuk pesawat dan helikopter. “Kalau kurang, saya tambah lagi. Saya dan Pak Panglima TNI sudah komitmen, kurang akan tambah lagi, sampai situasi aman,” ucapnya.⁷⁶

2 September 2019

Kapolri memerintahkan anak buahnya untuk melarang demonstrasi.⁷⁷

Serangan pasukan keamanan Indonesia di Kabupaten Puncak mengakibatkan tiga warga sipil tewas dan 1500 penduduk setempat mengungsi.⁷⁸

Bandung, Provinsi Jawa Barat

Sekelompok ultranasionalis melakukan aksi tandingan.



75. R. Kabak, 'Kota Dekai mencekam, Pemkab Yahukimo akan buat tim besar', 1 September 2019. <https://suarapapua.com/2019/09/01/kota-dekai-mencekam-pemkab-yahukimo-akan-buat-tim-besar>

76. M. Y. Manurung and J. Sugiharto, 'Papua digerojok 6 ribu pasukan, Kapolri: kalau kurang saya tambah', 1 September 2019. <https://nasional.tempo.co/read/1242516/papua-digerojok-6-ribu-pasukan-kapolri-kalau-kurang-saya-tambah>

77. CNN Indonesia, 'Kapolri perintahkan Kapolda Papua dan Papua Barat larang demo', 1 September 2019. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190901131402-12-426533/kapolri-perintahkan-kapolda-papua-dan-papua-barat-larang-demo>

78. H. Yeimo, 'Jumlah pengungsi di distrik Gome terus bertambah', 2 September 2019. <https://jubi.co.id/jumlah-pengungsi-di-distrik-gome-terus-bertambah>

3 September 2019

Manokwari, Provinsi Papua Barat

Aksi protes tetap berlangsung walau diawasi polisi dan tentara dalam jumlah besar. Demonstran dihadang saat hendak melakukan pawai. Mereka melakukan upacara pengibaran bendera Bintang Kejora sambil menyanyikan lagu kebangsaan West Papua di tengah jalan. Tiga mahasiswa ditangkap beberapa hari kemudian karena dituduh melakukan makar.



4 September 2019

Polisi mengumumkan bahwa 68 demonstran di seluruh West Papua dikenakan pasal perusakan properti.⁷⁹ Pada saat yang sama, belum ada pihak yang dituntut karena melukai atau menewaskan orang West Papua selama dua minggu sebelumnya.



Demonstran yang ditangkap tengah berada di truk polisi

Di Merauke, 36 orang West Papua ditangkap karena membagikan selebaran ajakan melawan rasialisme: Aris Pasim, Teodorus Pasim, Martinus Pasim, Martinus Yumame, Prano Pasim, Berabas Pasim, Januarius Jebo, Predinandus Pasim, Belasius Pasim, Basilius Boy, Saverius Samogoi, Tolik Erro, Kanisius Sedap, Sangko Sedap, Hironimus Sirmi, Morisius Sedap, Pilatus Pasim, Pilatus Kaitok, Sebedius

⁷⁹ CNN Indonesia, 'Polisi tetapkan 68 tersangka kerusuhan di Papua', 3 September 2019. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190903150108-20-427149/polisi-tetapkan-68-tersangka-kerusuhan-di-papua>

Jebo, Didimus Erro, Tobias Sirmi, Dominikus Jupjo, Yeremias Sirmi, Marianus Jupjo, Benediktus Yenakap, Salerus Kamogou, Felisianus Kamogou, Palerus Anggoyom, Meki Jebo, Kristianus Tesagai, Ernes Samogoi, Marius Kateng, Manuel Metemko, Selestinus Sedap, Pilominus Sedap, dan seorang lagi tidak diketahui identitasnya.

5 September 2019

Kapolri Tito Karnavian mengumumkan bahwa kelompok pro-kemerdekaan seperti United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Komite Nasional Papua Barat (KNPB), dan Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) merupakan dalang di balik Gerakan Melawan.⁸⁰

Di Manokwari, tiga mahasiswa West Papua ditangkap.

Mahasiswa West Papua dan Indonesia melakukan demonstrasi di Yogyakarta.

6 September 2019

Aksi protes berlangsung di Bali, Indonesia, dan di Manokwari, Provinsi Papua Barat.

Pimpinan BEM Uncen Ferry Gombo ditangkap di Jayapura atas tuduhan makar.

9 September 2019

Di Surabaya, mahasiswa West Papua korban pengepungan dan persekusi rasis, masih bermalam di halaman asrama. Ruangan di dalam asrama masih bau gas air mata sejak insiden 17 Agustus. Jam empat subuh, dengan mengendarai dua sepeda motor, empat orang tidak dikenal melemparkan dua kantong berisi ular ke dalam asrama. Salah satu kantong itu berisi ular berukuran besar, tas lainnya memuat tiga ular yang ukurannya lebih kecil dan kemungkinan berbisa. Tiga ular itu sempat masuk ke dalam asrama dan, hingga laporan ini ditulis, ular-ular itu belum ditemukan. Polisi meminta media daring Tirto.id tidak memberitakan insiden ular tersebut.⁸¹

Pelajar West Papua di sejumlah SMA di Jawa dan tempat lain, didatangi aparat keamanan. Dalam beberapa kasus, mereka diminta terlibat dalam acara-acara yang dibuat sedemikian rupa untuk memberi kesan pada publik bahwa mereka merasa aman.

Ratusan mahasiswa West Papua yang kuliah di Indonesia pulang ke West Papua. Dalam sejumlah wawancara, mereka mengaku merasa diintimidasi oleh aparat keamanan — karena didatangi terus-menerus atau dipaksa membuat pernyataan bernuansa pro Indonesia⁸²

Aktivistis Buchtar Tabuni dan pimpinan mahasiswa Alexander Gobai ditangkap di Jayapura karena dianggap melakukan makar.

80. CNN Indonesia, 'Kapolri: Benny Wenda, ULMWP dan KNPB Ada di Balik Rusuh Papua', 5 September 2019. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190905142439-20-427817/kapolri-benny-wenda-ulmwp-dan-knpb-ada-di-balik-rusuh-papua>

81. A. Briantika, 'Polisi minta pelemparan ular asrama mahasiswa Papua tak diberitakan', 9 September 2019. <https://tirto.id/polisi-minta-pelemparan-ular-asrama-mahasiswa-papua-tak-diberitakan-ehLQ>

82. I. N. Arifah, 'Ratusan mahasiswa Papua tinggalkan kuliah karena mengaku diintimidasi', 9 September 2019. <https://www.abc.net.au/indonesian/2019-09-09/ratusan-pelajar-dan-mahasiswa-papua-pulang-karena-intimidasi/11490862>

Nduga, Provinsi Papua

Meski masih di bawah operasi militer, masyarakat Nduga tetap melakukan demonstrasi.



10 September 2019

Ribuan orang melakukan demonstrasi solidaritas di Port Moresby, Papua Nugini.

11 September 2019

Di Jayapura, aktivis Stevanus Itlay dan para mahasiswa Hengky Hilapok dan Irwanus Uropmabin ditangkap atas tuduhan makar. Aktivis Nusman Kogoya dan Awen Wenda sempat ditangkap tapi kemudian dilepaskan.

Manokwari, Provinsi Papua Barat

Secara simbolis mahasiswa menutup Universitas Papua, universitas terbesar di provinsi ini. Mereka juga membangun posko darurat untuk menyambut mahasiswa West Papua yang “eksodus” dari Indonesia.



12 September 2019

Yapen, Provinsi Papua Barat

A letter notifying the police of a planned protest against racism and for self-determination was Surat pemberitahuan aksi protes anti-rasisme dan untuk penentuan nasib sendiri yang diajukan masyarakat setempat ditolak pihak kepolisian. Lebih dari enam puluh orang menandatangani pernyataan bahwa mereka tidak akan mengakui penolakan polisi tersebut dan akan tetap berdemonstrasi di jalan pada 16 September. Saat kelompok demonstran ini menyerahkan pernyataan tersebut, tiga orang (SA, AR, PM) langsung ditangkap untuk dimintai keterangan.



14 September 2019

Di Jayapura, rakyat West Papua dilaporkan merasa terintimidasi dan tidak nyaman untuk beraktivitas sehari-hari akibat personel brimob bersenjata lengkap patroli terus-menerus, termasuk di area pemukiman. Kendaraan lapis baja untuk pengangkut personel memasuki Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi (STFT) Fajar Timur.



Kendaraan taktis pengangkut personel di STFT Fajar Timur.

16 September 2019

Yapen, Provinsi Papua Barat

Aparat gabungan TNI dan Polri membubarkan demonstrasi damai dan menangkap Edison Kendi (49), Ayub Rawai (30), dan Patric Maay (37).



Yahukimo, Provinsi Papua

Ribuan demonstran mengibarkan bendera-bendera Bintang Kejora.



17 September 2019

Terjadi kontak senjata antara TPNPB dan aparat gabungan Indonesia di Kabupaten Puncak. Bupati menyayangkan serangan yang dilakukan aparat keamanan yang mengakibatkan korban sipil berjatuhan: 3 tewas tertembak dan 4 luka-luka.⁸³

Global Pan-Africanism Network (GPAN) merilis pernyataan solidaritas untuk rakyat West Papua.

Di Jayapura, aktivis Agus Kossay ditangkap dengan tuduhan makar. Teman seperjalanannya, Donny Itlay, ikut ditangkap atas tuduhan yang direkayasa.

Gerakan Melawan mulai memuat tuntutan pembebasan tahanan politik yang ditangkap selama bulan itu.

83. D. Suwandi, 'Kontak senjata KKB dengan TNI Polri, 3 warga tewas, 4 terluka', 18 September 2019 <https://regional.kompas.com/read/2019/09/18/15375201/kontak-senjata-kkb-dengan-tni-polri-3-warga-tewas-4-terluka>

Bandung, Provinsi Jawa Barat



18 September 2019

Universitas Satya Wiyata Mandala, Nabire, dikepung polisi sejak pagi saat dewan mahasiswa menggelar rapat tentang kepulauan mahasiswa West Papua dari berbagai kota di Indonesia.

Di Jenewa, tujuh NGO internasional menyampaikan intervensi lisan di Debat Umum sesi ke-42 Dewan HAM PBB, tentang situasi HAM di West Papua.

Selain di Sorong, aksi protes berlangsung di tujuh kota di Indonesia, menuntut pembebasan tahanan politik yang ditangkap selama Gerakan Melawan: Jakarta, Yogyakarta, Ternate, Ambon, Minahasa, Makassar, dan Palu.

Sorong, Provinsi Papua Barat

Ratusan personel brimob dan tentara mendatangi sebuah demonstrasi protes yang jumlah massanya hanya puluhan orang. Demonstrasi ini dibubarkan paksa sekitar jam 11.20 waktu setempat. Empat belas orang ditangkap dan sebagian ditahan selama sehari, termasuk Joni Bame, Yheskel Kalasuat, Dolfo Nauw, Abit Yewen, and Yohanis Bame; sedangkan Yoseph Syufi, Rianto Ruruk, Manase Baho, dan Miwak Kareth dikenakan pasal makar.



19 September 2019

Di Jayapura, polisi menyegel sekretariat sebuah organisasi politik, Komite Nasional Papua Barat (KNPB).

Di Yogyakarta, mahasiswa West Papua mengampanyekan perlawanan terhadap rasisme dan menuntut hak menentukan nasib sendiri dalam sebuah pertandingan sepak bola. Aksi itu mereka lakukan sambil menggalang donasi untuk menangani dampak kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan.



Di Timika, aparat keamanan membubarkan sebuah acara penyambutan kepulangan mahasiswa West Papua dari berbagai kota di Indonesia, yang di dalamnya termasuk pesta tradisional "bakar batu". Aparat mengambil alih paksa panggung acara dan mengatakan, "*Tidak boleh ada mobilisasi massa di Timika.*" Posko darurat, yang dibuat untuk menyambut dan mendukung mahasiswa West Papua yang pulang 'eksodus', dihancurkan aparat. Dua puluh tiga mahasiswa yang ditangkap selama sehari pada acara tersebut di antaranya: Yesaya Gobay, Kevin Tabuni, Ronal Tebai, Hosea Pigome, Andi Waine, Nando Edowai, Dendi Payokwa, Henki Yikim, Matias Walela, Ross Koga, Stela Tebai, Noviska Koga, Antinius Wenda (injured), Samuel Yobe, Herman Magal, Berto Yobee, Ardi Murib, Ishak Kadepa, Ongenjep Kogaa, Oskar Kamawoko, Dinus Kiwak, Ariel Nugroko, dan Jhoni Jangkup. Seorang staf LEMASA juga ikut ditangkap.





Salam Papua

Masih di Timika, kapolres setempat mengecat ulang makam pejuang kemerdekaan Kelly Kwalik dengan warna kebangsaan Indonesia: merah dan putih. Sebelumnya, makam itu dicat sesuai motif Bintang Kejora. Dua orang nantinya ditangkap karena mengkritik dua insiden tersebut di Facebook.⁸⁴

Manokwari, West Papua Province

Orang-orang yang berkumpul di kantor DAP dan hendak melakukan aksi demonstrasi, dihadap polisi. Septi Meidogda, koordinator aksi tersebut, telah ditangkap sehari sebelumnya.

Mahasiswa bernama Erik Alitnoe, Thomas Syufi (23), dan MW (23), ditangkap atas tuduhan makar.



84. A. Fatma, 'Hina Kapolres di Facebook, Dua Warga Mimika Terancam Enam Tahun Penjara', 1 October 2019 https://seputarpapua.com/view/8670-hina_kapolres_di_facebook_dua_warga_mimika_terancam_enam_tahun_penjara.html

20 September 2019

Mahasiswa bernama Pende Mirin ditangkap di Manokwari karena dituduh makar.

21 September 2019

Mahasiswa bernama Yunus Aliknoe ditangkap di Manokwari karena dituduh makar.

23 September 2019

Hari ini menjadi hari paling berdarah sepanjang Gerakan Melawan. Setidaknya 46 orang terbunuh dan 148 orang luka-luka di Wamena dan Jayapura, hingga menyebabkan pengungsian massal.

Wamena, Provinsi Papua



"Berhenti rasisme di Papua.
Kami bukan monyet."

Investigasi kolaboratif antara *The Jakarta Post*, *Jubi*, dan *Tirto.id* yang mendapat penghargaan, melaporkan bahwa setidaknya 43 orang meninggal dunia pada hari itu. Sementara, laporan resmi pemerintah menyatakan hanya 23 orang yang meninggal. Laporan resmi itu pun gagal mengungkap bahwa mereka meninggal akibat luka tembak.

Jumlah orang yang mengalami luka tidak diketahui pasti. Orang-orang West Papua takut dirawat di rumah sakit sebab banyak orang West Papua yang ditangkap di rumah sakit. Mereka juga enggan pergi ke rumah sakit karena saking banyaknya aparat yang berjaga di sana. Laporan resmi pemerintah menyatakan jumlah korban yang mengalami luka adalah 77 orang.⁸⁵

Kronologi di bawah ini merupakan ringkasan dari investigasi kolaboratif tiga media tersebut, yang menjadi laporan independen paling komprehensif yang tersedia terkait peristiwa ini.⁸⁶ Penulis menambahkan beberapa detil minor dan foto-foto berdasarkan hasil pemantauannya.

Peristiwa ini bermula dari makian rasialis. Pada 18 September 2019, seorang guru asal Indonesia menyebut “monyet” pada seorang siswanya, orang asli West Papua. Pihak sekolah sudah berusaha menengahi masalah ini beberapa pekan setelahnya tapi gagal.

Pagi hari 23 September, ratusan siswa SMA melakukan aksi demonstrasi di Wamena. Dalam rekaman video, sebelum kerusuhan terjadi, sejumlah siswa SMP dan SD tampak ikut serta dalam aksi. Mereka mengutuk rasialisme dan meneriakkan “Papua Merdeka”.

Aksi berakhir rusuh setelah Kellon Tabuni, seorang siswa yang baru pulang dari Manado, ditembak hingga tewas oleh aparat keamanan. Massa yang marah membawa jasadnya sambil membakar bangunan yang

85. D. Halim, ‘Rusuh di Wamena, Polri: 23 meninggal dunia dan 77 orang luka-luka’, 24 September 2019 <https://nasional.kompas.com/read/2019/09/24/13075211/rusuh-di-wamena-polri-23-meninggal-dunia-dan-77-orang-luka-luka?page=all>

86. V. Mambor and S. Bachyul, ‘Wamena investigation: What the government is not telling us’, 26 November 2019. <https://www.thejakartapost.com/longform/2019/11/26/wamena-investigation-what-the-government-is-not-telling-us.html>



salah satu dari banyak pelajar SMA yang terluka akibat dibubarkan aparat keamanan



mereka lalui. Banyak warga pendatang yang tewas karena terjebak di dalam bangunan.

Kisah dan foto-foto heroik orang-orang West Papua yang membantu dan melindungi warga pendatang kemudian bermunculan. Menurut penduduk setempat, baik warga West Papua maupun pendatang, mereka tidak mengenal muka orang-orang yang merusak. Karena Wamena adalah kota kecil, kesaksian mereka menyiratkan bahwa para perusuh berasal dari luar Wamena. Siapa para perusuh itu sebenarnya masih menjadi misteri hingga hari ini.



Minggu berikutnya, situasi di Wamena semakin tegang karena Wamena semakin termiliterisasi. Warga pendatang mempersenjatai diri, berjaga di rumah-rumah mereka dan di jalan-jalan sambil membawa parang dan tongkat besi.⁸⁷ Sebelas ribu orang pergi meninggalkan kota ini.⁸⁸ Para pendatang dibantu pemerintah dengan cara dibuatkan posko sementara atau dipulangkan ke kampung halaman di luar West Papua. Banyak orang West Papua—yang jumlahnya tidak terdokumentasi—juga mengungsi ke desa tetangga atau hutan.

Pada November 2019, seorang anggota dewan legislatif lokal yang berasal dari West Papua mengatakan, banyak siswa yang tidak pergi ke sekolah karena takut ditangkap dan dijadikan tersangka sebagaimana dialami sebagian kawan-kawannya, sementara aktor utama di balik kerusuhan masih tidak teridentifikasi.⁸⁹ Menurut laporan yang terbit pertengahan Januari 2020,⁹⁰ di satu sekolah saja, tercatat ada 82 siswa yang keluar lalu pindah ke sekolah lain—kemungkinan ke luar Wamena. Sementara, di sekolah lain, hanya seperempat siswa tetap datang ke sekolah.

Nama-nama 17 orang West Papua yang tewas akibat luka tembak di bawah ini, dikutip dari laporan investigasi kolaboratif tiga media di

87. K. Lamb et al., 'I feel like I'm dying': West Papua witnesses recount horror of police shootings; 27 September 2019. <https://www.theguardian.com/world/2019/sep/28/i-feel-like-im-dying-west-papua-witnesses-unrest-indonesia-police>

88. CNN Indonesia, '11 Ribu Orang Tinggalkan Wamena Pasca kerusuhan'; 3 October 2020. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191003101343-20-436293/11-ribu-orang-tinggalkan-wamena-pascakerusuhan>

89. A. Pademme, 'Legislatur Papua: Siswa SMA di Wamena tak sekolah, khawatir ditangkap'; 3 November 2019. <https://jubi.co.id/legislatur-papua-siswa-sma-di-wamena-tak-sekolah-khawatir-ditangkap/>

90. Adisubrata, 'Sebanyak 82 siswa SMA Negeri 1 Wamena pindah sekolah'; 13 January 2020. <https://jubi.co.id/sebanyak-82-siswa-sma-negeri-1-wamena-pindah-sekolah/>

atas dan Dewan Adat Papua: Ketron Kogoya, Eles Himan, Yus Asso, Nison Lokbere, Marius Wenda, Manu Meage, Elakim Wetapo, Gestanus Hisage, Kelion Tabuni, Naligi Wenda, Lawan Hesegem, Nisaba Himan, Inius Tabuni, Beam Wenda, Naligin Yikwa, Wenas Babingga, dan Yandrik Wenda.

Keluarga korban membawa jasad mereka untuk dikremasi. Beberapa bahkan langsung dibawa keluarga dari lokasi kejadian.

Nama-nama 23 warga pendatang yang tewas karena terjebak dalam bangunan yang terbakar atau penusukan, dirilis polisi dan diberitakan harian *Kompas*⁹¹: Muh Subhan, Yohanis Karangan, Sofyan, Rahul, Riski, Anto, Yapet, Hendra, Linda, Ibnu, Yoga, Iwan, Rustam, Irma, Ilmi, Erwin, Untung, Bambang, dr. Soeko Masetyo, Ari Nurdani, Risda, dan Yunus Todingbua.

Jayapura, Papua

Sejumlah mahasiswa di Universitas Cenderawasih melakukan pemogokan dan mendirikan posko darurat bagi mahasiswa yang eksodus dari Jawa dan daerah lain. Ratusan polisi dan tentara datang mengepung kampus dan, dengan kekuatan penuh, membubarkan acara mahasiswa itu. Tiga wartawan lokal, Benny Mawel, Hengky Yeimo, dan Ardi Bayage, mengalami intimidasi dan dilarang meliput peristiwa tersebut.



Ratusan mahasiswa jadi sasaran tindakan yang merendahkan selama ditahan di dalam universitas.

91. J. R. Purba, 'Daftar Nama 31 Korban Tewas Kerusuhan Wamena', 26 August 2019. <https://regional.kompas.com/read/2019/09/26/15401191/daftar-nama-31-korban-tewas-kerusuhan-wamena>

Seorang prajurit TNI tewas, sementara empat mahasiswa West Papua ditembak hingga tewas:



Yery Murib: Lahir di Jugu, 1 Juli 1996. Ia tengah menjalani semester akhir di jurusan sosiologi dan politik di Universitas Sam Ratulangi, Manado, Sulawesi Utara. Ia pulang ke West Papua untuk bergabung dengan pemogokan bersama mahasiswa lain, dan ia tewas ditembak.

Ason Mujizau: lahir di Joambili, 14 Mei 1999. Ia aktif dalam perjuangan kemerdekaan sejak SMA dan pernah ditangkap polisi beberapa kali. Ia baru saja memulai semester pertamanya di jurusan teknik elektro di Universitas Cenderawasih, tempat ia tewas ditembak. Kaki kirinya pun patah dan tubuhnya luka-luka.



Hermanus Wosareak: lahir di Tawelma, 4 Agustus 2003. Anak sulung dari enam bersaudara ini masih kelas dua SMA saat tewas ditembak. Orang tuanya berprofesi sebagai petani di Kenyam, Kabupaten Nduga. Ia pindah ke Jayapura untuk mewujudkan mimpi menjadi guru di desanya.



Otier Wenda: mahasiswa di Universitas Trunojoyo, Madura. Ia tewas ditembak setelah bergabung dengan pemogokan bersama mahasiswa lainnya.



Penggunaan kekuatan aparat yang berlebihan juga telah melukai 70 orang lainnya, yaitu:

1. **Seripen Wasiangge** (15): dipukul di kaki kiri
2. **Lagios Gwijangge** (19): luka ringan
3. **Intanus Gwijangge** (20): dipukul di lengan bagian belakang
4. **Lamananus Kogoya** (19): luka ringan
5. **Dolias Gwijangge** (18): luka ringan
6. **Elies Wenda** (23): luka ringan di bagian pinggang
7. **Emon Tabuni** (19): luka ringan di kepala
8. **Andianus Wasiangge** (23): luka ringan
9. **Samuel Elopere** (23): luka ringan di kepala
10. **Ney Gwijangge** (15): luka ringan di kepala
11. **Neba Gwijangge** (15): luka di tulang belakang
12. **Jefri Tabuni** (18): luka-luka di bagian telinga
13. **Ebenut Nimingge** (17): luka-luka di bagian kepala dan punggung
14. **Salita Karunggu** (20): luka di bagian siku
15. **Engedalak Gwijangge** (24): dipukul tiga kali di kaki dan dada
16. **Janus Yelipele** (18): dipukul di paha, lutut, dan telinga, betisnya terkena peluru
17. **Nerko** (20): dipukul baton di bagian telinga dan punggung
18. **Timius Gwijangge** (22): hidung dan tulang rusuk berkali-kali ditendang menggunakan sepatu bot militer dan cambuk karet
19. **Jiro Arabo** (24): berkali-kali dipukul menggunakan cambuk karet
20. **Betna Kogoya** (18): diinjak dan terkena gas air mata
21. **Osita Gwijangge** (17): diinjak, terkena gas air mata, dan dibanting ke dinding
22. **Erento Kogoya** (17): dipukuli cambuk karet di leher dan punggung
23. **Jeminus Nimiangge** (22): tulang rusuk diinjak dengan sepatu bot militer dan dipukul dengan cambuk karet di punggung
24. **Imanus Gwijangge** (15): iga dipukul berulang kali dengan cambuk karet dan ditendang di bagian mulut
25. **Rdin Tabuni** (15): dipukul berulang kali di bagian punggung dengan cambuk karet, ditendang di bagian perut, dipukul menggunakan baton di kepala
26. **Rantinus Ubruangge** (21): dipukul di kepala, punggung, paha dengan cambuk karet, ditendang dengan sepatu bot militer
27. **Jini Tabuni** (19): punggung dipukul berulang kali dengan cambuk karet, ditendang di kepala sampai ke otak kecil
28. **Ilem Kogoya** (22): punggung dan kepala dipukul berulang kali dengan cambuk karet dan ditendang sepatu bot militer
29. **Sena Gwijangge** (19): ditendang di punggung
30. **Ndince Lokbere** (19): ditendang di punggung
31. **Anni Unve** (19): ditendang dan terkena gas air mata
32. **Atena Libid** (19): ditendang dan terkena gas air mata
33. **Yepri Tabuni** (21): punggung dipukul dengan cambuk karet, ditendang dan diinjak dengan sepatu bot tentara
34. **Weko Kogoya** (24): punggung dipukul dengan cambuk rotan, kepala ditendang, mata dan rusuk dipukul dengan popor senapan
35. **Inta Gwijangge** (24): ditendang dan terkena gas air mata
36. **Timanus Gwijangge** (15): ditendang di bagian perut
37. **Yemi Murib** (16): dipukul di bagian belakang kepala (luka berat)
38. **Andikece Lokobere** (19)
39. **Maike Tabuni** (22): kepala terluka parah karena dipukul dan terkena gas air mata
40. **Intanus Gwijangge** (24): badan dan kepala dipukuli
41. **Seras Tabuni** (18): dipukul di bagian punggung sebanyak tiga kali
42. **Eme Kelmea**: dipukul di punggung
43. **Tatos Telenggen**: dipukul dengan keras di kepala dan punggung
44. **Ilipus Gwijangge**: cedera ringan di kepala karena dipukul, ditendang di lutut
45. **Nosmir**: dipukul dengan cambuk di punggung
46. **Nesal Gwijangge**: dipukul di punggung
47. **Roby Mijele**: lengan kanan terluka parah setelah terkena peluru karet

48. **Tilvons Libid:** dipukul di punggung dan kaki
49. **Robert Gwijangge:** terluka parah karena dipukul di dada
50. **Joince Wanimbo:** luka ringan karena dipukul
51. **Judimince Gwijangge:** dipukul di kepala
52. **Matius Karunga:** dipukul dan ditendang paha kanan
53. **Pelentinus Tabuni:** dipukul dengan keras di kepala dan punggung
54. **Nebon Kogoya:** luka parah di bagian pinggang karena dipukuli
55. **Fanya Gwijangge:** terkena peluru karet di lengan kanan
56. **Pison Kogoya:** luka berat karena dipukul dengan cambuk karet di bagian kepala dan punggung
57. **Minget Nirigi:** dipukul dengan cambuk karet di punggung
58. **Seri Gwijangge:** dipukul dengan cambuk karet di kepala dan ditendang di wajah juga lutut
59. **Wenebot Kogoya:** dipukul di punggung
60. **Atenus Lokbere:** dipukul di wajah dan punggung
61. **Carles Gwijangge:** luka ringan karena dipukul
62. **Boaz Murib:** dipukul di kepala dan punggung
63. **Pinus Nirigi:** dipukul di bagian punggung
64. **Ranus Gwijangge:** dipukul dengan cambuk karet di punggung dan ditendang di paha kanan
65. **Elami Gwijangge:** ditendang di bagian punggung dan dipukul di bagian dada
66. **Gibson Kogoya:** luka berat karena dicambuk
67. **Nilem Kogoya:** dicambuk di kepala dan punggung
68. **Lus Kogoya:** dipukul di punggung
69. **Niki Gwijangge:** dipukul di punggung dan kaki
70. **Jekson Tabuni:** dipukul di punggung dan wajah

Sementara, 733 orang West Papua ditangkap dan dibebaskan lagi keesokan harinya jam 14.30 waktu setempat. Empat mahasiswa pingsan setelah dibebaskan. Namun, tiga belas orang tetap dari ratusan orang itu tetap ditahan, termasuk: Assa Asso, Yogi Wenda, Jembrif Kogoya, Abraham Dote, Elimus Bayage, dan Yandu Kogoya.



24 September 2019

Puluhan ribu orang Indonesia turun ke jalan-jalan, menolak sejumlah rancangan undang-undang yang dianggap buruk dan mendukung sejumlah isu progresif lainnya. Satu dari tujuh tuntutan utama mereka adalah: "Hentikan militerisme di Papua dan wilayah lain, segera bebaskan tahanan politik Papua!"

Di Yalimo, Provinsi Papua, kantor bupati setempat dibakar oleh orang tidak dikenal pada malam hari. Tampaknya kejadian dipicu masalah beasiswa yang dijanjikan pemerintah setempat.

25 September 2019

Di Jayapura, ratusan mahasiswa dan pelajar turut serta dalam prosesi pemakaman Yeri Murib (23) dan Hermanus Wesareak (17), yang ditembak mati aparat keamanan pada 23 September. Peti jenazah mereka berdua dibalut bendera Bintang Kejora.

Di Timika, akibat trauma, sejumlah pelajar panik dan melarikan diri saat aparat keamanan mendatangi sekolah mereka untuk menyampaikan pidato.

26 September 2019

Di Intan Jaya, kota kelahiran Ason Mujizau (29) yang tewas ditembak pada 23 September di Jayapura, ratusan orang turut serta dalam prosesi pemakaman Ason saat jasadnya tiba di bandara.



Di Oksibil, 150 toko, termasuk rumah penduduk, hangus terbakar.⁹² Enam orang kemudian ditangkap dan diadili hingga tingkat pengadilan.



92. C. S. Budi (ed.) '4 Fakta Kerusuhan di Oksibil, 150 Kios Terbakar hingga Situasi Sudah Kondusif', 27 September 2019
<https://regional.kompas.com/read/2019/09/27/15512571/4-fakta-kerusuhan-di-oksibil-150-kios-terbakar-hingga-situasi-sudah-kondusif>

Di Manokwari, seorang pengacara HAM West Papua yang terkenal, Yan Warinussy, yang sedang mendampingi para mahasiswa yang dikenakan pasal makar, dipanggil pihak kepolisian. Sementara di Jakarta, seorang wartawan dan pembuat film dokumenter terkenal, Dandhy Laksono, ditangkap selama beberapa jam atas twit-nya tentang West Papua.

Foto-foto saat personel brimob berpatroli dengan senjata lengkap di dalam Universitas Cenderawasih dan wilayah pemukiman di Jayapura mulai bermunculan.



27 September 2019

Aksi protes yang dilakukan di Dili, Timor Leste, dan di Yogyakarta, Indonesia, turut menuntut pembebasan tahanan politik West Papua yang sudah ditangkap sejauh ini.

Yogyakarta, Provinsi Yogyakarta



30 September 2019

“Ilaga Siaga satu” menjadi berita utama di koran lokal West Papua hari itu. Konflik bersenjata antara aparat keamanan Indonesia dan TPNPB meningkat sedemikian rupa, hingga bupati setempat menyatakan kekhawatirannya atas keamanan warga sipil.

Sebuah demonstrasi di Merauke menandai aksi protes terakhir Gerakan Melawan. Demonstran mengutuk rasisme dan meminta mahasiswa West Papua yang tengah menjalani studi di Jawa dan daerah lainnya – yang kerap mengalami intimidasi – agar pulang ke tanah air.



LAMPIRAN 3

**DAFTAR ORANG
INDONESIA
YANG DIADILI**

Orang Indonesia yang diadili karena melakukan tindakan rasis dan kekerasan terhadap orang West Papua hanya yang terkait dengan dua insiden saja: insiden rasis di Surabaya yang memicu Gerakan Melawan dan pembunuhan Evertin Mofu di Jayapura. Mayoritas masyarakat West Papua merasa tidak puas dengan vonis atas kasus yang disebut pertama, sementara keluarga Evertin Mofu merasa tidak mendapat keadilan setelah mengetahui vonis yang dijatuhkan hakim.⁹³ Secara keseluruhan, hanya lima prajurit TNI yang diinvestigasi serta tujuh warga sipil yang diadili, dan tidak ada satu pun anggota polisi yang diinvestigasi.

Surabaya, Provinsi Jawa Timur

Atas ujaran kebencian dan tindakan rasis terhadap mahasiswa Papua pada 16 Agustus 2019 yang memicu Gerakan Melawan:

Lima anggota TNI dari Komando Rayon Militer (Koramil) Tambaksari 0831/02, termasuk Danramil Mayor Inf NH Irianto, dinyatakan diskors pada 26 Agustus 2019 – hari kedelapan Gerakan Melawan – karena tindakan mereka dianggap tidak mencerminkan komunikasi sosial yang persuasif. Dua di antara mereka dianggap melanggar pasal 103 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) tentang indisipliner dan penyalahgunaannya akan dilakukan di pengadilan militer.⁹⁴ Hasil investigasi dan nama-nama anggota TNI tersebut tidak pernah diungkap ke publik, kecuali Mayor Irianto. Masa skorsing yang ditetapkan pun tidak jelas. Pihak militer menolak menginvestigasi anggotanya atas tuduhan bertindak rasis, dan mengalihkan beban investigasi perkara kepada pihak kepolisian untuk menemukan siapa yang telah meneriakkan makian rasis.⁹⁵

Pencarian online di Direktori Putusan Pengadilan Militer Surabaya III-12 menunjukkan bahwa hanya satu prajurit yang pernah disidang terkait kasus ini. Dalam putusan bernomor registrasi 17-K/PM.III-12/AD/I/2020 itu dinyatakan,⁹⁶ Serda Unang Rohana divonis terbukti bersalah “dengan sengaja tidak menaati suatu perintah dinas” sebagaimana diatur pasal 103 ayat (1) KUHPM, karena ia sebagai tentara malah langsung menghadapi mahasiswa West Papua di saat ada petugas kepolisian di tempat yang sama. Ia divonis dua bulan pidana percobaan. Artinya, ia tidak dijejaskan ke penjara, kecuali bila di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain karena terpidana melakukan suatu tindak pidana atau melakukan pelanggaran disiplin yang lain selama periode empat bulan.

Selanjutnya, tiga orang sipil Indonesia ditangkap dan diputus bersalah oleh Pengadilan Negeri Surabaya:

93. A Flassy, “Pembunuh Evertin Mofu dihukum 3 tahun penjara, keluarga korban kecewa”, 18 Februari 2020 <https://jubi.co.id/pembunuh-evertin-mofu-dihukum-3-tahun-penjara-keluarga-korban-kecewa/>

94. BBC Indonesia, “Mengapa dua prajurit TNI dikenai pasal indisipliner dan bukan tuduhan rasialis?”, 29 Agustus 2019 <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-49506886>

95. A P Taher, “5 Anggota TNI Diskors Terkait Insiden Asrama Papua Surabaya”, 26 Agustus 2019 <https://tirto.id/5-anggota-tni-diskors-terkait-insiden-asrama-papua-surabaya-egZ5>

96. Pengadilan Militer III-12 Surabaya, Direktori Putusan Dilmil III-12 Surabaya 17-K/PM.III-12/AD/I/2020, 28 January 2020 <http://putusan.dilmil-surabaya.go.id/typography-mainmenu-27.html>

Tri Susanti ditangkap pada 3 September 2019.⁹⁷ Ia adalah anggota Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan TNI/Polri (FKPPI), yang kemudian gara-gara kasus ini keanggotaannya dicabut. Ia berperan dalam mengumpulkan massa ke depan asrama Kamasan III, dengan cara menyebarkan pesan bahwa para mahasiswa West Papua telah merusak bendera dan mematahkan tiang bendera, serta melawan balik menggunakan senjata tajam. Jaksa menuntut hukuman penjara selama satu tahun. Pada 3 Februari 2020, ia terbukti bersalah karena menyebarkan hoaks yang meresahkan masyarakat. Ia dihukum tujuh bulan penjara karena melanggar pasal 14 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).⁹⁸

Syamsul Arifin ditangkap pada 3 September 2019 bersama Tri Susanti.⁹⁹ Ia merupakan seorang pegawai negeri yang terekam meneriakkan makian “monyet” pada mahasiswa West Papua. Jaksa menuntutnya hukuman penjara selama delapan bulan. Ia terbukti bersalah karena melakukan ujaran kebencian berdasarkan pasal 16 Undang-Undang No. 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Ia divonis hukuman lima bulan kurungan penjara pada 30 Januari 2020. Ia bebas pada hari ketika putusan dibacakan karena telah menjalani masa tahanan selama lima bulan.¹⁰⁰

Andria Adiansyah (26) ditangkap pada 5 September 2019 karena menyebarkan hoaks.

¹⁰¹ Youtuber itu mengunggah video lama tertanggal 17 Juli 2016, dan mengatakan bahwa kejadian dalam video itu merupakan insiden yang terjadi pada 16 Agustus 2019 dengan judul “Menolak Bendera Merah Putih, Asrama Papua Digeruduk Warga”. Jaksa menuntut hukuman penjara selama satu tahun. Ia divonis sepuluh bulan penjara pada 3 Februari 2020 karena melanggar pasal 15 ayat (1) KUHP.

Jayapura, Provinsi Papua

Atas pembunuhan seorang warga asli West Papua bernama Evertin Mofu pada 30 Agustus 2019.

Nasrul (18) dan Irwan (18) ditangkap pada 18 September 2019. Pengadilan Negeri Jayapura memvonis mereka bersalah karena secara bersama-sama melakukan tindak kekerasan hingga menyebabkan kematian, sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (2) nomor 3 KUHP. Mereka divonis tiga tahun penjara pada 18 Februari 2020. Keduanya mengajukan banding pada 24 Februari 2020. Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura pada 30 April 2020.

MGR (16) dan AI (17) juga ditangkap pada 18 September 2019. Pengadilan Negeri Jayapura yang bertindak sebagai Pengadilan Anak, menyatakan mereka bersalah karena secara bersama-sama melakukan tindak kekerasan hingga menyebabkan kematian, sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (2) nomor 3 KUHP. Mereka divonis sebelas bulan penjara pada 28 November 2020.

97. CNN Indonesia, “Tri Susanti dan ASN Tersangka Rasial Asrama Papua Ditahan”, 3 September 2019 <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190903135655-12-427124/tri-susanti-dan-asn-tersangka-rasial-asrama-papua-ditahan>

98. A Baihaqi, “Mak Susi Terdakwa Kasus Rasisme Mahasiswa Papua Divonis 7 Bulan Penjara”, 3 Februari 2020 <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4884333/mak-susi-terdakwa-kasus-rasisme-mahasiswa-papua-divonis-7-bulan-penjara>

99. G Salman and A Ika, “Tri Susanti dan Syamsul Arifin Resmi Ditahan Sebagai Tersangka Kasus Kerusuhan di Asrama Papua”, 3 September 2019 <https://surabaya.kompas.com/read/2019/09/03/16210041/tri-susanti-dan-syamsul-arifin-resmi-ditahan-sebagai-tersangka-kasus>

100. CNN Indonesia, “ASN Terdakwa Rasisme Mahasiswa Papua Divonis 5 Bulan Penjara”, 30 Januari 2020 <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200130120710-12-470110/asn-terdakwa-rasisme-mahasiswa-papua-divonis-5-bulan-penjara>

101. I Safutra, “Giliran YouTuber Jadi Tersangka Rasisme, Akses Internet di Papua Mulai Dibuka”, 6 September 2019 <https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/06/09/2019/giliran-youtuber-jadi-tersangka-rasisme/>

LAMPIRAN 4



DAFTAR TAHANAN POLITIK WEST PAPUA



Sepanjang Gerakan Melawan, tercatat ada 1.017 penangkapan. Sebagian besar orang yang ditangkap kemudian dibebaskan, tetapi 157 orang di antaranya dikenakan pasal. Dari mereka yang dijadikan tersangka, 122 di antaranya diadili. Bagian pertama lampiran ini merinci 22 orang yang didakwa melakukan makar, sedangkan bagian kedua akan menguraikan 135 tahanan politik yang dituduh melakukan kejahatan selain makar. Mereka yang tidak diadili tapi dijadikan tersangka tetap dimasukkan ke dalam daftar di bawah ini, karena selama status tersangkanya belum dicabut, mereka bisa sewaktu-waktu ditangkap.

Orang-orang dalam laporan ini telah dijatuhi hukuman mulai dari 3 bulan 14 hari hingga 10 tahun penjara. Semuanya telah bebas kecuali enam tahanan politik yang masih berada di balik jeruji besi di Wamena. Sebagian besar tapol bebas setelah menjalani hukuman penuh, kecuali mereka yang dituntut atas dakwaan selain makar, bebas lebih awal karena kebijakan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Indonesia terkait Covid-19. Menurut kebijakan Kemenkumham itu, selama pandemi Covid-19, narapidana yang telah menjalani setidaknya dua pertiga hukuman, memenuhi syarat untuk masuk program “asimilasi” atau pembebasan bersyarat. Di bawah ini kami merinci individu-individu yang ditangkap, mulai dari nama lengkap, tanggal penangkapan, alasan penangkapan, tuntutan jaksa, pasal yang digunakan, putusan, tanggal putusan, dan tanggal pembebasan. Tiga tahanan politik adalah orang Indonesia yang ditarget atas keterlibatan mereka dalam Gerakan Melawan.

Tahanan Politik yang Didakwa Makar

Kesemua 22 tahanan politik yang didakwa makar dan ditahan di lima kota selama Gerakan Melawan telah bebas setelah menjalani hukuman penuh. Mereka semua adalah aktivis non-kekerasan. Dari jumlah tersebut, lima orang dinyatakan bersalah melakukan penghasutan, bukan makar. Para jaksa menuntut hukuman penjara kurang dari satu tahun setengah, kecuali bagi mereka yang ditahan di Balikpapan – yang dianggap sebagai dalang Gerakan Melawan – dituntut hukuman bertahun-tahun. Namun akhirnya, semua dijatuhi hukuman antara delapan sampai sebelas bulan penjara, hukuman yang sangat rendah untuk sebuah kejahatan yang hukuman maksimalnya mencapai dua puluh tahun penjara. Kecuali mereka yang di Balikpapan, semua dibebaskan beberapa hari atau minggu setelah putusan dijatuhkan.

JAKARTA – Enam Tahanan Politik

Enam tahanan politik – lima ditahan di Rutan Salemba dan satu di Rutan Pondok Bambu – ditangkap terkait aksi protes yang disertai pengibaran bendera Bintang Kejora di depan Istana Negara, 28 Agustus 2019. Mereka semua didakwa dengan pasal 106 dan 110 KUHP. Sidang pertama dimulai pada 15 Desember 2019. Pada 13 April 2020, jaksa menuntut mereka dihukum penjara satu tahun lima bulan, kecuali Isay Wenda, yang dituntut jaksa sepuluh bulan penjara. Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman sembilan bulan penjara untuk lima terdakwa dan delapan bulan penjara untuk Isay Wenda.

Isay Wenda dibebaskan pada 28 April 2020, Ariana Elopere pada 27 Mei 2020, dan empat lainnya pada 26 Mei 2020. Lima yang disebut terakhir sempat dipertimbangkan untuk bebas lebih awal pada 12 Mei 2020, tapi dibatalkan pada menit-menit terakhir karena ada intervensi politik. Sore hari tanggal 11 Mei, lima narapidana itu menandatangani 'surat eksekusi' putusan. Malam harinya, penjamin mereka menandatangani surat asimilasi. Penjamin Suryanta, Dano Tabuni, dan Ambrosius Mulait adalah Pendeta Suarbudaya Rahadian. Penjamin Charles Kossay adalah saudara perempuannya, Sati Kossay.

Siang hari 12 Mei, para tahanan menandatangani surat berstempel yang mengonfirmasi pembebasan "asimilasi" mereka. Setelah menerima hasil rapid test Covid-19 mereka yang non-reaktif, pihak rutan kemudian memberi mereka nasi dan mi instan untuk dibawa pulang. Para narapidana kemudian menunggu sekitar 30 menit sebelum dipanggil oleh Pak Pantje, Kepala Bagian Registrasi Rutan Salemba. Ia meminta maaf sebab, menurutnya, empat tahanan tersebut tidak berhak bebas lebih awal karena dakwaan mereka makar, bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 99 Tahun 2012.¹⁰² Pihak Rutan mengatakan baru menyadari hal itu setelah dijelaskan oleh pihak Kemenkumham RI.

1. **Charles Kossay and Dano Tabuni**, aktivis mahasiswa West Papua, ditangkap tanpa surat perintah pada 30 Agustus 2019 di Depok, Jawa Barat. Saat penangkapan, seorang petugas polisi menodongkan senjata ke arah Charles, Dano, dan kawan-kawannya seasrama.

102. Pasal 36 PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan mengatur bahwa Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dapat memperoleh rekomendasi mengenai hukuman dari kepolisian, badan anti-terorisme nasional, dan/atau kejaksan agung dalam mengizinkan asimilasi bagi narapidana terorisme, kejahatan terhadap negara, kejahatan transnasional, dan pelanggaran HAM berat.

2. **Ambrosius Mulait** adalah aktivis mahasiswa West Papua dan Ketua Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua Se-Indonesia (AMPTPI). Ambros ditangkap pada 31 Agustus 2019, saat bersama puluhan mahasiswa Papua lainnya melakukan aksi protes di depan Polda Metro Jaya, menuntut pembebasan Charles Kossay dan Dano Tabuni.
3. **Isay Wenda** adalah aktivis mahasiswa West Papua yang ditangkap pada 31 Agustus 2019 saat mengikuti aksi protes bersama Ambros dan kawan-kawannya.
4. **Paulus "Suryanta" Ginting** adalah Juru Bicara Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP), sebuah organisasi yang secara damai mengadvokasi hak penentuan nasib sendiri rakyat West Papua, dan ditangkap pada 31 Agustus 2019. Surya adalah orang Indonesia pertama yang dituduh melakukan makar sehubungan dengan gerakan penentuan nasib sendiri West Papua
5. **Ariana Elopere** ditangkap tanpa surat perintah pada 31 Agustus 2019. Ketika ia minta izin mengganti pakaiannya, seorang petugas polisi menolak permintaannya sambil mengatakan, "Kamu orang Papua biasanya tidak pakai baju" – sebuah komentar rasis terhadap orang asli West Papua. Dia adalah satu dari hanya tiga perempuan West Papua yang didakwa makar sejak tahun 2000.

BALIKPAPAN – Tujuh Tahanan Politik

Tujuh tahanan politik yang ditahan di Balikpapan adalah aktivis kunci di United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dan Komite Nasional Papua Barat (KNPB), serta para pemimpin organisasi mahasiswa. Mereka ditangkap antara 6-17 September 2019, setelah aksi protes di Jayapura yang disertai pengibaran Bintang Kejora dan tuntutan referendum kemerdekaan. Pada 4 Oktober 2019, tanpa pemberitahuan pada pengacara dan/atau keluarga, mereka dipindahkan dari Papua ke Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dengan alasan "keamanan". Pemindahan ini secara signifikan meningkatkan biaya bantuan hukum selama persidangan, juga memutus para narapidana dari keluarga dan sumber dukungan lainnya. Persidangan dimulai pada 11 Februari 2020 dan selalu dijaga oleh puluhan polisi Indonesia.

Hukuman yang dituntut jaksa terbilang tinggi sehingga menyebabkan kemarahan dan protes di West Papua. Ketika mereka bebas, pemerintah menolak menerbangkan mereka kembali ke West Papua sehingga mereka harus mengeluarkan biaya perjalanan yang besar, terutama di masa pandemi. Lebih dari seribu orang menyambut mereka dalam sebuah upacara penyambutan ketika mereka tiba di West Papua pada 22 Agustus 2020.

1. **Agus Kossay** adalah Ketua KNPB dan dituduh sebagai aktor intelektual di balik Gerakan Melawan. Ia ditangkap tanpa surat perintah pada 17 September 2019. Ia menginstruksikan KNPB agar berpartisipasi secara damai dalam aksi protes di Jayapura, 19 Agustus 2019. Sehari sebelum aksi, Agus bersama anggota organisasinya dan para aktivis mahasiswa, membagikan pamflet untuk mengajak masyarakat bergabung dalam aksi tersebut. Ia dijerat pasal 106 dan 110 KUHP, selain pasal 160 KUHP dan pasal 82 (2) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Jaksa menuntut ia dihukum penjara selama 15 tahun, tetapi ia akhirnya hanya dijatuhi hukuman sebelas bulan penjara dan bebas pada 12 Agustus 2020.
2. **Buchtar Tabuni** adalah salah satu pemimpin kunci di gerakan kemerdekaan West Papua, saat ini menjabat sebagai Ketua Parlemen Nasional West Papua. Ia juga dituduh sebagai dalang di balik Gerakan Melawan. Ia ditangkap tanpa surat perintah pada 9 September 2019. Walau Tabuni tengah berkecukupan pada saat ditangkap, penangkapannya melibatkan kekuatan aparat bersenjata yang sangat tidak proporsional, termasuk penggunaan helikopter, pemutusan aliran listrik. Aparat menyerbu properti dan menembak melalui pintu. Buchtar memberi tahu pengacaranya, pada 15 Agustus 2019 ia membuat pernyataan publik di akun Facebook-nya bahwa ia tidak akan terlibat dalam aksi protes anti-rasisme karena tidak percaya aksi tersebut akan membantu perjuangan kemerdekaan. Buchtar dijerat pasal 106 dan 110 KUHP, selain pasal 160. Ini adalah kali ketiga Buchtar dipenjara karena aktivitas politiknya. Jaksa menuntut hukuman selama 17 tahun penjara, tapi ia hanya dijatuhi hukuman sebelas bulan dan bebas pada 4 Agustus 2020.

3. **Alexander Gobay** adalah ketua badan mahasiswa di Universitas Sains dan Teknologi Jayapura dan ditangkap tanpa surat perintah pada 6 September 2019. Alexander memimpin mahasiswa dari kampusnya pada aksi protes 19 Agustus 2019, sebelum melakukan perjalanan ke Surabaya, Jawa Timur, dan kembali ke Jayapura untuk aksi protes 29 Agustus 2019, momen saat ia menyampaikan orasi dan dipilih sebagai koordinator aksi oleh demonstran lainnya. Ia didakwa berdasarkan pasal 106 dan 110 KUHP. Jaksa menuntutnya dihukum sepuluh tahun penjara, tapi ia dijatuhi hukuman sepuluh bulan penjara dan bebas pada 2 Juli 2020. Ia melanjutkan posisinya sebagai pemimpin organisasi mahasiswa di universitasnya.
4. **Ferry Gombo** adalah ketua badan mahasiswa di universitas negeri terbesar di provinsi Papua, Universitas Cenderawasih. Ia ditangkap tanpa surat perintah pada 6 September 2019. Ferry menggelar rapat terkait pelaksanaan aksi protes 19 Agustus 2019, yang dihadiri para tokoh dan aktivis mahasiswa, kemudian terpilih sebagai pemimpin aksi. Ferry juga menyusun dan mengirim surat pemberitahuan unjuk rasa ke Kepolisian Jayapura. Protes itu berjalan damai keesokan harinya, dihadiri ribuan orang yang mengutuk rasisme dan menuntut referendum kemerdekaan, beberapa bendera Bintang Kejora dikibarkan. Ferry didakwa dengan pasal 106 dan 110 KUHP, selain pasal 160, terkait dengan unjuk rasa 19 dan 29 Agustus 2019. Terkait aksi protes 29 Agustus 2019 di Jayapura yang berakhir rusuh, polisi menuduh Ferry sebagai dalang dan penyelenggara aksi, Tapi Ferry menyangkal keterlibatannya dalam protes 29 Agustus. Ia berada di Surabaya sejak 26 Agustus dan baru tiba kembali di Jayapura pada pagi hari tanggal 29 Agustus dan langsung pulang. Ia berada di Surabaya atas undangan Gubernur Papua, untuk berpartisipasi dalam memediasi insiden rasisme yang kemudian memicu pecahnya Gerakan Melawan. Jaksa menuntutnya dihukum sepuluh tahun penjara, tetapi ia hanya dijatuhi hukuman sepuluh bulan penjara dan bebas pada 2 Juli 2020.
5. **Stevanus Itlay** adalah Ketua KNPB wilayah Timika dan ditangkap tanpa surat perintah pada 11 September 2019. Polisi menuduhnya merencanakan aksi-aksi selama Gerakan Melawan. Stevanus telah memberi tahu pengacaranya bahwa ia berada di Timika sepanjang Agustus dan baru tiba di Jayapura pada 29 Agustus. Ia didakwa dengan pasal 106 dan 110 KUHP, selain pasal 107 (1) dan (2). Ini adalah kali ketiga Stevanus ditahan karena aktivitas politik. Jaksa menuntutnya dihukum 15 tahun penjara, tapi ia hanya dijatuhi hukuman sebelas bulan penjara dan bebas pada 7 Agustus 2020.
6. **Hengki Hilapok** adalah seorang mahasiswa dari Universitas Sains dan Teknologi Jayapura yang berpartisipasi dalam aksi protes 19 dan 29 Agustus 2019. Ia ditangkap tanpa surat perintah pada 11 September 2019. Hengki merupakan penanggung jawab urusan sewa sound system dan mobil yang digunakan untuk aksi protes 29 Agustus. Ia didakwa dengan pasal 106 dan 110, selain pasal 160 KUHP. Jaksa menuntutnya lima tahun penjara, tapi ia hanya dihukum sepuluh bulan dan bebas pada 12 Agustus 2020.
7. **Irwanus Uropmabin** adalah mahasiswa Universitas Sains dan Teknologi Jayapura yang ditangkap tanpa surat perintah pada 11 September 2019. Ia membantu mengorganisir kedua aksi protes di Jayapura pada 19 dan 29 Agustus 2019. Bersama para aktivis mahasiswa, termasuk mahasiswa dari universitas lain, ia memutuskan bahwa mahasiswa akan kembali mengadakan aksi damai menuju kantor gubernur pada tanggal 29 Agustus 2019. Ia menghadiri rapat persiapan pada 27 dan 28 Agustus 2019. Perannya dalam protes itu memantau keamanan. Irwanus membantah keterlibatan apapun sehubungan dengan kekerasan yang terjadi saat aksi protes tersebut. Sebelum akhirnya ditangkap dan ditahan pada 11 September, ia sempat ditangkap dan diinterogasi selama sehari oleh polisi pada 6 September 2019. Ia didakwa dengan pasal 106 dan pasal 160 KUHP. Jaksa menuntutnya dihukum lima tahun penjara, tapi ia hanya divonis sepuluh bulan dan bebas pada 7 Juli 2020.

JAYAPURA – Satu Tahanan Politik

Assa Asso adalah anggota KNPB dan Papuan Voices. Papuan Voices adalah komunitas pembuat film West Papua yang mendokumentasikan realitas sosial dan politik di West Papua melalui film dokumenter. KNPB adalah organisasi akar rumput nirkekerasan yang memperjuangkan hak penentuan nasib sendiri West Papua. Ia ditangkap pada 23 September 2019 karena unggahannya tentang aksi protes di Jayapura, 19 Agustus 2019, di Facebook. Ia didakwa melakukan makar berdasarkan pasal 106 KUHP, juga pasal 160 tentang penghasutan. Persidangannya dimulai pada 20 Februari 2020. Jaksa menuntutnya hukuman penjara satu tahun karena makar. Assa dinyatakan bersalah atas tindakan penghasutan, bukan makar, dan dijatuhi hukuman sepuluh bulan penjara. Dia bebas pada 20 Juli 2020..

Manokwari – Empat Tahanan Politik

1. **Sayang Mandabayan** ditangkap pada 2 September 2019 karena membawa 1.496 bendera Bintang Kejora kecil di bandara Manokwari. Ia berpartisipasi dan berorasi di aksi protes Gerakan Melawan di Sorong, 19 dan 27 Agustus 2019. Saat ditangkap di bandara Manokwari, ia baru saja tiba dari Sorong untuk mengikuti aksi protes di Manokwari pada hari yang sama. Pemeriksaan dilakukan karena ada lifejacket yang hilang dari pesawat. Dari dalam tasnya, petugas bandara menemukan 1.496 bendera Bintang Kejora kecil yang terbuat dari kertas. Polisi dipanggil dan kemudian ia ditangkap. Ia didakwa dengan pasal 106 KUHP. Sayang adalah seorang karyawan Dewan Kota Sorong tetapi ia diberhentikan dari pekerjaannya karena tuduhan yang dibuat terhadapnya. Tak lama setelah penangkapan, foto Sayang sedang menyusui bayinya di balik jeruji besi menjadi viral. Sejak saat itu, akses terhadap Sayang, termasuk dari keluarganya, menjadi dipersulit. Ia menderita sakit gigi tetapi tidak mendapatkan perawatan medis yang layak. Persidangannya dimulai pada 13 Februari 2020. Jaksa menuntut hukuman penjara sepuluh bulan. Ia dinyatakan bersalah karena penghasutan, bukan makar, dan dijatuhi hukuman sembilan bulan penjara, lalu dibebaskan pada 3 Juni 2020. Tiga hari kemudian, sebagai mantan tahanan politik, ia berbicara tentang hukum Indonesia yang rasialis dalam webinar yang diadakan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI). Ia telah mengampanyekan hak menentukan nasib sendiri West Papua. Pada 29 Juli 2020, dia diinterogasi karena dugaan ujaran kebencian di Facebook.
2. **Erik Aliknoe, Yunus Aliknoe** dan **Pende Mirin** adalah mahasiswa Universitas Papua yang ditangkap tanpa surat perintah pada 19 September 2019 dengan alasan terlibat aksi protes – yang disertai pengibaran Bintang Kejora – pada 3 September 2019 dan menyampaikan orasi pro-kemerdekaan. Mereka didakwa dengan pasal 106 dan 110 KUHP, selain pasal 160, 212, dan 213. Persidangan mereka dimulai pada 13 Februari 2020. Jaksa menuntut mereka dihukum sepuluh bulan penjara karena penghasutan, bukan karena makar. Mereka dijatuhi hukuman sembilan bulan penjara karena penghasutan. Erik Aliknoe dan Pende Mirin bebas pada 6 Juni 2020, sedangkan Yunus Aliknoe bebas pada 17 Juni 2020.

SORONG – Empat Tahanan Politik

Empat tahanan politik di Sorong adalah aktivis mahasiswa yang ditangkap pada 18 September 2019 karena menggelar aksi protes di hari yang sama. Mereka – **Rianto Ruruk, Yoseph Syufi, Manase Baho** dan **Ethus Miwak Kareth** – dijerat pasal 106 dan 110 KUHP. Polisi menangkap Rianto Ruruk dan Ethus Kareth 30 menit setelah mereka berdua berorasi di depan toko Anda Malanu sambil menunggu demonstran yang dipimpin Yoseph Syufi dan Manase Baho, yang sedang dalam perjalanan dari Universitas Kristen Papua untuk bergabung dengan mereka. Dua orang yang disebut belakangan itu ikut ditangkap juga. Rencana awal mereka adalah long march bersama menuju kantor walikota.

Polisi menuduh mereka mengibarkan bendera Bintang Kejora padahal mereka hanya memakai stiker Bintang Kejora. Persidangan mereka dimulai pada 5 Maret 2020. Jaksa menuntut mereka hukuman penjara satu tahun empat bulan. Mereka dinyatakan bersalah melakukan makar dan dijatuhi hukuman delapan bulan dan 15 hari penjara. Mereka bebas pada 31 Mei 2020.

Tahanan Politik yang Tidak Didakwa dengan Pasal Makar

Total ada 135 tahanan politik yang didakwa dengan pasal non-makar. Ratusan dari mereka diadili; 29 orang didakwa; sementara enam orang lainnya masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) pihak kepolisian. Orang West Papua menyebut orang-orang di bawah ini sebagai “tahanan politik anti-rasisme”. Beberapa dari mereka memang melakukan tindakan yang didakwakan saat mengungkapkan pandangan politik mereka, sementara banyak juga yang menjadi target penyiksaan, dipaksa mengaku melakukan tindakan yang tidak mereka lakukan. Semuanya telah bebas kecuali enam orang di Wamena.

MANOKWARI – Dua Belas Tahanan Politik

Seluruh tahanan politik ini diadili karena terkait aksi protes 19 Agustus 2019 di Manokwari yang berakhir rusuh. Tak satu pun dari mereka ditangkap di tempat berlangsungnya aksi protes. Dari 12 orang yang disebut di bawah ini, jaksa mengajukan banding atas putusan terhadap 8 terdakwa. Mereka semua bebas murni setelah menjalani hukuman.

1. **Andi Steven Koibur** (35) ditangkap pada 27 Agustus 2019 dan dituduh turut serta dalam pembakaran mobil yang sudah rusak saat melakukan aksi protes. Jaksa menuntutnya dihukum satu tahun dan sepuluh bulan penjara. PN setempat memvonisnya bersalah berdasarkan KUHP pasal 187 ayat (1) tentang pembakaran dan menjatuhkan hukuman lima bulan penjara pada 17 Desember 2019. Jaksa mengajukan banding. Pengadilan Tinggi di Jayapura mengubah putusan sebelumnya menjadi tujuh bulan penjara pada 5 Maret 2020.
2. **Martinus Asmuruf** (26) and **Derek Aronggear** (30) ditangkap pada 21 Agustus 2019. Mereka dituduh melakukan penjarahan di sebuah ATM kemudian membagikan uangnya pada para demonstran lain dalam aksi protes yang berakhir rusuh. Jaksa menuntut mereka dihukum satu tahun enam bulan penjara. Tanggal 17 Desember 2019, PN setempat memutuskan mereka bersalah berdasarkan KUHP pasal 363 ayat (1) tentang pencurian dan menjatuhkan hukuman lima bulan penjara. Jaksa mengajukan banding atas vonis tersebut. Pengadilan Tinggi di Jayapura merevisi putusan sebelumnya menjadi satu tahun penjara untuk keduanya pada 6 Maret 2020.
3. **Yance Songgreri** (18) ditangkap pada 25 Agustus 2019, sedangkan Mais Wiay (23) ditangkap sehari setelahnya. Mereka dituduh mencuri laptop dari sebuah toko komputer ketika aksi protes berubah menjadi kerusuhan. Mereka ditangkap secara terpisah ketika mereka datang ke toko untuk membeli pengisi daya laptop pada kesempatan yang berbeda. Jaksa menuntut mereka dihukum satu tahun enam bulan penjara. PN setempat memutuskan mereka bersalah berdasarkan KUHP pasal 363 ayat (1) ayat 2 tentang pencurian dan menjatuhkan hukuman lima bulan penjara pada 17 Desember 2019. Jaksa mengajukan banding dan Pengadilan Tinggi di Jayapura merevisi putusan tersebut. Yance Songgreri kemudian divonis sepuluh bulan penjara pada 5 Maret 2020, sedangkan Mais Wiay divonis satu tahun penjara pada 26 Februari 2020.
4. **Jafar Marife** (39) and **Yusup Wairara** (19) ditangkap pada 29 Agustus 2019 dengan tuduhan merusak properti sebuah restoran di dekat lokasi unjuk rasa. Jaksa menuntut mereka dihukum

penjara satu tahun lima bulan. Keduanya dinyatakan bersalah berdasarkan KUHP pasal 170 ayat (1) tentang kekerasan kolektif terhadap orang atau barang dan divonis hukuman satu tahun penjara pada 17 Desember 2019.

5. **Billy Wairara** (30) ditangkap pada 24 Agustus 2019 dan dituduh membakar sebuah kafe dekat lokasi unjuk rasa. Jaksa menuntut ia dihukum penjara satu tahun sepuluh bulan. PN setempat memutuskan ia bersalah karena melanggar KUHP pasal 187 ayat (1) tentang pembakaran dan menjatuhkan hukuman lima bulan penjara pada 17 Desember 2019. Jaksa mengajukan banding. Pengadilan Tinggi di Jayapura merevisi putusan tersebut dan menjatuhkan hukuman satu tahun sepuluh bulan penjara pada 27 Februari 2020.
6. **Freudi Mariar** (19) and **Rocky Dimara** (19) ditangkap pada 29 Agustus 2019 dengan tuduhan merusak gedung DPRD. Jaksa menuntut hukuman satu tahun delapan bulan penjara untuk keduanya. Pada 17 Desember 2019, PN memvonis mereka bersalah menurut KUHP pasal 170 ayat (1) tentang kekerasan kolektif terhadap orang atau barang serta menghukum Freudi Mariar enam bulan penjara dan Rocky Dimara satu bulan penjara. Jaksa mengajukan banding atas putusan tersebut. Pengadilan Tinggi di Jayapura merevisi putusan tersebut dan menjatuhkan hukuman penjara sepuluh bulan penjara pada 26 Februari 2020.
7. **Irjan Iwanggin** (19) and **Goodlief Baransano** (46) dituduh membakar bendera Indonesia. Mereka dijerat pasal 24 ayat (a) dan pasal 66 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Mereka divonis enam bulan 20 hari penjara pada 29 Januari 2020

SORONG – Delapan Tahanan Politik

Semua tahanan politik di bawah ini diadili karena terlibat dalam aksi protes 19 Agustus 2019 di Sorong yang berakhir rusuh kerusuhan. Semua ditangkap setelah aksi. Mereka semua bebas setelah menjalani hukuman.

1. **Septianus Malaseme** ditangkap pada 2 September 2019, sedangkan **Marius Asso**, **Opianus Majage**, dan **Hermira Elopere** ditangkap pada 5 September 2019. Mereka dituduh merusak properti gedung legislatif setempat. Jaksa menuntut hukuman satu tahun penjara untuk mereka semua. Mereka dinyatakan bersalah berdasarkan KUHP pasal 170 ayat (1) tentang kekerasan kolektif terhadap orang atau barang. Vonis dijatuhkan pada 25 Juni 2020, dan pada 29 Juni 2020 untuk Marius Asso. Mereka semua dihukum sepuluh bulan penjara dan bebas pada 2 Juli 2020.
2. **Johanis Fatari**, **Renaldo Mirino**, **Branto Babere**, and **Marthen Kewoy** ditangkap pada 22 Agustus 2019 dan dituduh menjarah sebuah kafe saat aksi protes yang berubah menjadi kerusuhan. Jaksa menuntut mereka dihukum 10 bulan penjara. Pada 17 Maret 2020, mereka dinyatakan bersalah berdasarkan KUHP pasal 363 ayat (2) tentang pencurian dan divonis enam bulan 15 hari penjara.

FAKFAK – Enam Tahanan Politik

Empat orang di bawah ini diadili terkait aksi protes 21 Agustus 2019 di Fakfak yang berakhir rusuh. Semuanya dibebaskan setelah selesai menjalani hukuman. Dua orang lainnya masuk dalam DPO polisi karena diduga terlibat dalam aksi yang sama.

1. Jaksa menuntut hukuman satu tahun enam bulan penjara untuk **Rudi Relis Komber** dan **Jhon Erickson Asem**. Mereka dinyatakan bersalah berdasarkan KUHP pasal 170 ayat (1) tentang kekerasan kolektif terhadap orang atau barang. Rudi Komber divonis satu tahun lima bulan penjara pada 13 Februari 2020, sedangkan Jhon Asem divonis satu tahun empat bulan penjara pada 7 Februari 2020.
2. Jaksa menuntut hukuman satu tahun enam bulan penjara untuk **Paskalis Tutuop** dan **Iginansus Hukhukmana**. Mereka dinyatakan bersalah berdasarkan KUHP pasal 160 tentang penghasutan dan divonis satu tahun empat bulan penjara. Vonis Paskalis Tutuop dibacakan pada 7 Februari 2020, sedangkan putusan Iginansus Hukhukmana dibacakan pada 24 Februari 2020.
3. **Dance Hegemur** and **Yakobus Temongmere** masuk dalam DPO polisi (Nomor DPO/07/X/2019/Reskrim; dan Nomor DPO/06/X/2019/Reskrim). Keduanya dicari karena dugaan kejahatan yang dilakukan bersama Rudi Relis Komber.

TIMIKA – Dua Belas Tahanan Politik

Hanya tiga dari sepuluh orang yang ditangkap dan didakwa terkait aksi protes yang berujung rusuh di Timika, 21 Agustus 2019, telah selesai dituntut. Dua orang lainnya ditangkap pada akhir September 2019 karena unggahan di Facebook. Mereka semua yang dituntut telah bebas murni setelah menjalani hukuman.

1. **Riko Wariensi** (25) ditangkap pada 21 Agustus 2019 karena melempar batu ke sebuah hotel bersama dengan pengunjung rasa lain saat berslangsung aksi protes. Jaksa menuntut ia dihukum satu tahun penjara. Ia dinyatakan bersalah berdasarkan KUHP pasal 170 ayat (1) tentang kekerasan kolektif terhadap orang atau barang dan divonis tujuh bulan penjara pada 19 Februari 2020.
2. **Teryanus Madlama** (21) ditangkap pada 21 Agustus 2019 dalam aksi protes ketika polisi menemukan lima bungkus rokok di dalam tasnya, setelah toko kelontong terdekat dijarah pada hari sebelumnya. Jaksa menuntut ia dihukum penjara selama empat bulan. Ia dinyatakan bersalah sesuai KUHP pasal 363 ayat (1) dan ayat 2 tentang pencurian dan divonis tiga bulan empat belas hari penjara pada 12 Mei 2020.
3. **Nius Wenda** (18) ditangkap pada 21 Agustus 2019 saat melakukan aksi protes lalu digeledah polisi dan ditemukan pisau berukuran 27 cm di sakunya. Jaksa menuntut ia dihukum satu tahun hukuman penjara. Ia dinyatakan bersalah berdasarkan Undang-Undang Darurat (UU Darurat) No. 12 tahun 1951 pasal 2 ayat (1) tentang kepemilikan senjata tajam. Ia divonis hukuman tujuh bulan penjara pada 19 Februari 2020.
4. **Elly Dolame** (20), **Timinus Wenda** (24), **Urbanus Juka** (26), **Yermin Gombo** (19), dan **Maikel Gombo** (20) ditangkap pada 21 Agustus 2019 saat mereka keluar dari tempat persembunyiannya di hutan beberapa jam setelah kerusuhan. Tiga orang pertama dituduh merusak gedung DPRD, sedangkan dua orang terakhir dituduh merusak gedung Badan Narkotika Nasional. Mereka semua didakwa dengan KUHP pasal 170 tentang kekerasan kolektif terhadap orang atau barang. Mereka dibebaskan karena tidak cukup bukti dan jangka waktu maksimum penahanan yang diizinkan menurut undang-undang telah terlampaui.
5. **MY (16)** dan **LK (17)** ditangkap pada 21 Agustus 2019 dan ditahan bersama delapan orang dewasa lainnya yang disebutkan di atas. Mereka didakwa dengan KUHP pasal 170 tentang kekerasan kolektif terhadap orang atau barang, tapi mereka dibebaskan sebelum pengadilan dimulai karena masih di bawah umur.
6. **Steven Baransano** (28) ditangkap pada 27 September 2019 sedangkan **Thereslin Werfete** (21) ditangkap pada 28 September 2019 karena mengkritik polisi di Facebook. Pada 20 September, Steven Baransano mengutuk tindakan polisi yang membubarkan acara 'bakar batu' secara paksa dan merusak makam pejuang kemerdekaan West Papua pada 19 September 2019. Sementara itu, Thereslin Werfete membuat unggahan yang serupa pada 22 September 2019. Jaksa

menuntut mereka dihukum satu tahun penjara dan denda tambahan sebesar Rp10.000.000,00 atau enam bulan tambahan untuk Steven Baransano. Keduanya dinyatakan bersalah melanggar Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pasal 45A ayat (2) tentang ujaran kebencian. Steven Baransano divonis delapan bulan penjara dan denda Rp10.000.000,00 atau tambahan tiga bulan penjara pada 13 Februari 2020, sedangkan Thereslin Werfete divonis delapan bulan penjara pada 5 Maret 2020.

DEIYAI – Empat Belas Tahanan Politik

Sembilan orang diadili sementara lima lainnya didakwa terkait insiden di Deiyai, 28 Agustus 2019. Mereka semua ditangkap saat masih dirawat di rumah sakit karena menderita luka tembak dari aparat keamanan. Kasus tersebut disidangkan di Pengadilan Negeri Nabire. Lima terdakwa itu bebas setelah selesai menjalani hukuman

1. **Alex Pakage** (50), **Stefanus Goo** (37), **Simon Petrus Ukago** (27), **Melianus Mote** (32), **Juven Pekei** (32), **Andreas Douw** (18) ditangkap pada 28 Agustus 2019. Jaksa menyodorkan busur dan anak panah -simbol kebesaran adat orang West Papua- sebagai barang bukti, kecuali Andreas Douw yang dituduh membawa pisau berukuran 30 cm. Jaksa menuntut mereka dihukum penjara selama satu tahun. Mereka dinyatakan bersalah melanggar UU Darurat pasal 2 ayat (1) tentang kepemilikan senjata tajam dan KUHP pasal 212 tentang mengancam pihak berwenang dengan kekerasan. Mereka divonis enam bulan 22 hari penjara pada 19 Maret 2020 dan bebas pada 25 Maret 2020.
2. **Stevanus Pigai** (26), **Mikael Bukega** (26), dan **Yos Iyai** (26) ditangkap pada 1 September 2019. Jaksa menuntut mereka dihukum sepuluh bulan penjara. Mereka dinyatakan bersalah melanggar KUHP pasal 160 tentang penghasutan. Mereka divonis lima bulan 22 hari penjara pada 6 Maret 2020 dan bebas di hari pembacaan vonis.
3. **Yonas Kayame** (26), **Gergorius Tekege** (25), **Samuel Edowai** (27), **Yohanis Adii** (47), dan **Jhon Badii** (20) ditetapkan sebagai tersangka tetapi dibebaskan sebelum sidang karena mendapat jaminan dari Bupati Deiyai.

JAYAPURA – 42 Tahanan Politik

Dua puluh enam orang diadili dan dua lainnya masuk DPO kepolisian karena aksi protes di Jayapura yang berujung rusuh pada 29 dan 30 Agustus 2019. Selama diinterogasi polisi, mereka tidak diberikan akses kepada pengacara dan menjadi target intimidasi dan pemukulan agar mengakui kejahatan yang dituduhkan pada mereka. Satu orang ditangkap, dan kemudian diadili, ketika bepergian dengan seorang aktivis kunci yang didakwa melakukan makar, sementara dua belas orang diadili terkait aksi protes yang berujung rusuh di Jayapura pada 23 September 2019, dan aktivis kunci lainnya telah dimasukkan dalam DPO kepolisian, karena terlibat dalam Gerakan Melawan.

1. **Lois Bosway** ditangkap pada 29 Agustus 2019 dan dituduh membeli sekarung gula serta beberapa suku cadang motor hasil penjarahan. Ia dinyatakan bersalah melanggar KUHP pasal 480 tentang pembelian barang curian dan divonis lima bulan penjara pada 10 Januari 2020.
2. Orang-orang berikut ditangkap pada 29 Agustus 2019 dan dituduh merusak properti umum selama aksi protes:
 - **Ferius Entama** (23) melempar batu ke toko furnitur, ATM, dan restoran;
 - **Dorty Kawena** (18) tiga kali melempar batu ke showroom mobil;
 - **Panra Wenda** (18) dua kali melempar batu di jalanan dan sekali di restoran;

- **Yali Loho** (22) melempar batu di jalanan;
- **Elo Hubi** (19) melempar batu ke arah hotel;
- **Ary Asso** (23) menembakkan batu menggunakan ketapel di gedung Dewan Adat Papua;
- **Ruvinus Tambonop** (23) dua kali melempar batu ke bank dan pertokoan;
- **Vinsen Calvin Dogopia** (19) melempar batu ke pertokoan;
- **Agustinus Lisak Mohi** (19) melempar batu ke dua toko dan satu mobil;
- **Ronal Wandik** (23) melempar batu dengan ketapel di sepanjang jalan;
- **Yusuf Marthen Moai** (20) melempar batu ke bank;
- **Jony Weya** (21) melempar batu dengan ketapel ke pertokoan;
- **Persiapan Kogoya** (20) melempar batu ke gedung umum dan meneriakkan slogan "Papua Merdeka";
- **Mikha Asso** (21) dua kali melempar batu di sepanjang jalan dan meneriakkan slogan "Papua Merdeka";

Jaksa menuntut mereka dihukum kurungan penjara selama delapan bulan. Mereka semua bebas pada 26 Januari 2020 karena masa penahanan mereka telah selesai. PN setempat memutuskan mereka bersalah karena melanggar KUHP pasal 170 ayat (1) tentang kekerasan kolektif terhadap orang atau barang dan masing-masing dijatuhi hukuman enam bulan penjara pada 24 Februari 2020 - kecuali Vinsen Dogopia, yang vonisnya dibacakan pada 20 Februari 2020. Di semua kasus, baik terdakwa maupun jaksa mengajukan banding atas putusan tersebut. Pengadilan Tinggi menguatkan putusan sebelumnya pada 2 April 2020 untuk empat pemohon pertama, pada 28 April untuk empat pemohon berikutnya, dan pada 30 April untuk sisanya. IH yang diadili bersama mereka dibebaskan berdasarkan putusan sela pada 25 November 2019 karena masih di bawah umur.

3. **Piter Meraudje** (18) ditangkap pada 29 Agustus 2019 dengan tuduhan mencuri sepeda motor dari toko yang dijarah. Jaksa menuntut ia dihukum tujuh bulan penjara. Ia bebas pada 26 Januari 2020 karena masa penahanannya telah selesai. PN Jayapura memutuskan ia bersalah karena melanggar KUHP pasal 363 ayat (1) tentang pencurian dan memvonisnya hukuman enam bulan penjara pada 20 Februari 2020. Ia mengajukan banding dan Pengadilan Tinggi menguatkan putusan sebelumnya pada 2 April 2020. Rekan terdakwa, Janu, sejak itu dimasukkan dalam DPO polisi.
4. **Yorgen Aibui** dan **Falerio Yaas** ditangkap pada 29 Agustus 2019 dan dituduh mencuri peralatan komputer dari kantor gubernur dan coklat. Jaksa menuntut mereka dihukum delapan bulan penjara. Mereka dinyatakan bersalah melanggar KUHP pasal 363 ayat (1) tentang pencurian dan divonis enam bulan penjara pada 20 Februari 2020.
5. **Lanti Nipsan** (20) ditangkap pada 29 Agustus 2019 karena membawa pisau berukuran 20 cm di sakunya yang ia gunakan untuk membuka kaleng cat dan kelapa sebelum ikut aksi protes. Jaksa menuntut ia dihukum satu tahun penjara. Ia dinyatakan bersalah melanggar UU Darurat tahun 1951 pasal 2 ayat (1) tentang kepemilikan senjata tajam. Ia divonis enam bulan penjara pada 29 Januari 2020.
6. **Dolvius Hisage** (20) adalah mahasiswa Universitas Cenderawasih dan ditangkap pada 30 Agustus 2019. Ia membagikan pamflet pada 28 Agustus untuk mengajak orang-orang mengikuti aksi protes keesokan harinya dan memimpin demonstran bergerak menuju kantor gubernur. Jaksa menuntut ia dihukum delapan bulan penjara. Ia bebas pada 26 Januari 2020 karena masa penahanannya telah selesai. PN Jayapura memutuskan ia bersalah melanggar KUHP pasal 160 tentang penghasutan dan menjatuhkan hukuman enam bulan penjara pada 20 Februari 2020. Bukti yang digunakan adalah lima lembar pamflet. Ia mengajukan banding dan Pengadilan Tinggi menguatkan putusan sebelumnya pada 28 April 2020.
7. **Oktovianus Hisage** (25) dan **Mikael Hilapok** (19) ditangkap pada 30 Agustus 2019 dengan tuduhan menjarah komputer beserta aksesorinya dari gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU). Jaksa menuntut mereka dihukum satu tahun penjara. Oktovianus Hisage bebas pada 26 Januari 2020 karena masa penahanannya telah selesai. PN memutuskan mereka bersalah melanggar KUHP pasal 363 ayat (1) dan bagian 2 tentang pencurian dan menghukum Mikael Hilapok enam bulan penjara pada 15 Januari 2020 dan pada 11 Februari 2020 untuk Oktovianus Hisage. Oktavianus dan jaksa mengajukan banding atas keputusan PN itu. Pengadilan Tinggi di Jayapura menguatkan putusan PN pada 30 Maret 2020.

8. **Yosam Wenda** ditangkap pada 30 Agustus 2019 dan dituduh melakukan penjarahan karena dari dalam tasnya ditemukan sebuah keyboard komputer. **Yoda Tabuni** dituntut bersamanya karena dituduh melempar batu di jalan, sementara **Bahlua Tabuni** sejak saat itu dimasukkan dalam DPO. Baik Yosam Wenda maupun Yoda Tabuni dinyatakan bersalah melanggar KUHP pasal 363 ayat (1) bagian 2 tentang pencurian dan divonis enam bulan penjara pada 11 Februari 2020.
9. **Yan Piter Surumaja** ditangkap pada 30 Agustus 2019. Ia dituduh membawa kapak dan katapel di tasnya serta melemparkan batu ke dua toko, hotel, dan ATM. Jaksa menuntut ia dihukum delapan bulan penjara. Ia dinyatakan bersalah melanggar UU Darurat tahun 1951 pasal 2 ayat (1) tentang kepemilikan senjata tajam dan KUHP pasal 170 ayat (1) tentang kekerasan kolektif terhadap orang atau barang. Ia divonis enam bulan penjara pada 21 Februari 2020.
10. **Willem Walilo** ditangkap pada 30 Agustus 2019 karena membawa pisau kecil saat pulang mengecek rumor tentang kerusuhan. Jaksa menuntut ia dihukum satu tahun penjara. Ia dinyatakan bersalah melanggar UU Darurat tahun 1951 pasal 2 ayat (1) tentang kepemilikan senjata tajam dan divonis enam bulan penjara pada 29 Januari 2020.
11. **Braham Dote** (20) ditangkap pada 23 September 2019 atas kerusuhan 29 Agustus 2019 dan dituduh mencuri telepon dari rumah seseorang. Jaksa menuntut ia dihukum satu tahun penjara. Ia dinyatakan bersalah melanggar pasal 362 KUHP tentang pencurian dan divonis enam bulan penjara pada 24 Februari 2020. Ia bebas tanggal 22 Maret 2020.
12. **Donny Itlay** (39) ditangkap pada 17 September 2019 saat bepergian bersama Agus Kossay, aktivis kunci yang kemudian didakwa makar. Polisi menuduhnya menggunakan sepeda motor curian meskipun ia menjelaskan bahwa ia menyewanya. Jaksa menuntut ia dihukum satu tahun tiga bulan penjara. Ia dinyatakan bersalah melanggar KUHP pasal 480 tentang pembelian barang curian dan divonis tujuh bulan penjara pada 18 Februari 2020.
13. **Victor Yeimo** (37) adalah salah seorang aktivis pro-kemerdekaan paling terkemuka di West Papua. Ia masuk DPO karena dianggap sebagai salah satu dalang di balik Gerakan Melawan. Namanya terus-menerus diangkat oleh hakim dan jaksa penuntut selama persidangan "The Balikpapan Seven" (lihat bagian makar di atas).
14. **Yogi Wenda** (20), **Jimbrif Kogoya** (22), **Elmius Bayage** (21), dan **Maya Kamarigi** (21) dituduh terlibat bentrokan dengan TNI dan Polri pada 23 September 2019. Jaksa menuntut mereka dihukum delapan bulan penjara. Mereka dinyatakan bersalah melanggar KUHP pasal 170 ayat (1) tentang kekerasan kolektif terhadap orang atau barang dan divonis tujuh bulan penjara pada 6 April 2020. Mereka bebas pada 20 April 2020.
15. **Enak Waker** (26) ditangkap pada 25 September 2019 saat masih dirawat di rumah sakit. Paha kirinya ditembak saat ia tengah menyaksikan bentrokan antara mahasiswa dan aparat keamanan pada 23 September 2019. Jaksa menuntutnya dihukum satu tahun penjara. Ia dinyatakan bersalah melanggar KUHP pasal 170 ayat (1) tentang kekerasan kolektif terhadap orang atau barang dan divonis tujuh bulan penjara pada 28 Februari 2020. Ia bebas pada 6 April 2020.
16. **Bedira Tabuni** (19), **Alpon Meku** (22), **Pailes Yigibalom** (21), dan **Biko Kogoya** (20) dituduh terlibat bentrokan dengan TNI dan Polri pada 23 September 2019. Jaksa menuntut mereka dihukum satu tahun penjara. Mereka dinyatakan bersalah melanggar KUHP pasal 170 ayat (1) tentang kekerasan kolektif terhadap orang atau barang dan divonis tujuh bulan penjara pada 28 Februari 2020. Mereka bebas pada 6 April 2020.
17. **Abua Yikwa** (19) dan **Yandu Kogoya** (20) dituduh terlibat bentrokan dengan TNI dan Polri yang mengakibatkan tewasnya seorang tentara pada 23 September 2019. Jaksa menuntut mereka dihukum satu tahun enam bulan penjara. Mereka dinyatakan bersalah melanggar KUHP pasal 170 ayat (2) ayat 3 tentang pemukulan dan divonis satu tahun penjara pada 20 April 2020. Mereka bebas pada 25 September 2020.

WAMENA – 33 Tahanan Politik

Sembilan belas orang ditangkap terkait kerusuhan di Wamena pada 23 September 2019. Empat dari mereka ditangkap saat masih dirawat di rumah sakit, terluka akibat tembakan aparat keamanan. Penangkapan dilakukan hingga November 2019. Beberapa di antaranya diadili di PN Biak. Enam orang masih berada di balik jeruji besi sampai laporan ini diterbitkan.

Empat belas orang yang ditangkap pada Oktober 2019 termasuk ke dalam daftar ini karena kerusuhan begitu parah sehingga tensinya tetap tinggi dan kemungkinan besar mereka tidak akan ditangkap seandainya tidak ada kerusuhan pada 23 September.

1. **AU (16)** dan **RE (16)** dituduh melempar batu ke arah pertokoan saat terjadi kerusuhan. AU ditembak di perut bagian kanan dan ditangkap pada 30 September 2019, sedangkan RE ditembak di paha kanan dan ditangkap pada 29 September 2019. Keduanya didakwa berdasarkan KUHP pasal 187 ayat (1) tentang pembakaran dan pasal 170 ayat (1) tentang kekerasan kolektif terhadap orang atau barang. Mereka bebas pada 7 November 2019 setelah mediasi dengan alasan masih di bawah umur.
2. **Paben Yikwa (34)** ditangkap dan ditembak di paha kanan saat menyaksikan kerusuhan. Ia merupakan saksi mata dan tidak bisa berbahasa Indonesia. Ia didakwa berdasarkan KUHP pasal 170 ayat (1) tentang kekerasan kolektif terhadap orang atau barang tetapi dibebaskan pada akhir Oktober 2019.
3. **Elieser Siep (27)** ditangkap pada 23 September 2019 karena dua kali melempar batu ke arah sebuah salon kecantikan. Ia diinterogasi dan ditahan saat masih dirawat di rumah sakit setelah ditikam seorang migran non-Papua. Jaksa menuntut ia dihukum satu tahun penjara. Ia dinyatakan bersalah melanggar KUHP pasal 170 ayat (1) tentang kekerasan kolektif terhadap orang atau barang dan divonis delapan bulan penjara pada 6 April 2020. Ia bebas pada 20 April 2020.
4. **Ricky Fransdian Wanimbo (18)** melempar batu ke pintu gerbang sebuah toko saat terjadi kerusuhan dan tertembak di lutut kanannya. Ia ditangkap dan ditahan pada 28 September 2019 saat masih dirawat di rumah sakit setelah menjalani operasi. Ia tidak diberikan perawatan selama dalam tahanan sehingga lukanya mengalami infeksi. Jaksa menuntut ia dihukum satu tahun enam bulan penjara. Ia dinyatakan bersalah melanggar KUHP pasal 170 ayat (1) tentang kekerasan kolektif terhadap orang atau barang dan divonis sembilan bulan penjara pada 8 April 2020. Ia bebas pada 30 April 2020.
5. **Aibun Kogoya (21)** dituduh terlibat kerusuhan dan ditembak di bagian kanan dadanya. Ia ditangkap dan ditahan pada 2 Oktober 2019 saat masih dirawat di rumah sakit setelah menjalani operasi. Jaksa menuntut ia dihukum sepuluh bulan penjara. Ia dinyatakan bersalah melanggar KUHP pasal 170 ayat (1) tentang kekerasan kolektif terhadap orang atau barang dan divonis delapan bulan penjara pada 11 Maret 2020. Ia bebas pada 2 April 2020.
6. **Daud Matuan (18)** dituduh terlibat kerusuhan dan ditembak di bagian kanan dadanya. Ia ditangkap dan ditahan pada 2 Oktober 2019 saat masih dirawat di rumah sakit setelah menjalani operasi. Jaksa menuntut ia dihukum sepuluh bulan penjara. Ia dinyatakan bersalah melanggar KUHP pasal 170 ayat (1) tentang kekerasan kolektif terhadap orang atau barang dan divonis delapan bulan penjara pada 11 Maret 2020. Ia bebas pada 2 April 2020.
7. **Yohanes Payage (19)** ditangkap pada 3 Oktober 2019 karena melempar batu ke arah polisi dan pertokoan. Ia menjalani dua kali operasi setelah paha kanannya tertembak, ia tetap lemas karena infeksi yang terus-menerus. Kasusnya disidangkan di PN Biak. Jaksa menuntut ia dihukum satu tahun delapan bulan penjara. Ia dinyatakan bersalah melanggar KUHP pasal 170 ayat (1) tentang kekerasan kolektif terhadap orang atau barang dan divonis satu tahun enam bulan penjara pada 20 Juli 2020. Ia bebas pada 13 Agustus 2020.
8. **Samuel Kurisi (43)** dan **Konius Doga (19)** dituduh membakar bengkel mobil. Samuel Kurisi ditangkap pada 5 Oktober 2019 dan Konius Doga pada 21 Oktober 2019. Keduanya disidangkan di Pengadilan Negeri Biak. Jaksa menuntut mereka dihukum dua tahun dan enam bulan penjara. Mereka dinyatakan bersalah melanggar KUHP pasal 187 ayat (1) tentang pembakaran dan divonis dua tahun penjara pada 20 Juli 2020.

9. **Luky Elopere** (20) ditangkap pada 7 Oktober 2019 dan selama interogasi disiksa agar mengaku bahwa ia membakar pertokoan saat kerusuhan. Kasusnya disidangkan di PN Biak. Jaksa menuntut ia dihukum empat tahun penjara. Ia dinyatakan bersalah melanggar KUHP pasal 187 ayat (1) tentang pembakaran dan divonis satu tahun enam bulan penjara pada 6 Juli 2020. Ia bebas pada 13 Agustus 2020.
10. **Pilatus Pahabol** (25) ditangkap pada 8 Oktober 2019 karena merusak sebuah rumah. Jaksa menuntut ia dihukum satu tahun enam bulan penjara. Ia dinyatakan bersalah melanggar KUHP pasal 170 ayat (1) tentang kekerasan kolektif terhadap orang atau barang dan divonis sembilan bulan penjara pada 8 April 2020. Ia bebas pada 30 April 2020.
11. **Teresta Tega Iyaba** (22) adalah seorang mahasiswi dan ditangkap pada 11 Oktober 2019 setelah beredar video dia berteriak "bakar kampus!" sebanyak empat kali. Namun, ia tidak berpartisipasi dalam perusakan atau pembakaran yang sebenarnya. Ia disiksa dan hampir diperkosa dua kali saat berada dalam tahanan polisi. Jaksa menuntut ia dihukum enam tahun penjara. PN memutuskan ia bersalah karena melanggar KUHP pasal 187 ayat (1) tentang pembakaran dan menjatuhkan hukuman empat tahun penjara pada 30 Maret 2020. Ia mengajukan banding dan Pengadilan Tinggi di Jayapura mengubah putusan menjadi enam tahun penjara pada 30 April 2020. Ia mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung pada 14 Mei 2020 dan masih menunggu hasilnya.
12. **Natius Tabuni** (27) ditangkap pada 13 Oktober 2019 karena melempar batu ke sebuah toko. Jaksa menuntut ia dihukum satu tahun enam bulan penjara. Ia dinyatakan bersalah melanggar KUHP pasal 170 ayat (1) tentang kekerasan kolektif terhadap orang atau barang dan divonis sembilan bulan penjara pada 3 April 2020. Ia bebas pada 30 April 2020.
13. **Narius Wenda** (28) ditangkap pada 15 Oktober 2019 karena pembunuhan. Saudaranya, Naligi Wenda, terbunuh dalam kerusuhan 23 September 2019. Tanggal 12 Oktober, penyakit Narius kambuh saat ia membawa pisau yang baru diasah untuk acara pemakaman dimana acara makan tradisional "bakar batu", dalam rangka menghormati mending saudaraanya. Ia tidak sengaja menikam pengendara sepeda motor yang sedang melewati rumahnya dan pengendara itu meninggal dunia di rumah sakit. Jaksa menuntut Narius dihukum dua belas tahun penjara. PN memutuskan ia bersalah sesuai KUHP pasal 340 tentang pembunuhan berencana dan menjatuhkan hukuman sepuluh tahun penjara pada 14 Mei 2020. Ia mengajukan banding dan Pengadilan Tinggi di Jayapura menguatkan putusan sebelumnya pada 20 Juli 2020. Ia mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung pada 4 Agustus 2020 dan kini masih menunggu hasilnya.
14. **Jawa Wetipo** (24) ditangkap pada 17 Oktober 2019 dan dianiaya hingga mengaku membakar mobil saat kerusuhan 23 September 2019. Jaksa menuntut Jawa dihukum dua tahun penjara. Ia dinyatakan bersalah melanggar KUHP pasal 187 ayat (1) tentang pembakaran dan divonis satu tahun dua bulan penjara pada 7 April 2020. Ia bebas pada 26 Mei 2020.
15. **Manu Marlon Alua** (19) ditangkap pada 17 Oktober 2019 dan disiksa selama dalam masa penahanan. Ia mengaku telah melempar batu tetapi terpaksa mengakui juga bahwa ia membakar kampus. Kasusnya disidangkan di PN Biak. Jaksa menuntutnya hukuman empat tahun penjara. Ia dinyatakan bersalah melanggar KUHP pasal 187 ayat (1) tentang pembakaran dan divonis dua tahun penjara pada 6 Juli 2020.
16. **Sonni Yando** ditangkap pada 13 November 2019 dan dituduh membakar sebuah toko yang menyebabkan kematian. Jaksa menuntut Sonni dihukum delapan tahun penjara. PN Biak memutuskan ia bersalah karena melanggar KUHP pasal 187 ayat (3) tentang pembakaran dan menjatuhkan hukuman tiga tahun penjara pada 29 Juni 2020. Ia dan jaksa mengajukan banding atas putusan tersebut. Pengadilan Tinggi di Jayapura menguatkan putusan sebelumnya pada 9 September 2020.
17. **Konius Weya** (24) ditangkap pada 8 Oktober 2019 di bandara Wamena karena membawa sebutir amunisi. Ia tidak sengaja menemukan peluru itu dan bermaksud menggunakannya sebagai kalung. Ia didakwa atas kepemilikan senjata, tapi dibebaskan pada 5 November 2019 setelah ada mediasi dengan dewan adat.

18. **PH (16)** ditangkap pada 24 Oktober 2019 karena membawa pisau kecil di dalam saku. Jaksa menuntut sepuluh bulan penjara untuknya. PN yang bertindak sebagai pengadilan anak memvonisnya bersalah melanggar UU Darurat tahun 1951 pasal 2 ayat (1) tentang kepemilikan senjata tajam dan divonis empat bulan penjara pada 21 November 2019. Jaksa mengajukan banding atas putusan tersebut. Pengadilan Tinggi Jayapura menguatkan putusan sebelumnya pada 10 Desember 2019. Ia bebas pada 21 Februari 2020.
19. **Deminiel Aliknoe, Tenius Aliknoe, Elis Ilintamo, Olius Aliknoe, Onis Aliknoe, Marthinus Aliknoe, Kris Pahabol, Marius Himan, Alex Kepno, Yafeth Itlay, Krisen Pahabol, dan Maikel Aliknoe** ditangkap pada 27 Oktober 2019 tanpa surat perintah apapun. Mereka didakwa melakukan makar karena membentangkan bendera Bintang Kejora di dalam rumah mereka. Seorang pengacara hak asasi manusia diusir polisi saat mereka meminta surat perintah penangkapan. Dua hari kemudian, mereka semua dibebaskan.
20. **Randis Lokbere (19)** ditangkap pada 21 November 2019 karena sebuah unggahan di Facebook tanggal 21 September 2019 tentang informasi bahwa seorang guru menyebut “monyet” pada seorang siswa, yang kemudian berujung menjadi aksi protes 23 September 2019. Jaksa menuntut ia dihukum satu tahun penjara dan denda Rp200.000.000,00 atau enam bulan penjara tambahan. PN Biak memvonisnya bersalah melanggar UU ITE pasal 45A ayat (2) tentang ujaran kebencian. Ia divonis sepuluh bulan penjara dan denda Rp200.000.000,00 atau lima bulan penjara tambahan pada 10 Juli 2020.

OKSIBIL – Enam Tahanan Politik

Semua tahanan politik ditangkap tanpa surat perintah sehubungan dengan pembakaran di Oksibil, 26 September 2019. Mereka dipaksa mengaku dengan cara disiksa bahwa mereka melakukan pembakaran dan jaksa menuntut mereka dihukum dua tahun penjara. PN Wamena memutuskan semua bersalah karena melanggar KUHP pasal 187 ayat (1) tentang pembakaran dan dijatuhi hukuman penjara satu tahun dua bulan pada 7 Agustus 2020. Mereka bebas lebih awal pada 2 September 2020 karena ada kebijakan terkait Covid-19.

1. **Yosmin Duyala (25)** ditangkap di rumahnya pada malam hari tanggal 26 September 2019. Saat sedang menunggu ojek pada sore hari, ia sempat dibawa oleh anggota TNI dan Polri yang sedang berpatroli ke kantor polisi karena ada kerusuhan di sekitar lokasi tersebut. Aparat keamanan kemudian mengantarnya pulang. Pada tengah malam, petugas polisi mendobrak pintu dan menangkapnya. Ia disetrum begitu sampai di kantor polisi dan keesokan paginya, ia dipaksa untuk menandatangani berkas yang telah disiapkan untuknya.
2. **Yoni Malyo (24)** ditangkap di rumahnya pada 27 September 2019. Ia disiksa di dalam mobil polisi. Ia ditendang dan disetrum selama diinterogasi di kantor polisi sampai ia menjawab “ya” untuk semua pertanyaan. Ia kemudian dibawa ke pasar untuk mencari tersangka lainnya sambil dipukuli dan ditendang. Setelah kembali ke kantor polisi, ia disetrum dan disiksa lagi sampai kehilangan dua gigi.
3. **Yenus Deal (23)** ditangkap pada 27 September 2019 saat mengambil sejumlah uang tunai dari ATM di pasar. Ia tiba-tiba dipukuli dan ditendang secara membabi-buta oleh dua petugas polisi sehingga pendengarannya terganggu selama dua bulan. Di kantor polisi, dengan cara dipukul, ditendang, dan dihantam popor senapan, ia dipaksa mengaku telah melakukan pembakaran.
4. **Keus Balyo (26)** ditangkap di rumahnya pada 27 September 2019. Saat pulang dari kebun, ia melewati sebuah pos militer. Ia tiba-tiba dihentikan dan hendak ditangkap ketika ia melarikan diri menuju bandara tetapi kemudian menyerah ketika ia sadar bahwa ia bisa ditembak dari belakang. Ia dipukuli, ditendang, dan disetrum di kantor polisi.
5. **Carlos Asemki (20)** ditangkap di rumahnya pada 28 September 2019. Ia disiksa begitu sampai di kantor polisi. Seluruh tubuhnya dipukuli dan mulutnya disundut rokok sebanyak enam kali.

la disiksa sampai berdarah dan disetrum selama interogasi yang berlangsung dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore.

6. **Hermanto Nabyal** (23) ditangkap di rumahnya pada 1 Oktober 2019. Lengan dan kakinya diborgol saat dimasukkan ke dalam mobil polisi. Ia dipukuli dan ditendang berulang kali begitu sampai di kantor polisi.

JAKARTA – Dua Tahanan Politik

1. **Veronica Koman** (32) ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Timur pada 4 September 2019. Polisi menuduhnya menghasut kekerasan melalui ujaran kebencian dan menyebarkan hoaks insiden di asrama Surabaya di akun Twitter-nya, yang berujung pada pecahnya Gerakan Melawan. Polisi mengatakan tindakan Veronica melanggar pasal 45A ayat (2) UU ITE, pasal 160 KUHP, pasal 15 KUHP, dan pasal 16 UU tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Karena waktu itu ia berada di Australia, polisi mengumumkan bahwa mereka meminta bantuan Interpol agar menerbitkan “red notice”. Kini ia termasuk dalam DPO.
2. **Dandhy Laksono** (44) ditangkap di rumahnya sekitar jam 23.00 WIB, 26 September 2019. Polda Metro Jaya mengklaim twitnya tentang korban kerusuhan di Jayapura dan Wamena tanggal 23 September 2019 sebagai ujaran kebencian, menghasut orang melakukan kekerasan, melanggar UU ITE pasal 28 dan 45. Ia kemudian dibebaskan jam 4 pagi setelah banyak pihak mengancam penangkapan tersebut, tetapi ia tetap menjadi tersangka sampai hari ini.

Untuk informasi lebih lanjut:

Papuans Behind Bars

www.papuansbehindbars.org



www.tapol.org